



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021**

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unit kerja/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJM Nasional.
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2016-2021 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAB IV DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021 Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


BENNY MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan/ kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, namun untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah pada tahun terakhir periode 2016-2021, maka Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD melalui mekanisme perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, maka penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan pembangunan. Yang tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih.

Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD, agar selaras dengan program prioritas Bupati terpilih.

Ketiga, Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-PD yang menghasilkan rancangan RPJMD.

Keempat, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah, guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.

Kelima, Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Keenam, Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR...



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	I - 1
1.1 LATAR BELAKANG	I - 1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I - 2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I - 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I - 11
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN	I - 12
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II - 2
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II - 7
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah) ..	II - 8
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 13
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 14
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II - 15
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib.....	II - 15
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II - 41
2.3.3 A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang	II - 46
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II - 47
BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III - 1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III - 2
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III - 15
3.3 PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAN (2016 S/D 2021).....	III - 18
BAB 4 ANALISA ISU-ISU STRATEGIS	IV - 1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV - 1
4.2 ISU STRATEGIS KABUPATEN DHARMASRAYA	IV - 7
BAB 5 VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1 VISI	V - 1
5.2 MISI.....	V - 2
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V - 2
5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	V - 6
5.5 TEMA TAHUNAN.....	V - 7
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI - 1
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII - 1
7.1 KEBIJAKAN UMUM	VII - 1
7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII - 7
BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX – 1
9.1 PENENTUAN INDIKATOR KINERJA	IX – 1
9.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	IX – 2

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X – 1
10.1 PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN	X – 1
10.2 KAIDAH PELAKSANAAN	X – 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. dimana perencanaan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) jenis perencanaan yaitu rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai tahapan tersebut. Untuk pemerintah daerah, maka rencana jangka panjang tersebut telah dijalankan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk rencana jangka menengah pemerintah daerah berkewajiban dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sesuai dengan masa kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk rencana tahunan dijalankan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun tiap tahunnya sebagai alat dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Disamping Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai acuan utama penyusunan dokumen perencanaan, dasar hukum lain yang wajib dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004) yang membawa perubahan paradigma dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yang dijalankan oleh pemerintahan daerah, diantaranya bidang pembangunan daerah, keuangan daerah, kewenangan daerah, perangkat daerah serta aspek lainnya yang mempengaruhi kebijakan 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan 2 (dua) aturan hukum di atas, maka dengan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih, yaitu pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE sebagai Bupati dan Amrizal Datuk Rajo Medan, S.Sos sebagai Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sumatera Barat, maka tugas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjabarkan visi, misi dan program bupati/wakil bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-

2031, RPJM Nasional Tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati/wakil bupati dilantik maka RPJMD ini telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih tersebut tersebut ke dalam dokumen RPJMD secara utuh, maka digunakan 5 (lima) pendekatan perencanaan, yaitu ; politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pelaksanaan pendekatan tersebut melibatkan seluruh elemen atau pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha maupun masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

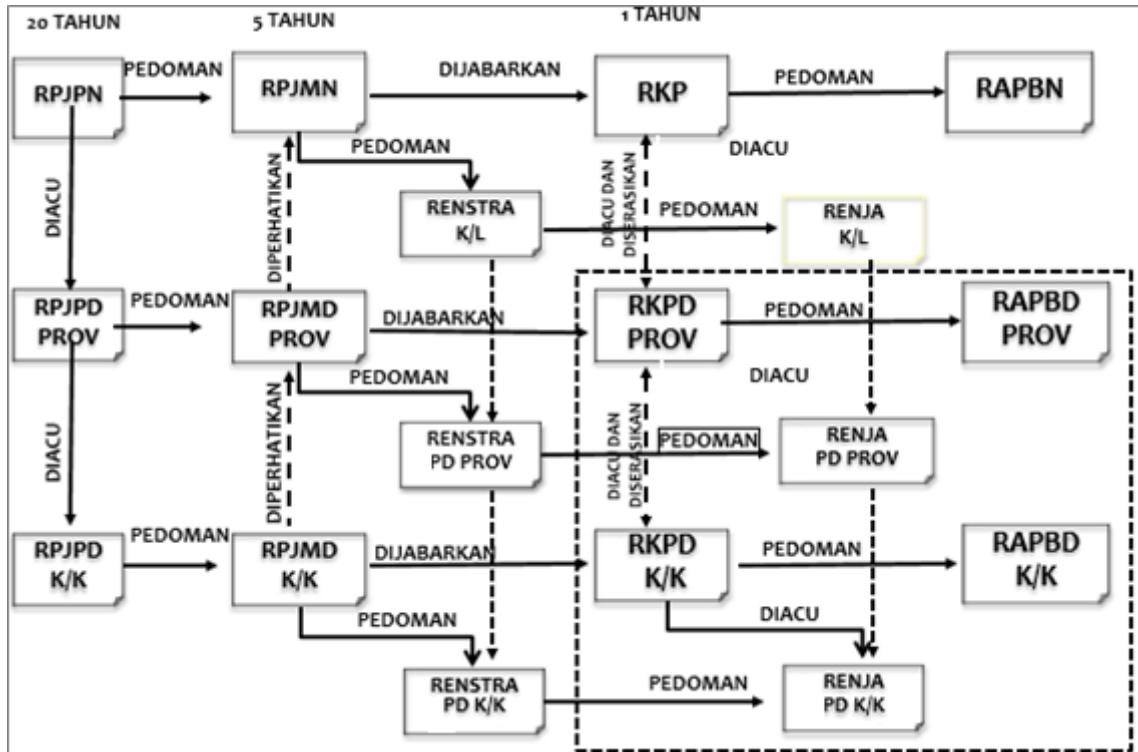
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

A. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan UU 25/2004 dan UU 23/2014, secara umum dalam proses penyusunannya maupun fungsinya, RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen lainnya, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten mempedomani RPJPD Kabupaten sekaligus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang juga sedang disusun, sedangkan menurut Permendagri 54/2010, muatan lain yang juga perlu diperhatikan adalah RPJMD kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya. Setelah RPJMD ditetapkan melalui perda, maka RPJMD ini akan dijadikan pedoman dalam penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta akan dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai tahun 2021, selain itu RPJMD dapat dijadikan pedoman utama dalam menyusun dokumen perencanaan komplementer lainnya untuk percepatan pembangunan daerah, seperti masterplan, rencana induk maupun perencanaan strategis lainnya yang yang diamanatkan oleh peraturan perindang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen Perencanaan



Visi pembangunan RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya". Maju artinya terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian daerah sejajar atau bahkan lebih baik dari daerah lain. Berbudaya artinya terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa serta norma adat.

Sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, pembangunan Kabupaten Dharmasraya pertama kali dimulai dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dan kemudian secara bertahap menyiapkan landasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menyiapkan landasan kelembagaan, infrastruktur dan tata kelola pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan daerah dan seterusnya selanjutnya mewujudkan nilai tambah ekonomi dan pemasukan aktifitas sosial ekonomi untuk menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumbar.

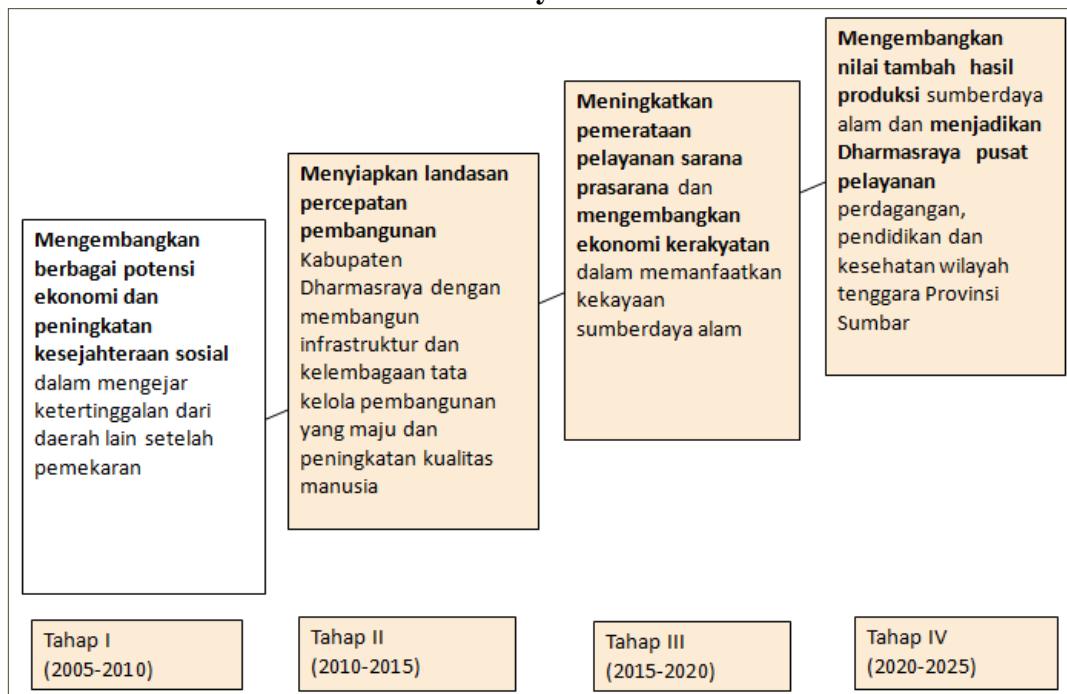
Prioritas pembangunan dalam tahap III RPJP Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 yaitu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah. Berikut dikutip fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III RPJP 2005-2025

- a. Membangun sarana dan prasarana untuk pemerataan pelayanan sosial bagi penduduk dan peningkatan hasil produksi.
- b. Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- c. Membangun sarana pengolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian perekonomian rakyat.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar ranking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan rencana jangka panjang, pembagian waktu dalam tahapan pembangunan bersifat ancar-ancar dan bukan batasan waktu yang tegas karena yang dipentingkan adalah bagaimana menjalankan tahapan pembangunan yang merupakan suatu skenario pembangunan untuk melangak dari tahap awal menuju perwujudan pada tahap akhir pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan jangka menengah pembangunan.

Dengan tema RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang ditetapkan “menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya” maka RPJMD ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Dharmasraya tersebut yang menekankan perlunya meningkatkan pemerataan pelayanan sarana prasarana dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan nilai tambah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, serta masih perlunya dengan memanfaatkan teknologi IT untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih efektif.

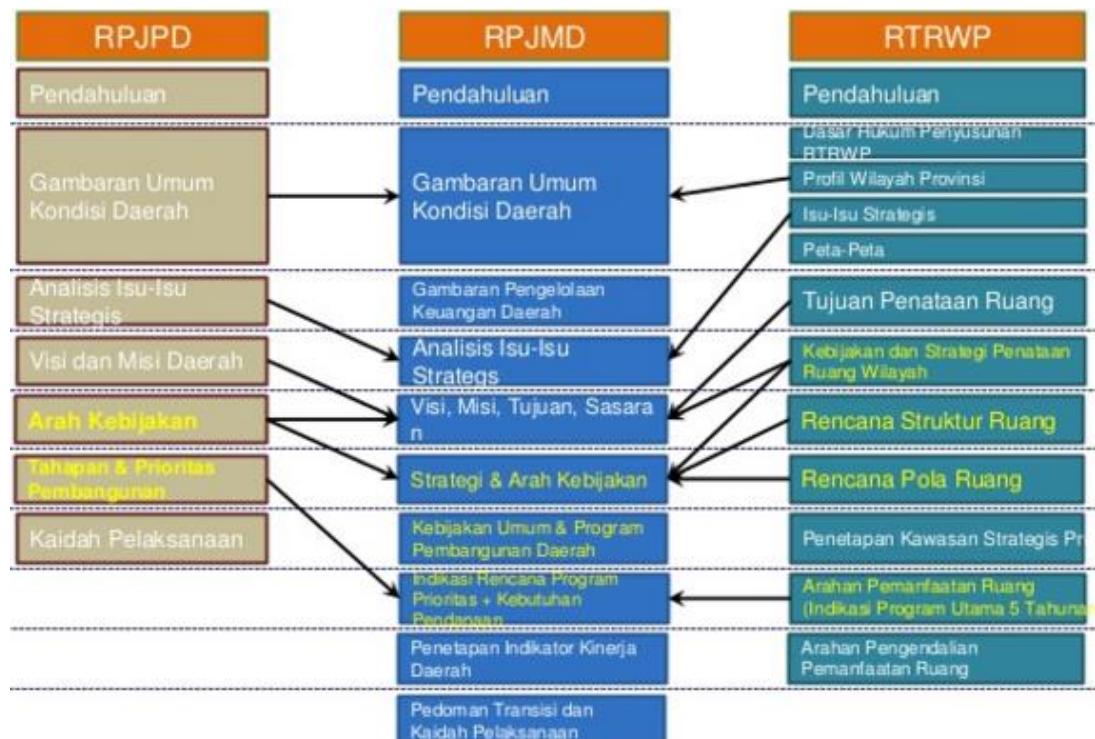
Tema/Agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya 2005-2025



B. Hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penataan ruang

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) tidak berjalan sendiri, karena didalam teori perencanaan, perencanaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah/keruangan. Dimana perencanaan pembangunan berjalan saling bersinergi dengan perencanaan wilayah.

Gambar 1.2. Keterkaitan muatan dokumen RPJPD, RPJMD dan RTRW



Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: “mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya”. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yang relevan untuk diacu dalam RPJMD yaitu:

- a. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan ditunjang dengan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya dan mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
- b. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang hari dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di

Kabupaten Dharmasraya. Dimasa depan Masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas hampir mencapai 5000 Ha. Sementara tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan.

- c. Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah dan pengembangan lebih lanjut industri pengolahan.
- d. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat dengan dilengkapi sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center. Pengembangan Kawasan Perikanan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung didukung peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan) dan pengembangan budidaya perikanan darat diperairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.
- e. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa ekspitasinya menjadi hutan restorasi.
- f. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.
- g. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.
- h. Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster
- i. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.
- j. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten dan interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; dan
- k. Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan

Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

Keterkaitan antara kebijakan dan program RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 dengan sasaran,strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA 2005-2025
Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan	Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian Mengaktifkan pengadaan bibit padi dan saprodi ditingkat petani; Pengadaan bibit sawit dan karet bermutu.
Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan dengan meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; dan revitalisasi sawah
Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah	Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun dengan mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah.
Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan produksi perikanan dengan meningkatkan produksi perikanan; mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan
Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan	Mengolah bahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya untuk memberi

RTRW KABUPATEN DHARMASRAYA 2011-2031	RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA 2005-2025
kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasi menjadi hutan restorasi.	nilai tambah
Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.	Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung; Revitalisasi los kios pasar nagari
Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.	Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya; Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya
Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk; Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial; Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten; Berkurangnya lahan kritis; Berkurangnya dampak pencemaran sungai Batang Hari
Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten; interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman	Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran; Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar; Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan; Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan; Peningkatansanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung; Revitalisasi los kios pasar nagari Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk pada pusat-pusat kegiatan.

Disamping itu dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya ini juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten tetangga yaitu : RPJMD Kabupaten Sijunjung, RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, RPJMD Kabupaten Bungo, RPJMD Kabupaten Tebo, dan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berkat erat dengan program yang menangani daerah yang berbatasan langsung

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, ekonomis, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

1.5. MAKSUM DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016–2021 adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam bentuk dokumen RPJMD secara utuh. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Mendukung sinergitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Nasional
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

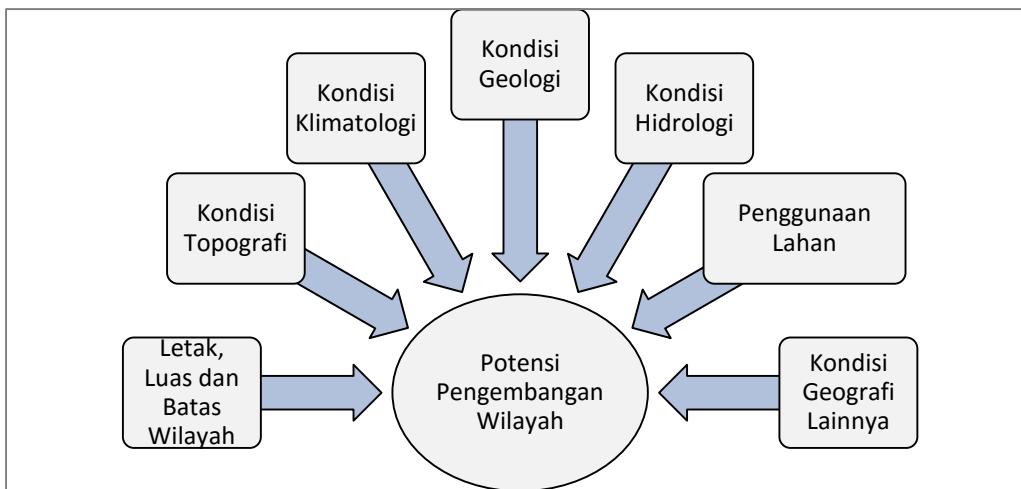
Penyajian gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui penyajian tabel/tabulasi data, analisis, hasil tinjauan lapangan serta didukung oleh foto/gambar. Hal ini digunakan untuk mendukung dan memudahkan pemahaman dalam menyajikan kondisi lapangan pada saat RPJMD ini disusun. Gambaran umum kondisi daerah disajikan dalam 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Gambaran umum daerah disusun secara series dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dan/atau sampai tahun 2015 tergantung pada ketersediaan data yang ada. Sedangkan jenis data yang disajikan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selama periode RPJMD ini masih mempedomani Permendagri 54/2010 serta indikator yang tersedia pada sasaran pokok RPJM Nasional 2015-2019, selain itu juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, hal ini untuk menjaga keterkaitan antar dokumen dan fungsi data sebagai tolok ukur capaian kinerja pembangunan daerah sekaligus sebagai patokan (*benchmark*) Kabupaten Dharmasraya dengan wilayah yang lebih luas. Namun salah satu kendala dalam penyajian data adalah belum keluarnya data statistik secara resmi dari BPS (publikasi data lambat), diantaranya Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2016 (DDA 2016) maupun Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) tahun 2016 maupun publikasi lainnya yang akan digunakan dalam penyajian data.

Dari pengukuran capaian pembangunan ini nantinya akan dijadikan sumber informasi utama dalam memfokuskan dalam peningkatan pelayanan dan kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan bidang-urusman yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2016-2021.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Kondisi geografi

Gambar 2.1. Potensi Pengembangan wilayah



Untuk melihat gambaran fisik wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Dharmasraya, yang disajikan berdasarkan unsur kondisi geografi yaitu :

- Letak, luas dan batas wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi $00^{\circ}48'25,4'' - 1^{\circ}41'40,3''$ LS dan $101^{\circ}8'32,5'' - 101^{\circ}53'30,2''$ BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu $2.961,13 \text{ Km}^2$ (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas $3.025,99 \text{ km}^2$ (302.599 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 Nagari, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

- Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut

mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (derajat)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23.155	7,65
Agak Landai	3-8	68.786	22,73
Landai	8-15	72.339	23,91
Agak Curam	15-25	74.730	24,70
Curam	25-40	29.023	9,59
Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
Jumlah		302.599	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

- Kondisi klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.

- Kondisi geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat didaerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana strukur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil

- Kondisi hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang huluannya dari dataran

tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Didaerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

- Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tada hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).

2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

- Wilayah rawan bencana, sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.
 - (a) Banjir. Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah,

seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai

(b) Kebakaran, bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampanya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

b. Kondisi demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk

Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (jiwa)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	98892	102.083	104.801	108.935	112.227	115.515
2	Perempuan	92.530	95.516	97.800	101.756	104.678	107.597
	Jumlah (jiwa)	191.422	197.599	202.601	210.691	216.905	223.112
	Rasio jenis kelamin (persen)	106,88	106,88	107,16	107,06	107,21	107,36
	Pertumbuhan penduduk (persen)	2,65	2,83	2,53	3,99	2,95	2,86
	Rata-rata pertumbuhan (persen)				2,97		

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

Berdasarkan data BPS Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 31.690 jiwa, yaitu dari 191.422 jiwa di tahun 2010 menjadi 223.112 jiwa di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun yaitu 2,97%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan) selalu berada diatas 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.3 Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5106	1,69	21.512	9,64	4,21
3	Koto Besar	56057	18,53	26.071	11,69	0,47
2	Asam Jujuhan	48541	16,04	13.448	6,03	0,28
4	Koto Baru	22120	7,31	33.157	14,86	1,50
5	Koto Salak	12145	4,01	17.163	7,69	1,41
7	Tiumang	13443	4,44	12.499	5,60	0,93
6	Padang Laweh	6062	2,00	6.535	2,93	1,08
8	Sitiung	12457	4,12	26.367	11,82	2,12
9	Timpeh	32301	10,67	15.378	6,89	0,48
10	Pulau Punjung	44316	14,65	42.514	19,06	0,96
11	IX Koto	50050	16,54	8.468	3,80	0,17
Kab. Dharmasraya		302599	100	223.112	100	0,74

Sumber : Perda No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, dan
BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 302.599 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 223.112 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 56.057 ha atau 18,53% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 5.106 ha atau 1,69% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 42.514 jiwa atau 19,06% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.535 jiwa atau hanya 2,93% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,74 jiwa/ha. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 4,21 jiwa/ha, namun kecamatan ini memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 0,17 jiwa/ha.

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari untuk komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebelum masuk kepada indikator teknis pada masing-masing bidang urusan pemerintahan daerah, maka akan ditinjau terlebih dahulu indikator makro berupa indeks pembangunan manusia (IPM) dengan membandingkan capaian IPM Dharmasraya dengan kab/kota lainnya di Sumatera Barat. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga IPM ini dapat digunakan untuk mengukur dan membanding pembangunan suatu daerah dengan daerah lainnya. Indikator yang digunakan dalam menghitung IPM merode baru yang berbeda dengan perhitungan IPM sebelumnya hingga tahun 2013. Mulai tahun 2014 indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam perhitungan IPM, namun diganti dengan indikator lain yaitu harapan lama sekolah. Adanya perbedaan indikator dan rumus perhitungan IPM juga tidak seperti IPM sebelumnya. IPM metode baru terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator angka harapan hidup, kemudian dimensi pengetahuan yang diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkotaan disesuaikan. Untuk melihat posisi capaian IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kab/kota dan provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
1	Kepulauan Mentawai	64,05	11,48	6,27	5,684	57,41	19
2	Pesisir Selatan	69,96	13,04	8,11	8,412	68,07	11
3	Solok	67,35	12,88	7,57	9,334	67,12	14
4	Sijunjung	65,22	11,94	7,33	9,796	65,30	16
5	Tanah Datar	68,75	13,35	7,93	10,103	69,49	10
6	Padang Pariaman	67,64	13,54	6,89	10,260	68,04	12
7	Agam	71,30	13,59	8,17	8,859	69,84	9
8	Limapuluh Kota	69,23	12,76	7,91	8,774	67,65	13
9	Pasaman	66,26	12,70	7,63	7,340	64,01	18
10	Solok Selatan	66,64	12,37	7,98	9,653	67,09	15
11	Dharmasraya	70,16	12,36	8,03	10,713	69,84	8
12	Pasaman Barat	67,03	12,30	7,83	8,109	65,26	17
13	Kota Padang	73,19	15,60	10,97	13,522	80,36	1
14	Kota Solok	72,74	14,27	10,77	11,350	76,83	4
15	Kota Sawahlunto	69,27	12,69	9,66	8,931	69,87	7

No	Kab/Kota	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita yg disesuaikan (Rp. 000)	IPM	rangking
16	Kota Padang Panjang	72,45	15,01	11,09	9,670	75,98	5
17	Kota Bukit Tinggi	73,52	14,92	10,79	12,330	78,72	2
18	Kota Payakumbuh	72,93	14,21	10,29	12,622	77,42	3
19	Kota Pariaman	69,59	14,49	9,96	11,814	74,98	6
	Sumatera Barat	68,66	13,60	8,42	9,804	69,98	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat capaian IPM Kabupaten Dharmasraya di tahun 2015 mencapai 69,84, naik dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 69,27, dan berada sedikit di bawah IPM provinsi yang berada pada angka 69,98. Dilihat dari perbandingan indikator pembentuk IPM, indikator angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita disesuaikan berada di atas provinsi, namun pada dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih berada di bawah provinsi.

Melihat kondisi tersebut, maka ke depannya, percepatan pembangunan bidang pendidikan mesti mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan bidang lainnya, sehingga Dharmasraya mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk menjelaskan data-data makro pada lingkup aspek kesejahteraan masyarakat, lebih menampilkan data dan analisis untuk memperlihatkan kondisi ekonomi makro daerah, yang terdiri dari perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun bidang lain yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi (Indikator Ekonomi Makro Daerah)

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah dapat dilihat melalui indikator ekonomi makro daerah yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah :

Tabel 2.5 Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.	Pertumbuhan PDRB	-	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
1.2.	Laju inflasi provinsi	7,84	5,37	4,16	10,87	11,58	1,08
1.3.	PDRB per kapita	23.650.000	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209
1.4.	Indeks Gini	-	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
1.7.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	10,56	10,09	8,82	7,74	6,97	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Masing masing indikator di atas akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK 2010)

Tabel 2.6 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.441.465,0	1.496.258,3	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
B	Pertambangan dan Penggalian	524.346,9	596.401,9	606.724,8	644.852,3	654.452,4	645.615,4
C	IndustriPengolahan	311.838,1	324.875,0	348.172,1	362.682,4	381.006,6	394.374,6
D	PengadaanListrikdanGas	757,8	805,2	857,9	874,5	953,5	971,8
E	PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	597,3	658,9	675,0	788,3	822,9	860,7
F	Konstruksi	498.122,1	526.216,1	569.473,8	624.084,0	678.472,2	748.673,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	552.251,0	586.614,8	634.470,9	689.735,9	746.242,2	792.820,3
H	Transportasi dan Pergudangan	245.253,8	259.460,8	282.388,6	309.046,0	338.030,9	367.215,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.613,6	37.535,7	39.883,0	42.488,2	45.414,8	47.998,1
J	Informasi dan Komunikasi	246.404,9	270.479,4	303.798,8	339.883,7	377.181,1	420.857,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	96.507,3	103.221,7	112.456,8	120.481,0	128.878,0	134.403,4
L	Real Estat	94.283,3	101.496,0	108.287,3	114.085,6	120.339,3	128.101,1
M,N	Jasa Perusahaan	873,8	935,8	1.003,6	1.078,4	1.158,4	1.245,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	303.725,5	330.004,9	335.712,3	343.165,3	348.660,3	367.069,6
P	Jasa Pendidikan	95.586,7	104.145,6	114.258,5	121.430,9	131.904,0	142.525,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64.407,5	69.051,3	75.967,7	81.722,4	88.385,4	95.910,1
R, S, T, U	Jasa lainnya	30.564,8	32.264,2	34.093,6	36.596,0	38.711,5	40.989,2
T O T A L		4.542.599,4	4.840.425,6	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyumbang tertinggi dalam pembentukan nilai PDRB dan nilainya selalu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari Kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal ini lebih disebabkan bukan karena turunnya nilai produksi/output dari sektor pertanian, namun lebih disebabkan oleh lebih tingginya perkembangan sektor lain dibanding dengan sektor pertanian ini. Hingga tahun 2015 harga komoditi juga masih belum berada pada titik yang diharapkan karena kondisi perekonomian regional yang belum sepenuhnya pulih sehingga menyebabkan harga komoditi utama terutama untuk sub sektor perkebunan yaitu komoditi karet dan sawit belum begitu menggairahkan.

Dilihat dari 17 sektor PDRB, maka 3 sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi (11,58%), selanjutnya sektor konstruksi (10,35%) dan sektor ketiga adalah sektor transportasi dan pergudangan (8,63%), sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh 5,43%. Satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif 1,35% atau nilainya turun dibandingkan tahun

2014. Sektor lain yang memiliki peningkatan kontribusi adalah sektor konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor informasi dan komunikasi.

Untuk melihat posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya dengan provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah :

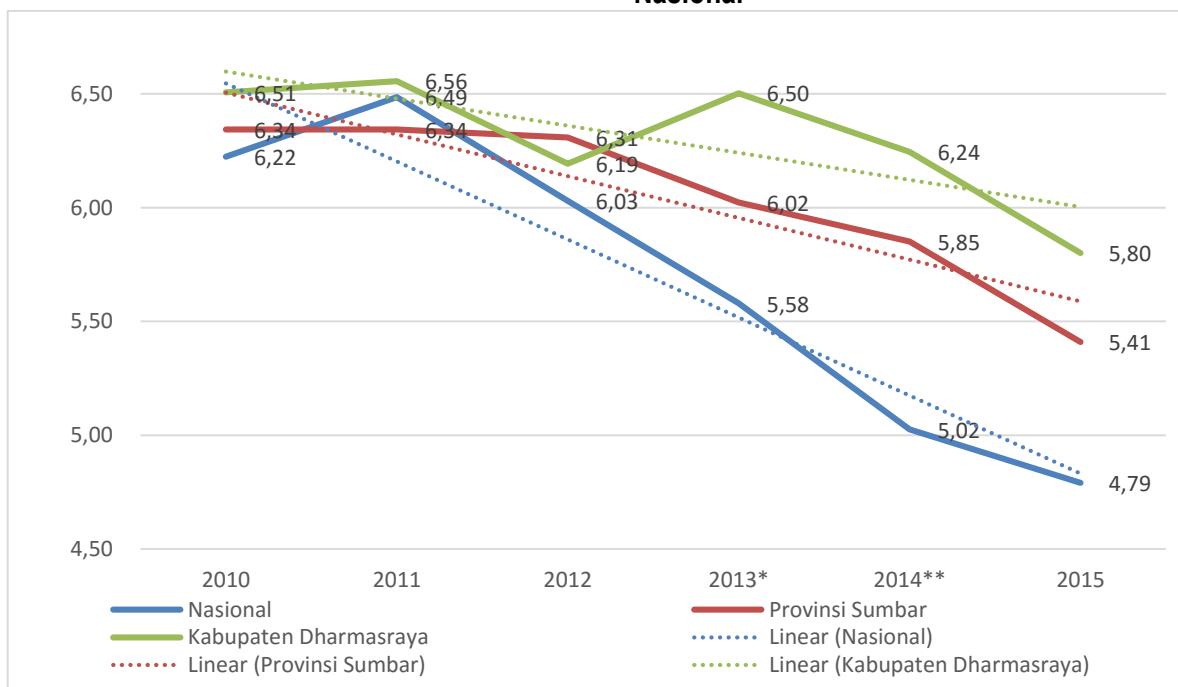
Tabel 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015 (ADHK Tahun 2010)

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan PDRB Dharmasraya	6,51	6,56	6,19	6,50	6,24	5,80
2	Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat	6,34	6,34	6,31	6,02	5,85	5,41
3	Pertumbuhan PDB Nasional	6,22	6,49	6,03	5,58	5,02	4,79

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan data tahun 2010 sampai tahun 2015 pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya cenderung tinggi dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi, hal ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Dilihat dari perbandingan 19 kab/kota, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya berada di urutan 9, turun dibandingkan rangking tahun sebelumnya yang berada di urutan 3.

Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Jika dilihat dari gambar, posisi pertumbuhan ekonomi Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat maupun nasional mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, jika pada tahun 2011, ketiga wilayah ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama yaitu berkisar antara 6,34% hingga 6,56%, namun perkembangannya hingga tahun 2015, ketiga wilayah ini mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB sekaligus menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan pertumbuhan sumbar dan nasional, maka pertumbuhan ekonomi Dharmasraya masih relatif lebih tinggi, begitu juga dengan Sumbar masih memiliki perumbuhan di atas nasional.

2. Laju Inflasi provinsi

Untuk melihat kondisi kecenderungan fluktuasi harga barang pada umumnya, dengan belum adanya perhitungan inflasi Dharmasraya, meskipun fluktuasi harga provinsi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya mewakili fluktuasi harga kabupaten Dharmasraya, namun adanya keterkaitan ekonomi antar wilayah maka perlu mempedomani angka inflasi Provinsi Sumatera Barat, perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 tercatat sebesar 1,08%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya bahkan tercatat sebagai angka inflasi terendah se-Indonesia, berdasarkan analisa Kajian ekonomi regional Bank Indonesia, rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian yang berasal dari penurunan kinerja industri pertanian, perdagangan, pengolahan dan industri transportasi dan komunikasi. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

3. PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan besaran pendapatan yang diperoleh setiap orang berdasarkan perhitungan PDRB ADHB. Perkembangan PDRB perkapita terus mengalami kenaikan, jika pada tahun 2010 berada pada angka 23,64 juta rupiah, di tahun 2015 sudah berada pada 34,8 juta rupiah. Naiknya pendapatan perkapita ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**Tabel 2.8 PDRB Perkapita ADHK tahun 2010 dan Indeks Gini
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB perkapita (rupiah)	23.640.656,4	26.030.000	28.070.000	30.510.000	33.050.000	34.825.209,0
PDRB ADHB (Juta rupiah)	4.542.599,4	4.840.425,6	3.448.616	3.942.078	4.491.735	7.769.922,0
Jumlah Penduduk (jiwa)	192.152	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

4. Indeks Gini

Indeks Gini menentukan apakah kekayaan atau pendapatan wilayah tersebut merata di masyarakat atau hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Nilainya berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu), semakin mendekati nol maka ketimpangan semakin rendah, dan begitu sebaliknya. Dilihat dari perkembangan data ekonomi daerah, perbaikan pada indikator ekonomi khususnya pendapatan perkapita juga diiringi oleh semakin rendahnya indeks gini. Hal ini memberikan perkembangan ekonomi yang berkualitas. Artinya perbaikan tingkat kesejahteraan semakin dirasakan oleh banyak masyarakat Dharmasraya.

**Tabel 2.9 PDRB Perkapita ADHK tahun 2010 dan Indeks Gini
Indikator Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Gini Dharmasraya	n/a	0,369	0,425	0,340	0,324	n/a
Indeks Gini Sumatera Barat	n/a	0,329	0,350	0,338	0,321	0,342
Indeks Gini Nasional	n/a	0,410	0,410	0,413	0,410	0,400

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Indek Gini Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, walaupun masih diatas rata-rata Sumatera Barat namun sampai tahun 2014 nilainya hampir mendekati Sumatra Barat, namun masih di bawah nasional yang masih di atas 0,410. Ketimpangan di Dharmasraya semakin mengecil dan termasuk ketimpangan rendah, karena berada dibawah angka 0,4. Artinya dengan turunnya nilai Gini, maka pendapatan masyarakat semakin merata’.

5. Tingkat kemiskinan

Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan relatif tingginya pertumbuhan ekonomi, hal ini telah mampu menekan tingkat kemiskinan hingga mencapai 6,98 di tahun 2014. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di awal pemekaran pada tahun 2005 sebesar 13,01%. Penurunan tingkat kemiskinan ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak kepada Rumah Tangga Miskin atau disebut juga dengan masyarakat bepenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program dan kegiatan yang strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Adapun perkembangan persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10 Tingkat kemiskinan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2014**

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Tingkat Kemiskinan (persen)	10,56	10,09	8,82	7,74	6,98
Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	20.300	19.570	18.180	16.420	15.220
Jumlah penduduk (jiwa)	192.100	198.273	204.510	210.686	216.905

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya 2010-2014



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2012-2014 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM merupakan menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA.

Tabel 2.11 Capaian AMH, Harapan lama sekolah, Angka rata-rata Lama Sekolah, APK, dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Angka melek huruf	96,38	97,27	97,29	97,33	97,48	97, 53*
2	Harapan Lama Sekolah					12,19	12,36
3	Angka rata-rata lama sekolah	7,77	8,24	8,24	8,26	7,99	8,03
4	Angka partisipasi kasar						
	- APK SD/MI	110,99	103,99	110,38	109,14	110,38	108,61
	- APK SMP/MTs	71,3	79,13	73,52	70,93	80,98	90,93
	- APK SMA/SMK/MA	59,82	69,13	52,5	60,66	82,99	72,98
5	Angka Partisipasi Murni						
	- APM SD/MI	94,62	94,75	97,55	98,12	98,64	100,00
	- APM SMP/MTs	59,55	59,12	60,28	60,31	65,69	78,33
	- APM SMA/SMK/MA	47,47	44,14	40,68	51,74	63,34	57,21

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke

atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2011 saja angka ini sudah menunjukkan angka 97,29 dan capaian ini termasuk tinggi di Sumatera Barat. Dengan kondisi tersebut hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 3%.

Pada angka rata-rata lama sekolah, terjadi penurunan dari capaian tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 8,26 menjadi 7,99, perubahan ini sejalan dengan perubahan perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru, sedangkan di tahun 2015 angka rata-rata lama sekolah kembali meningkat menjadi 8,03, angka ini sebanding dengan kelas 8 SMP/MTs.

Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, nilainya selalu berada di atas angka 100, artinya terdapatnya siswa SD/MI yang bersekolah yang berasal dari daerah lain, angka ini selalu naik dari 103, 99 menjadi 110,23 di tahun 2015. Untuk tingkat SMP/MTs, meskipun angkanya masih relatif rendah dibandingkan dengan APK SD/MI, namun angka ini hanya menunjukkan sedikit peningkatan dari 79,13 di tahun 2011 menjadi 80,99 di tahun 2014. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK capaian APK memperlihatkan percepatan capaian APK dibandingkan dengan APK SMP/MTs. Jika di tahun 2011 hanya sebesar 69,13 menjadi 82,99 di tahun 2014.

Sedangkan untuk APM SD/MI, capaiannya makin mendekati angka 100, , terakhir pada angka 98,64, namun untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA masih jauh di bawah angka ideal 100, masing masing adalah 65,69 dan 63,34. Sehingga kedua tingkatan pendidikan ini masih membutuhkan perhatian khusus dibandingkan dengan tingkat SD/MI.

Meningkatnya APK maupun APM tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selain didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan pendidikan, juga didukung oleh program pusat maupun daerah dalam berbagai program dan kegiatan, diantaranya adalah pembangunan unit sekolah baru (USB), pembangunan ruang kelas baru (RKB), pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dukungan beasiswa dari badan amil zakat bagi siswa kurang mampu. Sehingga angka melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi meningkat serta jumlah siswa putus sekolah dapat dikurangi.

Adanya selisih yang cukup besar antara capaian APK dengan APM untuk setiap tingkatan sekolah, menunjukkan adanya ketidak tepatan usia anak yang bersekolah dengan usia sekolah yang seharusnya. Selisih tertinggi ada pada tingkat sekolah SMA/SMK/MA, selisih terendah ada pada tingkat sekolah SD//MI. melihat hal ini maka kebijakan yang dilakukan mestinya adalah penerimaan siswa sesuai dengan umur yang telah ditentukan.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

**Tabel 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka kematian bayi (AKB)	17,95	5,86	25,11	21,54	15,10	20,15
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	59	21	76	81	58	79
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	3.287	3.581	3.027	3.761	3.841	3.921
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	-	n/a	n/a	n/a	n/a	153

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2016

Keterangan : 1 = Sumber data Dinas Kesehatan, Tahun 2015

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 17,95 di tahun 2010, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Masih relatif tingginya AKB ini perlu menjadi perhatian khusus ke depan. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter) , penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga kesehatan.

- Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam melihat capaian pembangunan bidang kesehatan serta menjadi salah satu indikator dalam perhitungan IPM.

Dilihat dari perkembangannya selama 5 tahun terakhir, Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan cukup relevan dengan kondisi yang ada, naiknya capaian AHH ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan IPM kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari perkembangannya, kenaikan tertinggi adalah dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 66,55 tahun menjadi 69,76 tahun

**Tabel 2.13 Angka Harapan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 (tahun)**

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Harapan Hidup	66,00	66,25	66,50	66,55	69,76	70,16

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

2. Pemuda dan Olahraga

Dampak Kab. Dharmasraya menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2014 menjadikan jumlah sarana dan prasana olah raga semakin bertambah. Setiap tahun Kabupaten Dharmasraya juga tidak ketinggalan dalam kegiatan (even) Tour De Singkarak. Hal ini perlu diikuti dengan pembinaan olahraga semakin baik dari tahun ke tahun. Diharapkan dari tahun ke tahun hendaknya lahir atlit-atlit berprestasi di kancah Nasional ataupun Internasional.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum, bidang pelayanan pada masing-masing bidang urusan belum disesuaikan dengan bidang-urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan konkuren yang menjadi kewenangan kab/kota sebanyak 32 urusan, terdiri dari 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 5 urusan pendukung, pada urusan wajib dibedakan lagi pada urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak pelayanan dasar.

Dalam menganalisa kondisi umum daerah pada masing-masing urusan, maka disajikan berdasarkan ketersediaan data yang tersedia, baik data yang bersal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data yang berasal dari Perangkat daerah (PD) terkait.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

pelayanan dasar adalah : pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

1. Bidang Pendidikan

Mulai tahun anggaran 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan kependidikan, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dengan demikian penyajian indikator kinerja dan analisa hanya menampilkan hingga tingkat pendidikan dasar saja.

a) Angka Partisipasi sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) maupun pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan. APS menunjukkan persentase penduduk yang dikelompokkan pada usia jenjang pendidikan yang diserap oleh sistem pendidikan berdasarkan kelompok umur tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang dijalannya. APS digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah						
	- APS 7-12 Tahun	97,77	99,30	98,74	98,68	99,63	n/a
	- APS 13-15 Tahun	80,3	84,68	86,69	86,40	94,51	n/a
	- APS 16-18 Tahun	56,41	54,69	52,86	59,91	77,68	n/a

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

Kedua jenis kelompok usia pendidikan dasar menunjukkan adanya tren kenaikan, terutama untuk APS 7-12 yang sudah mencapai angka 99,63, artinya dilihat dari angka capaian, maka hampir semua penduduk usia 7-12 tahun ditampung oleh sistem pendidikan, namun pada APS 13-15 tahun, meskipun menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 94,51, ini artinya masih membutuhkan campur tangan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tampung sistem pendidikan untuk penduduk usia tersebut. Disini dapat dilihat bahwa masih terdapat lebih dari 5% penduduk usia sekolah belum tertampung oleh sistem pendidikan. Dilihat dari keterkaitan dengan indikator lain, seperti angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah, rendahnya APS 13-15 dibandingkan APS 7-12 dapat disebabkan oleh faktor putus sekolah serta angka melanjutkan yang masih kurang dari tingkat SD/MI ke SLTP, serta dukungan faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah, tenaga kependidikan, dan lainnya.

Untuk APS 16-18 memiliki capaian yang masih rendah, dengan capaian sebesar 77,68 tersebut masih terdapat sekitar 22,32 persen penduduk usia sekolah tersebut belum mengenyam pendidikan pada jenjang formal.

b) Rasio Ketersedian Sekolah (RKS)/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah (RKS)menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

**Tabel 2.15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
1	RKS SD/MI	n/a	57,91	56,76	56,39	61,66	61,58
	Jumlah gedung sekolah SD/MI	n/a	139	139	139	153	154
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	n/a	24.004	24.487	24.649	24.812	24.976
2	RKS SMP/MTs	n/a	26,27	28,95	33,10	51,97	54,79
	Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	n/a	31	31	31	49	55
	Jumlah penduduk kelompok usia13-15 tahun	n/a	11.801	10.707	9.366	9.428	9.490
2	RKS SMA/SMK/MA	n/a	18	13,27	16,21	25,10	29,28
	Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA	n/a	12	12	17	25	30
	Jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun	n/a	6.525	9.044	10.490	9.960	10.245

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan * = data tidak tersedia

Capaian RKS untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MS mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan sekolah sekolah SD/MI sebanyak 15, untuk tingkat SMP/MTs terlihat penambahan sebanyak 11 unit sekolah, sedangkan untuk tingkat SMA.SMK/MS terdapat penambahan sebanyak 18 unit sekolah. Dengan adanya penambahan unit sekolah tersebut berpengaruh pada naiknya capaian RKS untuk semua tingkatan sekolah

c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio guru/murid tingkat SD/MI maupun SMP/MTs mengalami fluktuasi, namun secara umum tren mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah guru yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa seorang guru SD membina anak sebanyak 15 orang, dan untuk seorang guru SMP membina 14 siswa. Hal ini menggambarkan ketercukupan guru, tetapi perlu pemerataan guru secara proporsional.

**Tabel 2.16 Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Guru : Murid				
	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 14	1 : 15	1 : 14	1 : 14
	Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 9	1 : 11	1 : 14	1 : 14
2	Rasio guru/ murid SD/MI (per 10.000)	13.36	15.42	14.80	14.98
	Jumlah guru SD/MI	1.963	1.770	1.869	1.882
	Jumlah Murid (SD/MI)	26.833	27.288	27.671	28.201
3	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	12.12	13.01	10.05	13.59
	Jumlah guru SMP/MTs	626	583	722	773
	Jumlah Murid (SMP/MTs)	6.840	7.587	9.776	10.508

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : *=angka prediksi

d) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah kejadian putus sekolah untuk SD tercatat sebanyak 50 kasus, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tercatat sebanyak 41 kasus. Diantara 11 kecamatan, terdapat 3 kecamatan dengan tidak adanya kejadian putus sekolah, yaitu Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Padang Laweh. Untuk Madrasah Ibtidayah (MI) tidak terlihat adanya putus sekolah di tahun 2013. Sedangkan kejadian putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar untuk tingkat SD maupun SMP/MTs dengan jumlah kejadian 31 siswa, diantaranya 11 untuk tingkat SD dan 21 untuk tingkat SD/MI,

Untuk menekan dan menanggulangi kejadian putus sekolah perlu dilakukan strategi melalui analisis penyebab kejadian yang ada, baik dari sisi kemiskinan, kenakalan remaja maupun faktor lainnya. Setelah ini baru dilakukan tindak lanjuti, apakah ini dilakukan melalui pembinaan maupun melalui pemberian beasiswa.

**Tabel 2.17 Jumlah Siswa Putus Sekolah
Kabupaten Dharmasraya**

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		SD	MI	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1	Sungai Rumbai	0	0	0	0	0	0
2	Koto Besar	11	0	11	16	4	20
3	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	0
4	Koto Baru	3	0	3	0	8	8
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	0
6	Tiumang	2	0	2	0	1	1
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	0
8	Sitiung	5	0	5	8	0	8
9	Timpeh	4	0	4	2	0	2
10	Pulau Punjung	19	0	19	2	0	2
11	IX Koto	6	0	6	0	0	0
Jumlah		50	0	50	28	13	41

Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Kesehatan

Untuk melihat perkembangan dan capaian pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator berikut :

- a) Rasio posyandu per satuan balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) melalui pendidikan gizi seimbang untuk keluarga. Peran masyarakat adalah dalam bentuk pembentukan kader Posyandu yang telah terbentuk hampir di setiap jorong. Pelayanan yang diberikan oleh Posyandu ini terutama bagi anak bawah lima tahun (Balita), serta pelayanan bagi ibu hamil. Sasaran yang dituju dari Posyandu adalah peningkatan gizi balita, penurunan angka kematian bayi dan penurunan angka kematian ibu melahirkan, serta pelayanan KB.

**Tabel 2.18 Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000 balita)	10,88	10,13	12,30	10,22	9,93	9,34
	Jumlah posyandu	198	230	257	257	257	243
	Jumlah balita	18.204	22.702	20.902	25.147	25.888	26.025

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat perkembangannya, mulai tahun 2010 hingga tahun 2015, rasio posyandu terhadap balita cenderung mengalami sedikit penurunan, hal ini dipicu oleh tingginya pertambahan jumlah balita dibandingkan dengan perkembangan jumlah Posyandu yang ada. Jika di tahun 2010 rasinya sebesar 10,88 mengalami penurunan hingga tahun 2015 menjadi 9,34. Kebijakan yang penting disini adalah dalam bentuk revitalisasi peran posyandu, peningkatan aktivitas kader posyandu serta peran bidan desa dan puskesmas sebagai mitra kader di tingkat jorong. Revitalisasi posyandu ini dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan juga lansia.

- b) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan jenis fasilitas tingkat pertama (FKTP) yang langsung melayani masyarakat pada lingkup pelayanan dasar. Program nasional yang terkait dengan ini yaitu berupa pemanfaatan dana BOK yang difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan SDGs bidang kesehatan. Selain dana BOK, operasional Puskesmas juga didukung langsung oleh dana APBD kabupaten

Untuk percepatan peningkatan mutu, pemerintah daerah juga telah mendorong seluruh Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), salah satu upaya peningkatan pelayanan di tingkat puskesmas

adalah pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang telah berjalan baik untuk rawat jalan dan/atau rawat inap Puskesmas.

Tabel 2.19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio puskesmas, poliklinik/klinik, pustu per satuan penduduk	0,281	0,277	0,318	0,361	0,369	0,363
Jumlah Puskesmas	11	12	12	13	13	13
Jumlah Poliklinik/Klinik	0	0	10	19	23	24
Jumlah Pustu	43	43	43	44	44	44
Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Saat ini Dharmasraya sudah memiliki 13 unit Puskesmas dari 11 kecamatan yang ada, sehingga ada 2 kecamatan yang sudah memiliki 2 unit puskesmas, yaitu kecamatan Sitiung dan kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sudah ada sebanyak 44 unit. Disamping sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, juga terdapat 44 klinik yang dikelola oleh swasta.

c) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2015 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Namun dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, maka telah dilakukan berbagai upaya, peningakatan sarana dan prasarana seperti penambahan ruang inap, penambahan fasilitas alat kesehatan, sisi lain yang dilakukan adalah penataan manajemen, serta peningkatan kualitas layanan dari tenaga medis dan paramedis. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada yaitu masih kurangnya ruang inap yang kurang mampu mengiringi penambahan jumlah pasien rawat inap masih menjadi permasalahan utama. Ke depan perlu jalan keluar yang lebih jelas seperti lanjutan pembangunan gedung RSUD yang baru.

Tabel 2.20 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.112

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh yang terletak di Pulau Punjung merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap perubahan rasio rumah sakit dari 0,005 di tahun 2010 menjadi 0,004 di tahun 2015.

d) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antara lain adalah penanganan komplikasi diantaranya terdapatnya kasus anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35 tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah komplikasi kebidanan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan dari jumlah kasus, meskipun demikian mulai tahun 2011 semua kasus dapat tertangani, hal ini guna mengurangi kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

**Tabel 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	608	361	390	559	822	838
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	735	361	390	559	822	838

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

e) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Perlunya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan guna meminimalisir penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas *Antenatal Care* dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	66	85	94	86	100	93
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	2.923	3.523	3.542	3.595	3.660	3.741
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	4.414	4.162	3.778	4.184	3.660	4070

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Keterangan : * = angka prediksi

Dilihat dari tabel di atas, cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan cenderung mengalami kenaikan dari 66 persen di tahun 2010, di tahun 2014 sudah semua pertolongan persalinan sudah ditangani tuntas oleh tenaga kesehatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan cakupan menjadi 93 persen.

f) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT, setiap tahunnya jorong yang telah terlaksana UCI meningkat, dari 76 % di tahun 2010 menjadi 85% di tahun 2015. Sehingga secara umum terjadi peningkatan cakupan layanan sampai tahun 2015.

**Tabel 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	76	67	63	60	70	85
	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	197	174	165	155	183	220
	Jumlah Desa / Kelurahan	260	260	260	260	260	260

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

g) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit diobati. Untuk mengatasi stunting masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi anak balita. secara komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan *stunting*, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 3 tahun) dalam menyelesaikan masalah *stunting* secara terintergrasi karena masalah gizi tidak hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi. Pada tahun 2012 belum semua balita yang mengalami gizi buruk tertangani, mulai tahun 2013 terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah balita gizi buruk dan semua balita gizi buruk sudah tertangani.

Tabel 2.24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	84	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay.Kes.Di sati wil kerja pada kurun waktu tertentu	5	101	82	53	53	14
Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	5	101	98	53	53	14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

h) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular (TBC BTA dan DBD)

Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasapenyakit menular telah dilakukan pengembangan Early Warning and Respons System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan penguatan dari Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB). Melalui Penggunaan EWARS ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan trend kasus penyakit khususnya yang berpotensi menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa).

Jenis penyakit yang tergolong penyakit menular adalah DBD, TB dan malaria. Pada akhir tahun 2015 Dharmasraya mengalami KLB kasus DBD dengan telah jatuhnya korban meninggal dunia. Untuk itu dalam rangka menanggulangi dampak yang lebih buruk, maka dinas kesehatan dan pihak terkait telah melakukan berbagai himbauan dan melakukan *fogging* pada titik-titik kejadian masyarakat yang terjangkit DBD. Kejadian DBD ini masih berlanjut hingga awal tahun 2016 dengan adanya pasien rawat inap penyakit DBD di RSUD Sungai Dareh.

Sedangkan untuk kasus TBC BTA, terdapat beberapa kasus yang terkait dengan keengganahan pasien suspect TBC yang tidak melapor dan datang ke Puskesmas sehingga dilakukan kunjungan rumah ke rumah, sehingga pada tahun 2015, 100% pasien TBC yang terlayani termasuk juga kasus DBD. Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini perlu adanya peningkatan kesadaran prilaku hidup bersih sehat (PHBS) bagi masyarakat, terutama di lingkungan yang ada masyarakat kasus TBC BTA.

Tabel 2.25 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	38	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	114	146	168	140	147	188
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	299	146	168	140	147	188

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	n/a	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.Kerja selama 1 Tahun	n/a	23	45	109	35	135
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	n/a	23	45	109	35	135

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dari tahun 2010 s/d 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 73,49% menjadi 173,43%. Meskipun terdapat keganjilan dalam data olahan cakupan pelayanan, namun demikian jika dilihat dari sisi jumlah kunjungan pasien miskin, dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimana sebelumnya dilakukan melalui Jamkesmas dan Jamkesda, namun sejak tahun 2014 program ini diubah menjadi BPJS dan juga diiringi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam hal ini masyarakat miskin merupakan tanggungan pemerintah atau iuran asuransi bulannya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Program JKN ini dilaksanakan melalui pemberian kartu BPJS dan kartu Indonesia sehat. Dengan adanya pemberian kartu BPJS dan KIS kepada masyarakat miskin, maka berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan pasien miskin ke pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah sakit, diharapkan hal ini juga adanya peningkatan layanan masyarakat miskin pada klinik swasta yang bekerjasama dengan BPJS . Lalu dari tahun ke tahun peserta JKN dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dilakukan validasi sehingga penerima kartu BPJS dan KIS yang dibiayai oleh pemerintah tepat sasaran.

Tabel 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	86	73,49	70,50	190,10	140,60	173,43
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	27.503	14.382	12.817	31.215	21.400	24.480
	Jumlah seluruh penduduk miskin	32.032	19.570	18.180	16.420	15.220	14.115

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

j) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Fasilitas kesehatan puskesmas dan pustu sudah baik, dari 11 kecamatan, saat ini sudah terdapat 13 puskesmas, sedangkan untuk Pustu, belum semua nagari memiliki Pustu.

Tabel 2.27 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cakupan puskesmas	91	109	109	118	118	118
	Jumlah Puskesmas	10	12	12	13	13	13
	Jumlah seluruh Kecamatan	11	11	11	11	11	11
2.	Cakupan pembantu puskesmas	88	83	83	85	85	85
	Jumlah Pustu	46	43	43	44	44	44
	Jumlah Desa / Kelurahan	52	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

3.1. Pekerjaan Umum

- Proporsi Jalan Mantap

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang terdiri dari bidang kebina-margaan dan bidang ciptakarya. Pekerjaan yang terkait yaitu pembangunan jalan, jembatan, penanganan sampah, irigasi dan penataan lingkungan perumahan. Berdasarkan data dasar jalan, Kabupaten Dharmasraya terbagi atas 3 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 60,62 km; jalan Provinsi panjang 83,50 km; jalan kabupaten 1035,72 km, sehingga panjang total jalan yang ada di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 1179,84 km.

Tabel 2.28 Proporsi Jalan Mantap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Proporsi panjang jaringan jalan mantap	47,59	63,44	74,05	75,89	76,14	66,70
	Panjang jalan kondisi baik	623	860	874	895	898	787
	Panjang Jalan(Km)	1.308,9	1.356,00	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.180
2.	Proporsi Panjang jalan kabupaten mantap (> 40 KM/Jam)	42,49	52,23	83,01	83,01	86,39	86,71
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	505,7	632	860	860	895	898
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	1.189,9	1.210	1.036	1.036	1.036	1.036

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

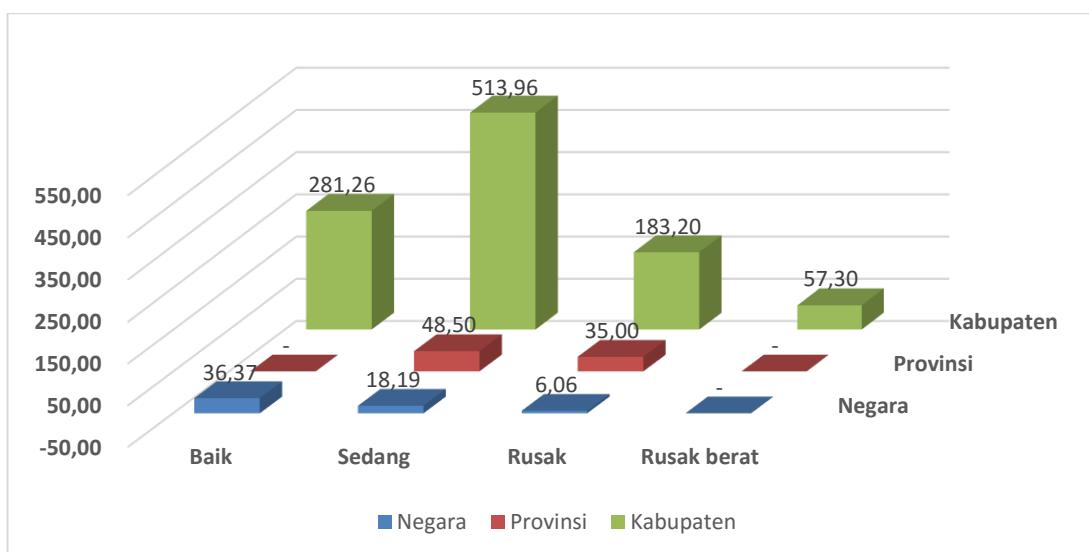
Kondisi panjang jalan dalam kondisi baik, baik jalan kabupaten maupun keseluruhan kelas jalan yang ada memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Proporsi panjang jalan kabupaten yang baik menunjukkan angka lebih baik dari proporsi panjang jalan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 2.29 Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

Kondisi Jalan	Status			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Baik	36,37	0	281,26	317,63
Sedang	18,19	48,50	513,96	580,65
Rusak	6,06	35,00	183,20	224,26
Rusak berat	0	0	57,30	57,30
Total	60,62	83,5	1035,72	1179,84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Gambar 2.4. Panjang jalan menurut kondisi dan pemerintah yang berwenang



- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Tabel 2.30 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	n/a	n/a	0,21	0,43	0,36	1,43
Jumlah daya tampung TPS (m ³)	n/a	n/a	42	90	78	320
Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.120

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan rasio TPS perseribu penduduk dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kondisi jumlah TPS yang belum ideal. Idealnya 250 penduduk terdapat 1 (satu) TPS dalam bentuk kontainer dengan kapasitas 5 m³. Karena rasio tersebut membandingkan dengan jumlah penduduk tanpa membedakan penduduk wilayah perkotaan dan pedesaan, maka masih terdapat banyak kekurangan jumlah kontainer terutamam wilayah di perkotaan.

3.2. Bidang Penataan Ruang

Penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ruang pembangunan. Saat ini hal-hal yang terkait dengan tata ruang dilakukan lintas sektoral dalam wadah yang disebut dengan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang telah aktif dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Perda tata ruang (RTRW), namun kegiatan ini masih dalam lingkup peta skala kecil oleh sebab itu masih diperlukan pendekatan skala peta agar arahan pembangunan penataan ruang lebih sempurna. Sampai tahun 2015 telah dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) sebanyak 2 lokasi yaitu kota Pulau Punjung dan Kota Koto Baru yang saat ini dalam proses mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dimasa yang akan datang agar Kabupaten Dharmasraya mampu mengelola ruang dengan baik dibutuhkan citra resolusi tinggi untuk seluruh wilayah Kabupaten sebagai input perencanaan tata ruang.

**Tabel 2.31 Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	0	0	2	2	3	4

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Usaha untuk membuat rencana tata ruang sudah dilakukan sejak tahun 2011 dengan adanya dokumen perencanaan kawasan strategis provinsi Sungai Rumbai yang selanjutnya disusul dengan tersusunnya dokumen RTRW Kabupaten yang telah diperdakian tahun 2012. Sampai tahun 2015 dokumen rencana penataan ruang sudah tersedia sebanyak 4 dokumen, yang terdiri dari RTRW Kabupaten, Zoning Regulation Kawasan Strategi Sungai Rumbai, RDTR Kawasan Pulau Punjung, dan RDTR Kawasan Koto Baru.

4. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Hingga tahun 2014, cakupan rumah tangga yang teraliri listrik mengalami peningkatan yang cukup baik, dari 83% di tahun 2012 menjadi 91% di tahun 2014, salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rentang waktu tersebut adalah telah dilakukannya penambahan jaringan listrik untuk 2 kecamatan yaitu Kec. Asam Jujuhan dan Kec. IX Koto, sehingga di tahun 2012 semua kecamatan sudah teraliri listrik, serta penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) maupun penambahan jaringan tegangan rendah (JTM) untuk melayani rumah tangga yang belum teraliri listrik. Sedangkan untuk rumah tangga bersanitasi baru mencapai 67%, sehingga di masa mendatang capaian ini perlu ditingkatkan lagi.

**Tabel 2.32 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rumah tangga pengguna listrik	71	75	83	84	91	91,5
	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	33.140	36.327	40.420	41.350	45.623	45.882
	Jumlah rumah tangga	46.438	48.385	48.681	49.373	49.877	50.137
2.	Rumah tangga ber-Sanitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	67	n/a
	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	33.661	n/a
	Jumlah rumah tangga	46.438	n/a	48.681	49.373	49.877	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Dinas ESDM Kab. Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Kesadaran berbangsa, keikutsertaan dalam pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam bentuk organisasi baik berupa LSM, ormas dan OKP. Pembinaan bagi kegiatan keorganisasian tersebut dilakukan oleh bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Politik yang berkeadaban perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya, dan agen-agen pembangunan berupa LSM perlu mendapat tempat untuk menjadi jembatan perubahan menuju masyarakat yang madani. Organisasi massa yang saat ini berkembang berlatar belakang pendidikan, kepemudaan dan agama perlu dibina sebagai aset pembangunan daerah.

**Tabel 2.33 Indikator Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		1	1	1	1	1
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah		2	2	2	2	2

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Sosial

Masyarakat penderita masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih banyak di Kabupaten Dharmasraya. Bantuan sosial yang diberikan setiap tahunnya cenderung naik, sehingga jumlah cakupan PMKS juga menurun. Saat ini telah ada panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 3 buah, Namun dari segi cakupan pelayanan yang rendah tahun 2014 maka sejalan dengan kegiatan pembangunan maka diperlukan program-program kemandirian sehingga para PMKS dapat berkarya ditengah-tengah masyarakat dan hidupnya lebih mandiri. Ini memerlukan program pembinaan dengan kader-kader pembina sosial yang perlu ditingkatkan jumlahnya.

**Tabel 2.34 Indikator Bidang Sosial
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3	3	3	3	3	3
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	n/a	30,34	27,05	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	n/a	850	1.827	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	n/a	2.802	6.755	12.835	12.835	12.835
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	n/a	13,34	17,34	74,53	40,79	74,53
	Jumlah PMKS yg tertangani	n/a	1.078	1.400	9.566	5.235	9.566
	Jumlah PMKS yg ada	n/a	8.078	8.076	12.835	12.835	12.835

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

A.2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

1. Bidang Tenaga kerja

Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70 % dengan tingkat pengangguran 2,05% pada tahun 2014. Tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dari tahun 2011 yang berjumlah 6,21 % merupakan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh berkembangnya perekonomian Dharmasraya, pusat-pusat perkotaan dan perkebunan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel 2.35 Indikator Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	69,21	68,93	72,01	69,54	69,59	65,88
	Angkatan kerja 15 tahun keatas	90.963	90.816	96.355	97.243	105.322	102.851
	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	131340		133.807	139.828	151.347	156.118
2.	Tingkat Pengangguran	2,7	n/a	6,21	5,13	2,05	3,51

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada disetiap nagari telah diakui keberadaannya (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada, begitu juga halnya dengan PKK.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena terjadi kenaikan kasus pada Tahun 2015 sedangkan yang tertangani semakin sedikit.

Berdasarkan pengaduan yang diterima, KDRT dapat ditangani seluruhnya. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat KDRT lagi dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan para ahli bahwa KDRT ini merupakan puncak gunung es yang sewaktu-waktu dapat meletus. Oleh sebab itu bidang yang menangani harus proaktif melakukan sosialisasi akan hak-hak perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.36 Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		82,40	82,40	83,04	77,87	67,66
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah		2.434	2.434	2.453	2.453	2.368
	Jumlah pekerja perempuan		2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		170	268	265	249	224
	Pekerja perempuan di lembaga swasta		5.030				
	Jumlah pekerja perempuan		2.954	2.954	2.954	3.150	3.500
3.	Rasio KDRT		0,02	0,02	0,01	0,01	0
	Jumlah KDRT		8	8	5	7	4
	Jumlah rumah tangga		48.385	48.681	49.373	49.877	59.490
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		n/a	83	79	52	32
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan		n/a	35	74	25	7
	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak		n/a	54	94	48	56

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa perkembangan terjadinya penurunan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2011-2015 menjadi 67,66%, sedangkan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami fluktuasi. Dilihat berdasarkan data rasio KDRT dari tahun 2011-2015 juga mengalami penurunan begitu juga dengan tingkat penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2015 menjadi 32 kasus.

3. Bidang Pangan

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sudah menjadi isu nasional untuk ditetapkan areanya. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki Bendungan Batanghari dengan debit 30.000 meter kubik diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Oleh sebab itu perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi areal LP2B. Saat ini telah terinventarisir 2079, 4 Ha lahan yang terpetakan untuk dijadikan LP2B, 4698,5 Ha yang sudah terdata, sehingga ada 2590,3 Ha lahan cadangan untuk pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dari 33.766 Ha lahan potensi yang bisa dikembangkan dari lahan kering dan rawa. Penetapan ini

nantinya dikukuhkan melalui perda. Oleh sebab itu perlu peran aktif pemerintah daerah untuk mewujudkan dan mensosialisasikannya.

4. Bidang Pertanahan

Kepastian akan hak tanah bagi masyarakat merupakan salah satu unsur keamanan, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir ini terlihat beberapa kasus pertanahan membutuhkan penanganan yang baik, namun kasus tersebut makin lama makin menurun. Oleh sebab itu bidang pertanahan harus proaktif dalam memberi kepastian hukum berupa sertifikasi lahan bagi masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi program nasional, karena masih terdapat lahan-lahan yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat.

**Tabel 2.37 Indikator Bidang Pertanahan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,07	1,23	0,93	0,91	1,98	0,22
	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	125	2.433	1.892	1.907	4.286	499
	Jumlah penduduk	192.100	198.298	204.480	210.689	216.905	223.731
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	n/a	33	33	60	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang diselesaikan	n/a	4	4	3	n/a	n/a
	Jumlah kasus yang terdaftar	n/a	12	12	5	3	3

Sumber : Setda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

5. Bidang Lingkungan hidup

Kabupaten Dharmasraya yang saat ini tumbuh dengan pesat perlu pengendalian terhadap dampak pembangunan dengan melakukan pengontrolan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang terjadi. Badan Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup yang menjamin baik air, tanah, dan udara Kabupaten Dharmasraya masih layak untuk kehidupan. Kasus-kasus lingkungan yang terjadi saat ini masih ada yang belum tertangani. Oleh sebab itu bidang lingkungan harus proaktif menjaga lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dengan cara melakukan penertiban kegiatan yang merusak lingkungan dan memberikan sosialisasi penggunaan ruang yang ramah lingkungan sambil terus mengawasi kualitas lingkungan. Kasus-kasus saat ini terutama tambang liar pada daerah hulu sangat merugikan masyarakat dan sektor lain terutama yang terkait dengan penyediaan air minum, perikanan, dan irigasi pertanian, perlu mendapat perhatian utama dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.38 Indikator Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase penanganan sampah	n/a	n/a	0,95	1,78	1,81	2,07
	Volume sampah yang ditangani (ton)	n/a	n/a	1.860	3.720	3.840	4.416
	Volume produksi sampah (ton)	n/a	n/a	195.435	209.520	211.637	213.776
2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.		100	100	100	100	100
	Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi		1	1	1	1	6
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL		1	1	1	1	6
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk			0,21	0,43	0,36	0,43

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah daya tampung TPS (m3)			42	90	78	96
	Jumlah penduduk			204.480	210.689	216.905	223.120
4.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	77,78	60,00	100	
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	4	6	7	3	7	
	Jumlah kasus lingk.yang ada	4	6	9	5	7	

Sumber : BLH Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Jika dilihat dari indikator lingkungan hidup, salah satu sumber pencemaran adalah besarnya volume sampah yang tidak tertangani. Walaupun kondisinya volume sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, namun masih diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi volume sampah akhir dalam bentuk kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga jumlah pada Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) akan semakin berkurang. Dimasa yang akan datang perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup perlu penanganan 3R yang terpadu dikembangkan di setiap kecamatan.

Penegakan hukum lingkungan juga menjadi hal yang sudah menjadi perhatian perangkat daerah, tahun 2011 dengan jumlah 4 kasus lingkungan tertangani seluruhnya, walaupun tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi penurunan penyelesaian kasus, namun di tahun 2015 semua kasus kembali tertangani dengan baik.

6. Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Jenis layanan yang dilaksanakan untuk bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengelurkan 4 (empat) jenis dokumen kependudukan, diantaranya Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Keempat dokumen ini menggambarkan peristiwa penting bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan adanya terdatanya status kependudukan ini akan memperjelas kondisi dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka diharapkan mampu mengatasi permasalahan kependudukan.

Mulai tahun 2016, data kependudukan ini juga akan dijadikan data dasar yang berhubungan dengan kependudukan misalnya jumlah penduduk, penduduk berdasarkan kelompok umur, dsb. Dalam pelaksanaannya maka perangkat daerah yang melaksanakan bidang ini dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keagamaan Kabupaten Dharmasraya khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Hal ini guna pemutakhiran data terkait dengan data bidang kependudukan.

**Tabel 2.39 Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga		n/a	80	91	99	100
2.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		88,00	89,00	91,00	91,00	90,93
	Jumlah penduduk usia>17 yang berKTP		115.885	119.613	123.230	124.450	125.266
	Jumlah penduduk usia>17 atau telah menikah		131.688	134.397	135.418	136.758	137.758
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		218,08	6,04	8,62	11,18	13
	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran		8.433	12.358	18.158	24.245	28.187
	Jumlah penduduk		3.867	204.480	210.689	216.905	223.731
4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		ada	ada	Ada	ada	ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pelayanan identitas warga negara berupa Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya rasio penduduk yang memiliki KK dan KTP di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun kepemilikan KK sudah mencapai 100 persen di tahun 2015, namun kepemilikan KTP belum mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama yang baru memasuki umur 17 tahun untuk mengurus kepemilikan KTP, namun demikian terjadi peningkatan rasio kepemilikan KTP dari tahun 2011 sebesar 88 % meningkat hingga tahun 2015 telah mencakup sebanyak 90,93%. Hal ini ditunjang oleh program nasional KTP elektronik sehingga terdapat data base penduduk dan KTP berbasis NIK.

Namun pada penerbitan akta kelahiran masih menunjukkan angka yang rendah. Hal tersebut karena masih rendahnya keinginan masyarakat melakukan pencatatan akta kelahiran. Dimasa yang akan datang sosisialisasi pentingnya akta kelahiran termasuk akta kematian sebagai data dasar kependudukan perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi negara khususnya keakuratan data kependudukan.

7. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dirikan sebagai pengembangan potensi sosial masyarakat bersama-sama dalam bentuk suatu wadah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada disetiap nagari telah ada (eksis) ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah kelompok LPM yang dibina sebanyak jumlah LPM yang ada. Namun hal ini tidak diiringi dengan kelompok binaan PKK. Dari jumlah PKK yang tersebar di Dharmasraya sebanyak 63 dan dalam kondisi aktif seluruhnya, maka kelompok yang dibina hanya 3 (tiga) PKK. Ibu-ibu memegang peran penting dalam

pembangunan maka dimasa yang akan datang pembinaan PKK akan penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di perdesaan.

Pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk ibu hamil, balita dan bayi saat ini berjumlah 257 buah. Posyandu sangat penting artinya bersama sarana kesehatan lainnya untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi serta gizi buruk. Pada tahun 2015 jumlah posyantu aktif sebanyak 77% dan yang tidak aktif sebanyak 23%. Hal ini juga berkaitan dengan pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan yang pada sebagian wilayah di Kabupaten Dharmasraya masih dirasa kurang.

Tabel 2.40 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Prasarana Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1	1	1	1
	Jumlah kelompok binaan LPM		52	52	52	52	52
	Jumlah LPM		52	52	52	52	52
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		n/a	0,05	0,05	0,05	0
	Jumlah kelompok binaan PKK		n/a	3	3	3	3
	Jumlah PKK		n/a	63	63	63	63
3.	PKK aktif (%)		n/a	100	100	100	100
	Jumlah PKK aktif		n/a	63	63	63	63
	Jumlah PKK		n/a	63	63	63	63
4.	Posyandu aktif (%)		n/a	59	74	77	77
	Jumlah Posyandu aktif		n/a	152	190	198	198
	Jumlah posyandu		n/a	257	257	257	257

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Menindaklanjuti relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk serta masih tingginya angka kelahiran, maka diperlukan koordinasi antara penyuluhan KB dan tenaga kesehatan di nagari termasuk sosialisasi pentingnya KB.

Peserta KB yang tidak mendapat pelayanan (*unmet need*) masih banyak terdapat. Oleh sebab itu peran kader dan penyuluhan KB sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) terutama mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis dan berkala maupun secara mandiri.

Keluarga sehat, keluarga pra sejahtera I jumlahnya semakin menurun namun masih dalam persentase yang tinggi. Oleh sebab itu program-program yang terkait dengan pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.41 Indikator Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,29	1,12	1,19	1,02	1,10
	Jumlah anak		63.326	53.899	61.511	53.816	61.511
	Jumlah keluarga		48.990	47.989	51.540	52.881	56.071
2.	Rasio akseptor KB		83	129,18	77,01	68,41	65,30
	Jumlah akseptor KB		28.968	48.948	31.690	30.572	31.690
	Jumlah pasangan usia subur		34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
3.	Cakupan peserta KB aktif		15,37	18,90	15,68	14,44	13,30
	Jumlah peserta program KB aktif		5.363	7.163	6.454	6.454	6.454
	Jumlah pasangan usia subur		34.890	37.891	41.150	44.690	48.533
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		26,63	28,73	27,72	16,04	15,13
	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I		13.047	13.788	14.287	8.484	8.484
	Jumlah keluarga		48.990	47.989	51.540	52.881	56.071

Sumber : BPML2NBPKB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

9. Bidang Perhubungan

Bidang perhubungan terkait dengan kelancaran arus transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas yang tinggi seiring dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya menuntut Bidang perhubungan menyediakan rambu-rambu dan peraturan untuk keselamatan para penumpang, pengemudi dan pejalan kaki. Dengan adanya kelengkapan rambu-rambu tersebut, pemeriksaan secara reguler faktor keamanan berlalu lintas terutama kendaraan yang melaju di jalan negara, provinsi dan kabupaten bersama-sama kepolisian diharapkan bisa menekan angka kecelakaan sekaligus mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas.

10. Bidang Komunikasi dan informatika

Cukup pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia menuntut adanya perubahan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah, adanya website sebagai wadah dalam memberikan transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. Saat ini sudah terdapat web site milik pemerintah daerah untuk mengomunikasikan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu web ini harus terkait dengan bidang-bidang lainnya sampai pada level nagari sehingga dapat dikembangkan satu web yang terintegrasi pada pemerintahan level tertinggi sampai terendah. Updating data dapat perlu dilakukan sesegera dan sesering mungkin, dimasa yang akan datang diharapkan web yang terintegrasi ini dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan pembangunan karena data sudah terintegrasi dengan baik.

**Tabel 2.42 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Web site milik pemerintah daerah	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Pameran/ expo	4	4	4	4	4	3

Sumber : Dinas HUBKOMINFOPARBU D Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

11. Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Terkait dengan arah kebijakan nasional bahwa koperasi dan UKM dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional, maka koperasi yang aktif setiap tahun di Kabupaten Dharmasraya mulai dari tahun 2011 semakin meningkat. Kesadaran untuk hidup bersama secara gotong royong menumbuhkan semakin banyaknya koperasi yang aktif kembali. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam pembinaan. Namun dari jumlah koperasi yang ada belum setengahnya yang aktif, sehingga dimasa yang akan datang jika benar-benar koperasi menjadi soko guru perekonomian maka kegiatan untuk mengaktifkan kembali koperasi dengan manajemen yang baik perlu dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya.

Usaha mikro dan kecil yang terdata sampai tahun 2014 adalah sebanyak 2.419 buah. Jumlah ini tetap/stagnan dari tahun 2013. Pendataan masih dibutuhkan untuk mengetahui potensi UKMK yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperoleh pemetaan UKMK dalam rangka penentuan arah dan kebijakan yang lebih jelas, diantaranya dalam bentuk peningkatan dan pembinaan baik dalam bentuk manajemen, kredit, dan mutu. Dilihat berdasarkan data, jumlah koperasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari 176 koperasi menjadi 200 koperasi. Sementara pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif hanya 93 koperasi atau 47% dari total koperasi di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 2.43 Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase koperasi aktif		30	32	34	45	47
	Jumlah koperasi aktif		52	57	64	87	93
	Jumlah seluruh koperasi	176	179	186	194	200	

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

12. Bidang Penanaman modal

Modal yang ditanam di Kabupaten Dharmasraya terlihat sangat pesat yang dibuktikan dengan pembangunan oleh pihak swasta melebihi pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pada lokasi-lokasi strategis yaitu di kiri-kanan jalan negara. Potensi Dharmasraya dengan kendala lahan yang kecil menyebabkan Dharmasraya sangat diminati oleh para investor terutama dalam bidang pertanian, dan jasa. Penanaman modal dimasa yang akan datang diharapkan muncul dari berbagai komponen masyarakat dalam bentuk ventura maupun sharing dengan pihak-pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat berupa koperasi dan badan usaha milik desa/nagari.

**Tabel 2.44 Nilai Realisasi dan Jumlah Investor Berskala Nasional
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/ Indikator	2012	2013	2014	2015
1.	Nilai realisasi investasi	41.539.451.000.	50.764.331.000	288.567.107.000	144.240.000.000
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	30	14	11

Sumber : BP2MPBJ Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

13. Bidang Kepemudaan dan olah raga

Bidang kepemudaan masih belum berkembang di Dharmasraya yang terbukti dengan jumlah organisasi yang stagnan dari tahun 2011 sampai 2015. Ke depan perlu pemuda didorong untuk berorganisasi sehingga pemuda mempunyai wadah untuk mengembangkan potensinya. Keberhasilan menyelenggarakan Porda Sumatera Barat dengan tersedianya GOR yang representatif dapat mendorong pembangunan dibidang keolahragaan di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi keolahragaan.

Berdasarkan perkembangan data, terlihat masih minimnya pembinaan kepemudaan dan bidang olah raga di masyarakat. Sehingga ke depan perlu peningkatan pembinaan khususnya cabang olah raga serta atlit berprestasi. Dengan adanya sarana sport center yang telah dibangun maka perlu penggunaan secara optimal.

**Tabel 2.45 Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah organisasi pemuda		2	2	2	2	2
2.	Jumlah organisasi olahraga		18	24	24	32	32
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan		4	5	6	6	6
4.	Jumlah kegiatan olahraga		12	12	12	12	12
5.	Jumlah lapangan olahraga		100	100	100	88	78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

14. Bidang Statistik

Mulai tahun 2015, penyelenggaraan statistik dasar dalam bentuk produk buku Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Dharmasraya tidak lagi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemda dengan BPS Kabupaten Dharmasraya. sehingga kedua jenis keluaran tersebut tetap ada namun langsung dikeluarkan oleh BPS. Dengan adanya perubahan tersebut maka ke depan yang akan dilakukan oleh pemda adalah dalam bentuk data statistik sektoral yang akan dijadikan data statistik sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan per bidang-urusan.

**Tabel 2.46 Indikator Bidang Statistik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	Ada	Ada	ada	ada	belum

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

15. Bidang Persandian

Bidang persandian merupakan bidang urusan pemerintahan yang lahir berdasarkan pembagian urusan pada Undang-Undang 23/2014. Bidang persandian bertujuan untuk Pengamanan Informasi pemerintah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat daerah kabupaten/kota yang akan diselenggarakan mulai tahun 2017.

16. Bidang Kebudayaan

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multietnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik.

Selain kekayaan pada multi etnis, Dharmasraya juga memiliki kekayaan budaya sjarah, sehingga kedepannya perlu adanya usaha yang lebih dalam penetapan dan pengelolaan kekayaan bida sejarah sesuai dengan kewenangan daerah terutama dalam pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di kawasan cagar budaya, diantaranya Candi Padang Roco, Candi Awang Maombiak, dan Candi Pulau sawah, serta objek cagar budaya lainnya

**Tabel 2.47 Indikator Bidang Kebudayaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	3	3	4	4
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		2	3	3	3	3
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	46	46	46	46	46	46
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	46	46	46	46	46	46

Sumber : Dinas Hubkominfoparbud Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

17. Bidang Perpustakaan

Masih kurangnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengindikasikan Budaya membaca saat ini kurang. Hal ini terasa dengan semakin sedikitnya waktu yang digunakan untuk membaca terutama anak-anak dan remaja dibanding waktu yang digunakan untuk hal lain terutama gadget dan teknologi informasi. Keberadaan pustaka yang menarik bagi anak-anak dan remaja maupun dewasa dan orang tua penting artinya dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat. Saat ini jumlah kunjungan-kunjungan ke perpustakaan daerah sangat rendah. Walaupun terjadi peningkatan dalam

kunjungan pada tahun 2015. Oleh sebab itu koleksi buku, faktor pelayanan di perpustakaan, dan kenyamanan selama diperpustakaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan.

**Tabel 2.48 Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1	2
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		1,49	1,42	1,33	11,54	1,25
	Jumlah kunjungan keperpustakaan selama 1 Tahun		448	426	614	5.333	16.232
	Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani		300	300	462	462	13.000
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		8.755	8.755	9.704	9.074	10.075

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

18. Bidang Kearsipan

Pengelolaan bidang kearsipan di Kabupaten Dharmasraya dikelola oleh Kantor Perpusataan dan Arsip Daerah. perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku adalah 2 perangkat daerah. Dalam Hal ini bukan berarti perangkat daerah lainnya belum sepenuhnya mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan kata lain penyimpanan dilakukan di perangkat daerah masing-masing, oleh sebab itu bidang kearsipan strategi agar seluruh perangkat daerah dapat mengelola arsip secara baku sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Tabel 2.49 Indikator Bidang Kerasipan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	89,19
	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	2	2	2	2	2	33
	Jumlah perangkat daerah	37	37	37	37	37	37
2	Peningkatan SDM pengelola karsipan	1	1	1	0	1	1

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Pengelolaan arsip secara baku dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 5,41% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya menjadi 89,19% dari total perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan adanya sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini hanya 4 (empat) perangkat daerah yang belum menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

B. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan : adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

1. Bidang Kelautan dan perikanan

Perkembangan produksi ikan di Kabupaten Dharmasraya terlihat cukup pesat, terlihat berdasarkan data pada tahun 2012 sebanyak 5.355 meningkat tajam hingga tahun 2014 menjadi 21.55 ton meski dibandingkan tahun berikutnya turun menjadi 19.909 ton. Pada indikator lainnya terlihat bahwa potensi perikanan darat sangat tinggi di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah produksi perikanan terus meningkat. Walaupun belum memenuhi target namun terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok nelayan (petani ikan). Seperti bantuan bibit dan cetak kolam.

**Tabel 2.50 Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan	24	45	60	73	
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.533	5.355	11.348	21.565	19.909
	Target produksi ikan Daerah (Ton)	6.263	11.901	18.959	29.520	
2	Konsumsi ikan	96	95	100	97	99
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	19	20	20	23	23
	Target konsumsi Daerah (Kg)	20	21	21	23	24
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	18,14	6,02	3,95	2,54	1
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	338	343	467	561	340
	Jumlah produksi ikan di daerah	1.861	5.698	11.815	22.126	24.307

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2. Bidang Pariwisata

Kepariwisataan masih belum berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Potensi-potensi wisata belum dikelola secara maksimal. Saat ini telah ada rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten yang akan menjadi payung pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata yang potensial dikembangkan adalah pariwisata budaya terutama peninggalan kerajaan Dharmasraya dan pariwisata alam terutama di kiri kanan pinggir Sungai Batanghari serta pengembangan potensi wisata lainnya.

Dengan pendapatan per kapita yang tinggi maka kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin meningkat. Oleh sebab itu meningkatnya objek wisata dapat mengurangi kebocoran keuangan daerah sehingga kemakmuran berputar kembali ke wilayah Dharmasraya.

3. Bidang Pertanian

Perkembangan bidang pertanian dapat dilihat dari nilai dan kontribusi produk yang dihasilkan. Produk Domestik Regional Bruto bidang pertanian menampilkan jumlah produksi pertanian bari berbagai sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dicermati bahwa nilai produksi setiap sub sektor selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dikarenakan faktor ekstensifikasi atau intensifikasi pertanian karena pertanian sangat berkaitan erat dengan lahan.

**Tabel 2.51 Nilai dan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK 2010)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Nilai PDRB (juta)						
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.441.465,0	1.496.258,3	1.571.971,0	1.641.460,2	1.735.699,2	1.829.961,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.290.694,5	1.338.792,3	1.408.559,6	1.467.424,2	1.556.692,4	1.637.881,7
	a.Tanaman Pangan	175.540,3	181.886,9	189.061,3	188.659,6	193.304,0	198.619,9
	b.Tanaman Hortikultura	18.873,9	19.808,8	19.653,3	19.907,2	21.396,1	22.394,5
	c.Tanaman Perkebunan	980.618,6	1.016.157,7	1.071.298,9	1.126.030,6	1.206.155,5	1.276.893,6
	d.Pternakan	86.516,8	91.260,6	98.215,8	101.759,8	103.937,2	107.200,8
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	29.144,9	29.678,3	30.330,3	31.067,0	31.899,6	32.772,9
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	80.430,6	84.045,5	86.004,1	92.340,4	93.079,6	101.624,6
	3. Perikanan	70.339,9	73.420,5	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6
	T O T A L PDRB	4.542.599,4	4.840.425,6	5.140.195,7	5.474.455,1	5.816.312,7	6.118.296,7

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Lahan yang dapat diolah di Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan luas lahan kabupaten sangatlah tinggi karena lahan yang berkendala misalnya kawasan lindung sangat sedikit terdapat di Dharmasraya. Sumber daya lahan telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dari tabel kontribusi terlihat bahwa sumbangsih setiap sub sektor hampir sama setiap tahun, namun jika dibanding dengan sektor lainnya sektor pertanian kontribusinya semakin menurun. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan jumlah produksi pada masing-masing sub sektor sekaligus konsentasi pada jenis komoditas paling potensial dikembangkan dari sub sektor tersebut. Pertanian tanaman pangan, integrasi perkebunan dan peternakan serta pengembangan potensi perikanan merupakan kegiatan yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang

-sub sektor tanaman pangan

Ketahanan pangan terutama pada produksi beras sudah mengalami surplus, hal ini terlihat dari jumlah produksi dan konsumsi beras tahun 2010 sampai tahun 2015. Langkah menetapkan lahan pangan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Kondisi saat ini merupakan kondisi yang sangat tepat untuk mengembalikan lahan-lahan potensial yang telah beralih fungsi menjadi fungsi lain, terutama pada daerah irigasi teknis sungai Batanghari, sehingga dapat mewujudkan Dharmasraya sebagai lumbung

padi nasional. Ketahanan tidak hanya menyangkut tanaman pangan untuk makanan pokok tetapi juga menyangkut kebutuhan gizi masyarakat. Oleh sebab itu integrasi perkebunan dengan peternakan (sapi) perlu ditingkatkan terutama pada perkebunan besar.

**Tabel 2.52 Produksi dan Konsumsi Beras
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi						
- Produksi GKP(ton)	58.065	50.367	59.892	54.943	61.839	70.169
- Konversi GKP-GKG	86,02%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%	84,82%
- Produksi GKG	49.948	42.721	50.800	46.602	52.452	59.517
- Konversi GKG-beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- Produksi beras	31.337	26.803	31.872	29.238	32.908	37.341
Konsumsi lokal						
- Jumlah penduduk	192.100	198.273	198.273	210.686	216.905	223.120
Tingkat konsumsi beras/ - tahun(kg)	110	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (ton)	21.056	21.810	21.810	23.175	23.860	24.543
Surplus/defisit beras	10.281	4.993	4.993	4.993	9.049	12.798

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016 dan data diolah Tahun 2016

-sub sektor perkebunan

Dilohat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

**Tabel 2.53 Produksi komoditi Perkebunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Komoditi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Karet	28.237,98	39.974,58	34.160,26	34.876,83	34.739,35	32.784,5
Sawit	371.413,19	400.822,76	360.079,27	313.955,57	349.285,31	74020
Coklat	603,66	716,85	894,76	1.124,52	1.148,30	1.208,04

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Dilohat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, maka terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan oleh pemerrintah maupun masyarakat serta dapat menampung banyak tenaga kerja di daerah. Diantara ketiga komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

-sub sektor peternakan

Dari delapan komditi sub sektor peternakan, hampir semua komoditi mengalami perkembangan populasi positif, dan hanya itik yang tida terjadi pengurangan. Perkembangan sapi potong didorong oleh berkembangnya integrasi sapi-sawit serta adanya berbagai skim kredit dari perbankan dan juga didukung kebijakan pemerintah untuk terus mendorong perkembangan sapi. Untuk populasi ayam

petelur maupun buras juga terjadi peningatan yang baik, hal ini terlihat dari banyaknya peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peternakan ayam, khususnya ayam pedaging

Tabel 2.54 Populasi Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Komoditi	satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata tumbuh
1	Sapi potong	ekor	36.293	26,945	31,449	34,593	39,512	40,785	7.42%
2	Kerbau	ekor	12	4,402	4,881	3,476	5,716	5,973	7.14%
3	Kambing	ekor	11.804	12,496	14,845	15,405	16,204	15,574	4.93%
4	Domba	ekor		187	195	215	277	312	13.37%
5	Ayam Buras	ekor	67.637	97,357	104,194	126,197	134,774	139,485	8.65 %
6	Ayam Ras Petelur	ekor	n/a	10,352	26,793	28,334	25,500	44,000	65%
7	Ayam Ras Pedaging	ekor	477.640	3,478,800	2,720,082	3,531,798	4,737,000	4,301,600	4.73%
8	Itik	ekor	n/a	32,033	20,100	17,785	18,410	18,948	-8.17%

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

4. Bidang Kehutanan

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan bidang pertanian yang juga berkembang di Kabupaten Dharmasraya. Dengan potensi hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi tetap maka sub sektor kehutanan dan penebangan kayu dapat menjadi andalan. Data menunjukkan terdapat peningkatan produksi kehutanan dan penebangan kayu dari tahun ke tahun. Isu yang terkait dengan masalah kehutanan terutama pemanasan global harus dikelola dengan baik sehingga tebang pilih dan tebang tanam menjadi pilihan pada sub sektor ini. Pada lahan-lahan yang kritis perlu dilakukan kegiatan RLKT (rehabilitasi lahan dan konservasi tanah) sehingga terdapat keseimbangan antara yang ditebang dengan yang ditanam. Tenaga pelaksana dilapangan seperti polisi hutan perlu di perkuat peranannya dan sosialisasi kemasyarakatan untuk mengelola hutan lestari dapat ditingkatkan.

Tapal batas antar kawasan hutan saat ini masih dalam bentuk peta skala kecil, oleh sebab itu perlu peta skala besar untuk pendeliniasian kawasan kehutanan, disamping itu daerah dapat memanfaatkan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH-P) untuk mengelola kekayaan hutannya agar memberi manfaat lebih kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

5. Bidang Energi dan sumber daya mineral

Sumber daya mineral menghasilkan kontribusi hampir 11 % dari kontribusi keseluruhan sektor (14 sektor) produksi daerah. di dalam RTRW sudah di alokasikan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan, namun saat ini masih ada juga kegiatan penambangan liar. Penambangan liar yang baru tertangani adalah rata-rata 2 kasus setiap tahun tetapi pertumbuhan pertambangan liar tidak sebanding dengan jumlah penangannannya. Dampak

lingkungan pertambangan harus diminimalisir terutama pada kawasan hulu Sungai Batanghari. Walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang tinggi namun perlu kehati-hatian dalam mengelolanya karena sektor ini sensitif terhadap kerusakan lingkungan jika tidak diterapkan aturan-aturan yang berlaku.

Bidang Energi dan sumber daya mineral juga menangani permasalahan energi terutama ketersediaan arus listrik. Saat 85 % jorong yang ada di Kabupaten Dharmasraya telah terlayani arus listrik, sehingga dimasa yang akan datang angka tersebut diharapkan menjadi 100 %.

Tabel 2.55 Indikator Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertambangan tanpa ijin	n/a	50	67	10	10	0
	Luas Penambangan Liar yang diteribkan	n/a	2	2	2	2	1
	Luas area penambangan yang liar	n/a	4	3	20	20	3.400
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	11,5	12,2	11,8	11,5	10,9	9,81
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan	524.346	627.943	678.993	741.044	783.142	762.109
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.294	6.429.082	7.169.488	7.769.922

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 dan BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Perdagangan

Seiring dengan perkembangan sektor primer maka perkembangan sektor jasa perdagangan terlihat cukup pesat di Kabupaten Dharmasraya. Sektor perdagangan menyumbang sekitar 12 s/d 13 % terhadap total PDRB pada tahun 2010 sampai 2015 atau kontribusinya mengalami kenaikan kontribusi yang tetap tetapi jumlah produksi kegiatan sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya (lihat tabel berikut). Perdagangan terkait dengan penyediaan pasar. Pengembangan UKMK dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat miskin membutuhkan komitmen pemerintah untuk merenovasi pasar-pasar tradisional di setiap nagari atau kecamatan dan pelarangan pemodal besar masuk pada sektor *retail* (eceran). Oleh sebab itu dimasa yang akan datang komitmen ini perlu diteguhkan dengan cara merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.56 Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	12,38	12,61	12,68	12,63	13,09
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	552.251	638.893	724.191	814.887	905.204	1.017.072
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.294	6.429.082	7.169.488	7.769.922

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

7. Bidang Perindustrian

Jumlah PDRB sektor industri dari tahun 2011 sampai 2015 meningkat, namun peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan peningkatan yang lebih tinggi dari jumlah PDRB keseluruhan, sehingga kontribusi sektor industri terlihat menurun. Perkembangan industri hilir berbahan baku sumber daya alam yang dihasilkan dari Kabupaten Dharmasraya perlu didorong sehingga terjadi peningkatan nilai tambah yang besar dari kegiatan hilirisasi tersebut.

**Tabel 2.57 Indikator Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,86	6,81	6,67	6,27	6,01	5,85
	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri	311.838,1	351.378	383.213	403.148	431.046	454.621,7
	Jumlah PDRB	4.542.599	5.161.330	5.741.295	6.429.083	7.169.488	7.769.922
2	Pertumbuhan Industri.	n/a	12	11	53	n/a	2
	Jumlah Industri Tahun n - Jumlah Industri Tahun (n-1)	n/a	30	30	306	n/a	14
	Jumlah Industri s/d Tahun n	n/a	245	275	581	581	595
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	n/a	19	13	17	48	42
	Jumlah kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	n/a	3	2	3	10	10
	Jumlah kelompok pengrajin	n/a	16	16	18	21	24

Sumber : Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, dan BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2016

8. Bidang Transmigrasi

Kabupaten Dharmasraya merupakan lokasi penempatan transmigran dari berbagai lokasi di Pulau Jawa. Saat ini program tersebut sudah selesai dilakukan dan lokasi-lokasi transmigrasi sudah diserahkan pembinaannya ke Pemerintah Kabupaten. Berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya, maka masih tersedia alokasi lahan seluas 1000 hektar yang dapat digunakan untuk transmigrasi dan selebihnya dapat digunakan untuk relokasi penduduk yang mendiami kawasan lindung.

C. Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang perencanaan

Di tahun 2015, dari 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah terpenuhi, namun dokumen perencanaan yang diacu oleh dokumen rencana di bawahnya terutama untuk kesesuaian program dalam RPJMD dengan RKPD belum sepenuhnya sesuai. Sehingga ke depan perlu adanya usaha untuk peningkatan kualitas dokumen serta menjadikan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, sehingga program yang ada di dalam RPJMD dapat dilaksanakan dan terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.58 Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Belum	belum	belum	belum	belum	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

2.4. ASPEK DAYA SAING

Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional dan internasional, sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah, Aspek daya saing daerah ini dilihat dari segi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk dikonsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas. Pengeluaran ini termasuk juga pembelian barang yang tidak dapat diproduksi kembali seperti hasil karya seni dan barang antik. Barang tahan lama seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan juga meubel yang digunakan untuk usaha rumah tangga harus dialokasikan secara proporsional.

**Tabel 2.59 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2013**

Bidang Urusan/Indikator	2011	2012	2013
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta)	34	36	41
Total Pengeluaran RT (juta)	1.635.468	1.775.727	2.045.232
Jumlah rumah tangga	48.385	48.681	49.373

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dilihat dari ketersediaan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bahwa perkembangan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita mengalami peningkatan sesuai dengan kenaikan total pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yaitu dari 34 juta rupiah menjadi 41 juta rupiah di tahun 2013

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani dapat diartikan sebagai alat ukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

**Tabel 2.60 Nilai Tukar Petani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015**

Bidang Urusan/Indikator	2012	2013
Nilai tukar petani	102,06	100,94
Indeks yang diterima petani	105,11	103,52
Indeks yang dibayar petani (lb)	102,99	102,56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Dari hasil perhitungan nilai tukar petani di tahun 2012 dan tahun 2013 memperlihatkan adanya penurunan dari 102, 06 menjadi 100,94, hal ini lebih disebabkan oleh turunnya indeks yang diterima petani dari 105,11 menjadi 103,52. Melihat masih belum memadainya nilai tukar petani tersebut, maka diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian petani dengan membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani.

2.4.3. Rasio ketersediaan listrik

Dengan adanya ketersediaan listrik di tingkat rumah tangga diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dan secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.

**Tabel 2.61 Rasio ketersediaan listrik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015**

No	Bidang Urusan/Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	75	82	84	85	87
	Daya listrik terpasang	n/a	39.142	43.552	44.554	45.793	47.140
	Jumlah kebutuhan	n/a	52.533	52.822	52.902	54.059	54.265

Sumber : Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Melihat pada perkembangan rasio ketersediaan listrik dari tahun 2011 hingga 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 75% menjadi 87% dengan pertumbuhan daya listrik terpasang sekitar 4,82% pertahunnya. Daya listrik terpasang pada tahun 2015 baru mencapai 47.140 kwh, angka ini lebih rendah dari jumlah kebutuhan seharusnya sebesar 54.265. sehingga ke depan masih membutuhkan penambahan pemasangan daya listrik

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka APBD ini ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah yaitu **efektif, efisien, transparan dan akuntabel**.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan, sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu (realisasi APBD), sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, diantaranya ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Terkait dengan isu strategis bidang pengelolaan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana isu strategis ini terkait dengan aturan turunan terkait yang akan muncul yang akan mengatur mengenai kebijakan keuangan maupun penganggaran di masa mendatang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan diatur melalui undang-undang
- (2) supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK,
- (3) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (4) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah
- (5) pinjaman Daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- (6) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
- (8) Dana desa dan alokasi dana desa yang akan mengalami kenaikan secara signifikan hingga tahun 2019.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menjelaskan mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja serta pembiayaan daerah selama periode 2010 sampai dengan tahun 2015. Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari perkembangan nilai APBD, realisasi APBD terhadap perubahan APBD serta proporsi APBD.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Secara keseluruhan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 432,48 miliar di tahun 2010 menjadi 794,42 miliar di tahun 2015, atau mengalami kenaikan sebesar 361,93 Miliar..

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015

Kode Rek	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
4.	PENDAPATAN DAERAH	432.488.449.352	505.671.150.963	518.496.319.806	595.137.456.697	687.279.316.499	794.425.975.047	16,74
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.541.706.459	34.511.853.042	39.200.742.610	32.902.332.260	52.811.257.415	56.694.339.206	24,39
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	4.051.589.756	5.809.882.466	6.351.542.897	6.846.731.838	10.419.529.313	10.643.026.951	32,54
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	10.248.647.179	10.961.396.172	11.438.254.287	12.229.401.811	24.150.243.783	7.148.667.913	-6,05
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.068.043.895	5.115.188.436	4.777.943.948	5.618.214.642	5.144.409.428	4.793.094.913	11,25
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.173.425.629	12.625.385.968	16.633.001.478	8.207.983.969	13.097.074.891	34.109.549.429	63,46
4.2.	DANA PERIMBANGAN	333.450.451.531	363.128.458.014	417.947.507.976	482.875.326.556	543.756.231.129	604.520.411.648	16,26
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.789.530.331	27.826.375.150	30.096.431.976	27.939.498.556	27.747.425.470	23.905.825.648	-3,95
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	266.175.621.200	297.587.682.864	351.295.616.000	400.374.128.000	445.128.175.659	477.807.496.000	15,90
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	37.485.300.000	37.714.400.000	36.555.460.000	54.561.700.000	70.880.630.000	102.807.090.000	34,85
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.496.291.362	108.030.839.907	61.348.069.220	79.359.797.881	90.711.827.955	133.211.224.193	16,25
4.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	884.890.220	1.883.418.650	3.449.929.943	2.088.016.102	45,32
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.162.451.460	27.330.301.147	26.158.425.000	26.810.898.000	29.600.639.012	39.477.535.091	28,85
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.245.639.902	78.722.818.760	34.304.754.000	43.740.254.000	53.281.259.000	86.570.673.000	10,25
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	88.200.000	1.977.720.000	-	6.925.227.231	4.380.000.000	5.075.000.000	1.130,79

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Besaran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat dijadikan ukuran kemandirian fiskal, jika semakin tahun semakin besar peranan PAD maka tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan maupun sumber lain akan semakin berkurang.

Dilihat dari perkembangan nilai PAD dari tahun 2010 hingga tahun 2015, nilai PAD cenderung mengalami kenaikan, meski pada tahun 2013 terlihat adanya penurunan dibanding tahun 2012. Jika pada tahun 2012 nilai PAD tercatat sebesar 39,2 miliar rupiah naik menjadi 56,69 miliar di tahun 2015 atau naik sekitar 17,49 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 24,39%.

- **hasil pajak daerah**, secara definisi, berdasarkan UU 28/2009 bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.

Dilihat dari perkembangan terakhir, di tahun 2015 dari 13 jenis pajak yang dilaksanakan, hanya 2 jenis pajak yang mencapai tingkat realisaasi tinggi di atas 90%, yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi cukup besar yaitu 72,8% terhadap total pajak daerah , sedangkan 9 jenis pajak lainnya masih realisasinya berada di bawah 50%. Pada jenis pajak lain, seperti PBB-P2 dari 3,62 miliar yang ditargetkan hanya terealisasi sebesar 1,54 miliar atau sebesar 42,63%, maka untuk meningkatkan jumlah serta capaian PBB-P2 maka pada tahun 2016 pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB-P2, diharapkan dengan adanya pendataan ulang tersebut maka akan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak serta dapat dijadikan dasar patokan dalam penetapan besaran PDDB-P2 ke depannya. Bukan hanya PBB-P2, diharapkan jenis pajak lain juga didata agar capaian realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang diharapkan.

- **hasil retribusi daerah**, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dilihat dari perkembangannya, nilai penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2014 nilainya terus mengalami kenaikan dari 10,24 miliar menjadi 24,15 miliar, namun di tahun 2015 turun drastis, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan status Puskesmas dan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengelolaan keuangannya, dari sisi penerimaan jika sebelumnya dihitung sebagai jenis retribusi

pelayanan kesehatan pada retribusi jasa umum berpindah rekening menjadi pendapatan BLUD pada lain-lain PAD yang sah.

Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target yang telah ditetapkan bisa dikatakan bagus, terutama pada objek jasa umum dan retribusi perizinan tertentu masing-masing 94,9 % dan 105,64% (melampaui target) sedangkan pada jasa usaha nilai capaiannya cukup baik sebesar 77,82%. Meskipun demikian masih terdapat jenis retribusi yang mengalami realisasi rendah yaitu retribusi parkir dan retribusi rumah potong hewan yang realisasinya juga di bawah 50%.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, sumber pendapatan berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyertaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR. Jumlah bagian laba yang diperoleh daerah cukup fluktuatif bervariasi antara 4,77 miliar hingga 5,62 milyar. Selain mengharapkan laba, penyertaan modal yang dilakukan daerah dapat mendorong berkembangnya sektor rill melalui pinjaman produktif masyarakat baik melalui perorangan serta UMKM yang ada di Dharmasraya
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, jenis pendapatan disediakan untuk menganggarakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Perkembangan nilai lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan jenis PAD yang lain cukup dominan dan selalu melebih 3 (tiga) sumber PAD lainnya. Nilainya pun cenderung mengalami kenaikan, dari 8,17 miliar di tahun 2010 naik menjadi 34,11 miliar di tahun 2015.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dilhat dari proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, meskipun nilai dana perimbangan terus meningkat, namun proporsinya cenderung menurun, jika di tahun 2010 sebesar 77,10%, terakhir di tahun 2015 naik menjadi 76,10%. Artinya tingkat ketergantungan Dharmasraya terhadap dana pusat semakin berkurang. Besaran alokasi dana perimbangan mulai tahun 2015 ditetapkan melalui peraturan presiden setelah UU APBN ditetapkan.

- **DBH pajak/bukan pajak**, DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Pendapatan daerah dari DBH mulai tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami penurunan, turunnya penerimaan daerah dari DBH salah satunya dipicu oleh turunnya harga minyak dunia yang menyebabkan menyebabkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) Migas yang akan dibagikan turun cukup signifikan, begitu pula beberapa komponen lain DBH yang mengalami penurunan dalam RAPBNP tahun 2015 adalah DBH PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, DBH pajak pumi dan pangunan, dan DBH migas. Penurunan terbesar terjadi pada DBH migas dari Rp 42 triliun rupiah menjadi Rp 17 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan pada APBN perubahan tahun 2015 Anggaran DBH turun menjadi Rp 112,6 triliun dari sebelumnya Rp 127,7 triliun.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Begitu juga dengan proporsi DAU antara provinsi dengan kab/kota masing-masing 10% dan 90%.

Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.07/2016, Dharmasraya termasuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal sedang yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,81. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU mulai tahun 2016, bahwa kemenkeu tidak lagi menggunakan data penduduk BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil untuk menentukan jumlah penduduk.

Sesuai dengan peningkatan iklim ekonomi nasional maupun realisasi APBN, maka penerimaan DAU yang diterima oleh Dharmasraya dari tahun ke tahun juga terus meningkat, rata-rata meningkat sekitar 15,90% tiap tahunnya, di tahun 2010 nilainya sebesar 266,17 miliar meningkat menjadi 477,8 miliar di tahun 2015. Namun persentase kenaikan di tahun 2015 maupun tahun 2016 kenaikan DAU tidak sebesar tahun sebelumnya karena pemerintah mulai memperbesar alokasi untuk dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6/2014 tentang desa, sehingga proporsi DAU secara keseluruhan juga terpengaruh.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Program/kegiatan pada bidang DAK diusulkan oleh Bappeda melalui aplikasi e-Musrenbang yang dikordinasikan oleh Bappenas dan Bappeda Provinsi yang selanjutnya dibahas secara teknis pada forum Musrenbang provinsi selanjutnya forum Musrenbangnas.

Dilihat dari alokasi DAK yang diterima Dharmasraya selalu meningkat sesuai dengan usulan yang disetujui pusat. Tahun 2010 nilainya masih berada pada angka 37,48 miliar meningkat pesat menjadi 102,8 miliar di tahun 2015.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2010 sampai 2015 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

- **Pendapatan hibah**, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya. Nilainya pendapatan hibah dari tahun 2012 hingga tahun 2014 selalu meningkat, namun di tahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Faktor penyebabnya adalah turunnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan sawit yang mendominasi industri dan perkebunan besar di Dharmasraya.
- **Bagi hasil pajak dari provinsi**, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu : pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok . perkembangan penerimaan bagi hasil dari provinsi selalu meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015, dari 29,6 miliar menjadi 39,47 miliar, atau naik hampir 10 miliar rupiah, hal ini dudorong oleh perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, baik kendaraan baru maupun kendaraan mutasi dari luar daerah.
- **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. alokasi dana penyesuaian tersebut yang telah ada yaitu penyaluran tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, bantuan keuangan

kepada desa/nagari dalam bentuk dana desa. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang beraal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Kebijakan ini secara nasional akan diberlakukan sesuai dengan roadmap dana desa 2015-2019 sesuai dengan kebijakan pusat dalam meningkatkan dana desa secara sigfikan akan berdampak pada peningkatan dana penyesuaian yang akan diterima. Sejalan dengan peningakatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengunaan dana tersebut.

- **Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya**, merupakan dana yang diterima dari pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengalikasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Dilihat dari poerkembangannya maka besaran dana ini cukup fluktuatif, . alokasi terbesar tercatat di tahun 2013 sebesar Rp 6,92 miliar dan kondisi 2015 tercatat sebesar Rp 5,07 miliar.

Selama periode Tahun Anggaran 2010–2015, realisasi pendapatan daerah terhadap target yang ditetapkan terjadi peningkatan, yaitu di tahun 2010 mencapai 94,76, dan di 2011 menjadi 95,72, dan mulai yahun 2012 agka ini cukup tinggi berkisar antara 97 s/d 98%, namun hal ini belum diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal terlihat dari masih rendahnya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah atau masih berada di bawah 10%, yaitu dari 5,91% di tahun 2010 meningkat hingga 7,14% di tahun 2015, namun pada dana perimbangan juga terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 877,10 di tahun 2010, sempat naik menjadi 81,14 di tahun 2013 namun angka ini kembali turun menjadi 76,10 di tahun 2015. Perubahan proporsi ini lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari. proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2010-2015 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah :

Tabel 3.2 proporsi pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan

Kode Rek	Jenis Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.1.	Pendapatan asli daerah	5,91	6,82	7,56	5,53	7,68	7,14
4.2.	Dana perimbangan	77,10	71,81	80,61	81,14	79,12	76,10
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	16,99	21,36	11,83	13,33	13,20	16,77
	Jumlah	100	100	100	100	100	100

Melihat masih kecilnya proporsi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih berada di bawah 10%, meskipun terlihat proporsinya cenderung meniungkat hingga tahun 2015, oleh sebab itu dibutuhkan berbagai strategi dan usaha ke depan agar PAD dapat meningkat secara proporsional melalui :

(1) Intensifikasi pendapatan daerah

Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara intensifikasi ini dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan keuangan melalui pajak daerah. Yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber pendapatan daerah
- b. Melakukan pendataan subjek dan objek pajak
- c. Melaksanakan inventarisasi pemutahiran data objek dan subjek pajak dan retribusi.
- a. Melakukan penegakan Peraturan Daerah (Supremasi Hukum)
- b. Pelaksanaan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan adanya pembayaran tepat waktu
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi PAD.

(2) Extensifikasi, strategi ini dilakukan melalui penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Jumlah belanja daerah yang teralisisasi hingga tahun 2015 nilainya selalu meningkat, dibandingkan dengan tahun 2010 hanya sebesar Rp 453,18 miliar, di tahun 2015 sudah naik menjadi 800,45 miliar dengan tingkat realisasi keuangan berkisar 93 hingga 94 persen dari belanja yang dianggarkan. Dilihat dari struktur belanja daerah, persentase belanja tidak langsung (BTL) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 masih melebihi 50%, atau berada di kisaran 52 hingga 54% dari total belanja yang ding dilakukan. Atau dengan kata lain belanja program kegiatan lebih kecil dari belanja pendukung yang dilaksanakan oleh daerah pemerintah daerah. Tapi di tahun 2015 proporsi belanja langsung melelihi dari belanja tidak langsung, masing-masing terealisasi sebesar 406,99 miliar untuk belanja langsung dan 393 untuk BTL. adanya kecenderungan meningkatnya belanja langsung dibandingkan dengan BTL memberikan semakin baiknya kinerja daerah dalam pengalokasian anggaran sehingga ini mengindikasikan APBD semakin efektif atau mampu dalam mencapai tujuan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang dilakukan mulai tahun 2015 adalah pelaksanaan anggaran berbasis akrual.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015

Kode Rek.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
5.	BELANJA DAERAH	453.188.540.605	478.352.253.109	544.859.577.070	581.131.015.967	681.316.609.306	800.456.674.229	15,33
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	247.210.332.939	264.949.605.042	293.612.592.158	303.015.014.882	360.849.544.710	393.459.759.449	11,83
5.1.1.	Belanja pegawai	211.747.733.756	221.719.545.209	253.510.960.388	273.158.637.933	301.815.811.433	330.596.248.085	11,23
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	2.097.503.462	703.743.183	-	-	
5.1.4.	Belanja hibah	19.509.940.000	22.064.665.900	20.948.211.000	4.128.945.126	28.121.032.781	13.899.139.000	(5,75)
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	2.815.433.183	3.521.459.808	420.000.000	3.764.305.000	1.559.300.000	-	(11,15)
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	12.863.226.000	17.196.152.000	16.516.963.308	20.644.815.000	29.345.949.496	48.415.994.946	55,28
5.1.8.	Belanja tidak terduga	274.000.000	447.782.125	118.954.000	614.568.640	7.451.000	548.377.418	20,03
5.2.	BELANJA LANGSUNG	205.978.207.666	213.402.648.067	251.246.984.912	278.116.001.085	320.467.064.596	406.996.914.780	19,52
5.2.1.	Belanja pegawai	22.655.637.850	25.249.272.866	27.427.063.416	31.360.230.631	27.101.036.900	2.537.167.000	(17,76)
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	71.126.957.561	75.183.862.443	78.317.826.078	89.631.458.145	109.747.275.954	139.913.157.469	19,34
5.2.3.	Belanja modal	112.195.612.255	112.969.512.758	145.502.095.418	157.124.312.309	183.618.751.742	264.546.590.311	27,16

Sumber : LKPD Kabupaten Dharmasraya, berbagai edisi

Tabel 3.4. Persentase proporsi belanja daerah berdasarkan jenis belanja

Kode Rek	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
5.	BELANJA DAERAH	100	100	100	100	100	100
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54,55	55,39	53,89	52,14	52,96	49,15
5.1.1.	Belanja pegawai	46,72	46,35	46,53	47,00	44,30	41,30
5.1.2.	Belanja bunga	-	-	0,38	0,12	-	-
5.1.4.	Belanja hibah	4,31	4,61	3,84	0,71	4,13	1,74
5.1.5.	Belanja bantuan sosial	0,62	0,74	0,08	0,65	0,23	-
5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik	2,84	3,59	3,03	3,55	4,31	6,05
5.1.8.	Belanja tidak terduga	0,06	0,09	0,02	0,11	0,00	0,07
5.2.	BELANJA LANGSUNG	45,45	44,61	46,11	47,86	47,04	50,85
5.2.1.	Belanja pegawai	5,00	5,28	5,03	5,40	3,98	0,32
5.2.2.	Belanja barang dan jasa	15,69	15,72	14,37	15,42	16,11	17,48
5.2.3.	Belanja modal	24,76	23,62	26,70	27,04	26,95	33,05

c. Pembiayaan daerah dan Silpa tahun berjalan

- **Pembiayaan daerah**, Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dikelola oleh daerah dari tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung menurun. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman sebesar 22,15 miliar rupiah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan tahun 2011, namun di sisi lain di tahun yang sama terdapatnya nilai silpa yang cukup besar yaitu Rp 71,74 miliar rupiah, sehingga dengan adanya silpa yang besar tersebut terlihat adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya di tahun 2012 dan tahun 2013 daerah melakukan pembayaran pokok hutang sebesar 11,075 miliar rupiah per tahun.
- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Berkenaan**, meskipun di tahun 2011 tercatat Silpa sebesar 71,74 miliar rupiah, namun secara umum nilai Silpa dari tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan penurunan, dengan adanya penurunan nilai Silpa ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas belanja daerah.

**Tabel 3.5.
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PEMBIAYAAN DAERAH	42.610.246.896	44.421.303.329	57.325.034.679	14.486.777.418	28.493.218.148	34.455.925.341
Penerimaan Pembiayaan Daerah	42.610.246.896	44.421.303.329	71.736.034.683	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	42.610.246.896	22.271.303.329	71.736.034.683	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	22.150.000.000		-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	14.411.000.004	16.474.999.996	-	-
Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	-	-	3.336.000.000	5.400.000.000	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	11.075.000.004	11.074.999.996	-	-
Silpa Tahun Berkenaan	21.910.155.643	71.740.201.183	30.961.777.414	28.493.218.148	34.455.925.341	28.425.226.159

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Ketiga unsur dari neraca tersebut dapat disajikan dalam suatu persamaan seperti dibawah :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{ekuitas}$$

Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah baik berupa pendapatan ataupun dalam bentuk penghematan belanja. Sedangkan kewajiban/hutang merupakan yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. kewajiban adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki. Unsur ketiga dari neraca yaitu ekuitas, ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah, dengan kata lain ekuitas meruoakan nilai selisih antara aset dengan kewajiban.

Berikut dapat ditampilkan perkembangan aset, kewajiban dan ekutas daerah yang tercantum dalam neraca aset daerah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Neraca Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d Tahun 2015 (juta rupiah)

Kode Rek.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata petumbuhan(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASET	861.513.153.505	1.023.868.708.780	1.133.474.055.787	1.323.627.965.536	1.463.957.910.212	1.867.848.423.389	23,36
1.1	ASET LANCAR	29.392.234.234	77.981.168.926	38.428.383.711	44.455.930.649	72.425.857.365	85.282.734.140	38,03
1.1.1	Kas	21.966.918.332	71.817.797.203	31.054.692.502	29.191.250.057	35.483.827.861	28.600.793.386	6,04
1.1.3	Piutang	-	1.583.252.317	1.183.630.304	3.367.520.609	17.790.566.707	23.174.765.758	340,94
1.1.4	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-	8.872.125.390	
1.1.5	Persediaan	7.425.315.902	4.465.119.406	6.077.560.908	11.767.076.650	19.042.595.345	24.635.049.605	46,35
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	11.000.000.000	12.500.000.000	15.836.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	18,61
1.2.2	Investasi Permanen	11.000.000.000	12.500.000.000	15.836.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	21.236.000.000	18,61
1.3	ASET TETAP	821.120.919.271	933.183.219.854	1.070.881.341.357	1.203.312.859.967	1.353.065.031.062	1.740.092.188.043	22,38
1.3.1	Tanah	95.657.991.000	98.836.794.010	99.575.994.010	107.456.894.477	104.167.863.528	605.374.946.762	106,57
1.3.2	Peralatan dan Mesin	103.502.067.496	122.590.111.040	131.768.879.029	155.855.770.473	152.795.095.773	57.212.301.138	(8,94)
1.3.3	Gedung dan Bangunan	188.167.407.483	205.631.739.033	225.848.808.074	288.912.420.630	418.808.695.579	438.897.394.752	26,65
1.3.4	Jalan, Jaringan dan instalasi	358.336.702.104	389.012.646.238	510.327.234.131	522.068.098.026	615.429.279.334	544.860.267.012	10,41
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	4.237.092.706	9.713.118.606	10.305.312.276	10.894.669.716	8.092.950.997	14.946.795.569	50,55
1.3.6	Konstruksi Dalam Penggerjaan	71.219.658.482	107.398.810.927	93.055.113.837	118.125.006.645	53.771.145.851	78.800.482.810	2,13
1.5	ASET LAINNYA	-	204.320.000	8.328.330.719	54.623.174.920	17.231.021.785	21.237.501.206	2.573,56
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	287.907.729	#D/I/O!
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	-	204.320.000	204.320.000	204.320.000	663.645.000	1.928.470.576	210,96
1.5.5	Aset Lain-lain	-	-	8.124.010.719	54.418.854.920	16.567.376.785	19.021.122.901	44,71
2	KEWAJIBAN	45.059.776	32.689.073.358	22.131.773.073	13.561.168.032	22.156.020.315	40.997.130.881	18.176,78
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.059.776	20.884.969.191	22.131.773.073	13.561.168.032	15.067.857.858	29.051.701.688	12.874,74
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	45.059.776	32.918.747	2.538.617.378	5.860.118.458	15.022.872.004	7.301.405.683	3.220,76
2.1.2	Utang Bunga	-	2.083.330.556	729.104.167	-	-	-	
2.1.3	Utang Pajak	-	-	-	-	29.799.554	-	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	18.768.719.888	18.864.051.528	7.693.719.888	-	-	

Kode Rek.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata petumbuhan(%)
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	19.462.232	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	7.329.686	15.186.300	2.827.311.745	
2.1.xx	utang belanja						18.903.522.028	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	11.804.104.167	-	-	7.088.162.457	11.945.429.193	0,24
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	11.804.104.167	-	-	7.088.162.457	11.945.429.193	0,24
3	EKUITAS DANA	861.468.093.729	991.179.635.422	1.111.342.282.714	1.310.066.797.504	1.441.801.889.897	1.826.851.292.508	22,41
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	861.513.153.505	1.023.868.708.780	1.133.474.055.787	1.323.627.965.536	1.463.957.910.212	1.867.848.423.389	23,36

Dari tabel di atas, dapat dilihat, perkembangan aset pemerintah Kabupaten Dharmasraya meningkat, hal ini terlihat dari peningkatan nilai aset dari 861 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 1.86 trilyun rupiah di tahun 2015, atau nilainya meningkat rata-rata sebesar 23,36% per tahunnya. Bagian aset terbesar adalah ada pada aset tetap, baik dalam bentuk tanah, bangunan, Jalan, Jaringan dan instalasi maupun bentuk aset tetap penunjang operasional kegiatan pemerintah seperti peralatan dan mesin. Sebagian dari aset ini merupakan hibah dari kabupaten induk, maupun bentuk hibah dari pemerintah pusat, provinsi maupun pihak ketiga, sedangkan sumber peningkatan nilai aset ini juga berasal dari belanja yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Dharmasraya sendiri dalam bentuk belanja, khususnya belanja modal serta belanja lainnya yang mempengaruhi nilai aset. dalam hal pengelolaan aset, dengan berbagai upaya dalam optimalisasi pendataan dan pengaanan nilai aset juga memberikan pengaruh dalam nilai aset yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui konsolidasi dengan pengelola aset yang berada di perangkat daerah. Sehingga pada beberapa kasus, teridentifikasi aset berdasarkan kondisinya diantaranya aset yang dalam kondisi rusak atau tidak dimanfaatkan lagi dan selanjutnya aset ini berubah dari aset tetap menjadi aset lainnya.

Sedangkan pada investasi jangka panjang, merupakan nilai aset yang dimiliki dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang berbentuk badan usaha, seperti bank nagari dan BPR yang ada di Dharmasraya. Sedangkan aset lancar merupakan aset yang memiliki liabilitas kurang dari 12 bulan atau dalam bentuk kas atau setara kas.

Pada kewajiban/hutang, juga terjadi peningkatan nilai, di tahun 2010 nilainya hanya sebesar 45 juta rupiah naik di tahun 2011 menjadi 32,68 miliar rupiah, di tahun 2015 nilainya sudah mencapai 29,05 miliar, meskipun nilainya setiap tahun tidak tetap atau mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh jenis kewajiban pada masing-masing rincian pengeluaran yang harus dibayar pada kewajiban jangka panjang dan jangka pendek dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Selanjutnya pada ekuitas, nilai ekuitas berasal dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, sejalan dengan peningkatan nilai aset yang melebihi pertambahan kewajiban mengakibatkan kenaikan pada nilai ekuitas. Perkembangan nilai ekuitas dari tahun 2010 ke tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sekitar 22,41.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2010 sampai tahun 2015 secara umum terlihat pada pelaksanaan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik didorong oleh adanya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun kebijakan yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah. Maupun pengelolaan pembiayaan daerah. Penganggaran yang baik, akan menghasilkan tekstur keuangan yang ideal dan optimal untuk dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang ada di lapangan guna pencapaian target pembangunan. oleh sebab itu azas pokok yang perlu dicapai dalam penganggaran ini adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin efisien penganggaran daerah maka akan semakin efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 s/d 2015 sebagaimana tergambar dari pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka PAD memiliki sumber utama yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain pajak dan retribusi daerah juga terdapat lain-lain PAD yang sah. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah juga telah didukung oleh regulasi daerah dalam bentuk pertauran daerah diantaranya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah serta beberapa peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang retibusi daerah. Selain didasari oleh peraturan yang ada, juga telah dilakukan berbagai upaya dan strategi lainnya seperti peningkatan kemampuan SDM pengelola pendapatan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat/APBN. Meskipun perkembangan dana perimbangan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun hal ini tidak sepenuhnya ditentukan kebijakan pusat dalam pengalokasianya ke daerah, tapi juga ditentukan oleh upaya daerah dalam berbagai bentuk, dalam rangka optimalisasi penerimaan dana pusat juga membutuhkan berbagai upaya agar dana ini selalu dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya adalah :

- Optimalisasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi mengenai berbagai data teknis dan potensi wilayah yang ada serta kebutuhan informasi lainnya ke pemerintah pusat, serta pemberlakuan reward and punishment terhadap penggunaan DBH tahun sebelumnya
- Untuk besaran dana Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah ditentukan oleh pusat berdasarkan perkembangan APBN sesuai dengan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, capaian nilai IPM dan indikator lain yang ditentukan untuk setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah akan menerima jumlah dan ayang berbeda sesuai dengan perkembangan indikator-indikator tersebut
- Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK), besaran dana DAK ini ditentukan oleh penyedian data teknis serta usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Dimana setiap tahunnya kriteria ini mengalami perubahan sesuai dengan prioritas pembangunan tahunan nasional. Penyampaian usulan dan data teknis ini dilakukan melalui Musrenbang provinsi dan nasional serta aplikasi e-musrenbang yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten, Bappeda Provinsi dan Bappenas melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga disini selain Bappeda, peran aktif perangkat daerah terkait juga sangat menentukan besaran alokasi dana yang akan diterima.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Selama periode 2010 hingga 2015, jenis pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan hibah yang diterima daerah berasal dari hibah yang diterima pihak perusahaan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dimana perusahaan besar tersebut sebagian besar bergerak pada perkebunan sawit, CPO dan pengolahan karet, berdasarkan realisasi tahun 2010 hingga tahun 2015, pendapatan hibah terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,45 miliar rupiah. Besarnya pendapatan hibah ini dipengaruhi oleh komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan pendapatan hibah ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang ada

Selain hibah, bagi hasil pajak yang berasal dari provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan. Seiring dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, maka hal ini juga berdampak pada penambahan kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, hal ini juga memberikan pengaruh pada penerimaan daerah dalam bagi hasil pajak yang diterima dari tahun ke tahun baik dari kendaraan baru maupun kendaraan yang dibebaskan nama-nama.

3.2.2. Kebijakan belanja daerah

Dilihat dari strukturnya, belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja, besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya :

- Mengutamakan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perangkat daerah serta belanja bagi hasil ke pemerintah nagari
-

Tabel 3.7. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (RP)	Persentase
2010	234.403.371.606	453.188.540.605	51,72
2011	246.968.818.075	478.352.253.109	51,63
2012	280.938.023.804	559.270.577.074	50,23
2013	304.518.868.564	597.606.015.963	50,96
2014	328.916.848.333	681.316.609.306	48,28
2015	333.133.415.085	800.456.674.229	41,62

Berdasarkan tabel di atas, meskipun terjadi peningkatan dalam belanja aparatur, namun persentasenya relatif menurun, hal ini disebabkan oleh perubahan belanja belanja daerah melebihi perubahan belanja aparatur

- Pelaksanaan belanja berbasis kinerja (performance based), meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja/ pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, terutama pada RPJMD periode tahun 2010-2015.
- Pemenuhan alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pemenuhan alokasi 20 % untuk pendidikan, 10% untuk pendidikan serta pendampingan dana DAK yang diterima daerah setiap tahunnya sebesar 10% dari total DAK yang diterima.
- Mulai tahun 2014 dan tahun 2015, maka salah satu kewajiban daerah sudah diarahkan untuk pencapaian alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan (tidak termasuk dana DAK), dimana alokasi dana desa ini disalurkan ke nagari melalui bantuan keuangan kepada pemerintah nagari.

3.2.3. Kebijakan pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode tahun 2010 sampai tahun 2015 penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA Tahun sebelumnya, kecuali di tahun 2011 penerimaan melakukan pinjaman daerah sebesar 22,15 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2012 dan tahun 2013, dengan adanya pinjaman daerah di tahun 2011 tersebut, maka pembayaran dilakukan secara berturut-turut sebesar 11,075 miliar.

3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAN (2016 S/D 2021)

Berdasarkan kajian pengelolaan keuangan masa lalu (2012 s/d 2015) baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun terkait dengan kebijakan provinsi dan nasional, maka proyeksi kerangka pendanaan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Proyeksi kerangka pendanaan (APBD)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Kode Rek.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	919.929	1.020.279	1.146.826	1.302.538	1.495.398	1.735.656
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.773	69.460	70.155	70.857	71.565	72.281
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	19.260	19.452	19.647	19.843	20.042	20.242
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	6.027	6.088	6.148	6.210	6.272	6.335
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.144	5.196	5.248	5.300	5.353	5.407
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38.342	38.725	39.112	39.503	39.898	40.297
4.2.	DANA PERIMBANGAN	772.554	866.753	983.723	1.128.151	1.307.678	1.532.148
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi	22.609	22.836	23.064	23.295	23.528	23.763

Kode Rek.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Hasil Bukan Pajak						
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	507.913	533.309	559.974	587.973	617.372	648.240
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	242.032	310.608	400.685	516.883	666.779	860.145
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.602	84.066	92.948	103.531	116.155	131.227
4.3.1.	Pendapatan Hibah	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.244	39.637	40.033	40.434	40.838	41.246
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357	42.429	50.915	61.097	73.317	87.980
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	942.638	1.020.279	1.146.826	1.302.538	1.495.398	1.735.656
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.961	523.520	546.786	571.213	596.859	623.786
5.1.1.	Belanja Pegawai	391.447	411.019	431.570	453.149	475.806	499.596
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	6.715	-	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota , Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	77.099	111.001	113.715	116.564	119.553	122.690
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.	BELANJA LANGSUNG	466.677	496.759	600.040	731.326	898.539	1.111.869
5.2.1.	Belanja Pegawai	973	992	992	992	992	992
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	186.294	232.867	291.084	363.855	454.819	568.524
5.2.3.	Belanja Modal	279.410	262.899	307.963	366.478	442.727	542.353
	SURPLUS/ DEFISIT	(22.709)	-	-	-	-	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.709	-	-	-	-	-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.709	-	-	-	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.709	-	-	-	-	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Kode Rek.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000	-	-	-	-	-
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	4.000	-	-	-	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkelaan	0	-	-	-	-	-

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis terkait dengan permasalahan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari Isu global, nasional dan regional akan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Isu-isu strategis ditelaah dari permasalahan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini yang akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dan akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kemajuan suatu daerah amat ditentukan oleh seberapa besar kecakapan, keahlian, dan sikap budaya orang-orang yang ada di daerah itu menuju produktivitas kerja, inovasi dan berbudi luhur serta berakhlaq mulia dalam kehidupan sesama. Interaksi sosial dengan sikap baik, toleransi akan menciptakan keharmonisan masyarakat, dan dengan itulah kemajuan daerah akan tercapai dengan baik.

Kehidupan global yang membuat interaksi antar warga, daerah dan pemerintahan kawasan, regional akan semakin intensif dimasa mendatang. Sementara itu daerah memiliki potensi Sumberdaya alam yang memiliki tinggi menjadikan daerah ini menarik untuk didatangi dan berinvestasi. Seiring dengan itu kehidupan masyarakat yang semakin kompetitif memerlukan keunggulan dalam persaingan dan tantangan. Termasuk juga kebutuhan akan kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian air, kemandirian layanan publik (*basic need*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi mengharuskan generasi mendatang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap budaya yang mantap untuk beradaptasi dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat global yang kompetitif. Effek dari kondisi itu memungkinkan sekelompok orang unggul sementara yang lain terdegradasi pada kemiskinan dan kebodohan. Maka disinilah peran pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan pelayanan bagi warga masyarakat dan menyediakan prasyarat minimal untuk mereka hidup dikemudian hari.

Menciptakan pelayanan publik yang bermutu memerlukan SDM aparatur yang berkualitas, dan sistem pelayanan yang modern dan profesional, dalam hal ini diperlukan tenaga-tenagan fungsional yang berperan langsung

dalam pelayanan publik. Peningkatan pelayan publik dan infrastruktur membuat alokasi anggaran proporsinya harus lebih banyak untuk program langsung pada kedua aspek tersebut yakni biaya langsung bagi kehidupan rakyat dalam bentuk penyediaan barang publik dan layanan administrasi publik. Meningkatnya anggaran untuk pelayanan publik akan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga sehingga inilah yang dikatakan sebagai kemandirian daerah untuk kepastian layanan dan kualitas pelayanan publik dan pembangunan belanja modal dalam bentuk infrastruktur daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan sumber-sumber kemajuan daerah maka inovasi daerah dan riset-riset terapan dan adopsi teknologi menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan surplus produksi dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam melakukan transformasi pertanian dan menghidupkan industri-industri yang berbasis pada sumberdaya (bahan baku) lokal.

Pembanguna lintas daerah dengan sinergi dengan daerah-daerah Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan menghubungkan jalur transportasi darat kereta api antara pantai barat dan Timur Sumatera juga harus didorong dan distimulasi untuk terciptanya daerah pertumbuhan Sumatera Barat bagian Tenggara sebagai kontribusi dalam menghubungkan kawasan ekonomi Sumatera Tengah yang terhubung dengan kawasan dan masyarakat ASEAN jalur kereta Api ke Singapura dan Malaysia, dan mendorong pembangunan jalur bawah tanah melewati bukit barisan ke Kota Padang dari Kota Solok.

Terdapat 3 pokok permasalahan daerah (1) Optimalisasi Sumberdaya daya baik manusia maupun alam secara berkelanjutan. (2) Keterbatasan infrastruktur daerah, (3) Miniatur Indonesia dengan keragaman budaya.

Optimalisasi Sumberdaya manusia dan alam, Manusia atau penduduk merupakan modal utama yang aktif dalam proses pembangunan sehingga kepintaran dan inovasi yang dihasilkan merupakan kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah. Rendahnya kualitas SDM, rendahnya daya cipta dan inovasi daerah menyebabkan sumber-sumber kemajuan menjadi rendah dan inilah yang mendorong terjadinya kelemahan, rendahnya kewibawaan daerah. Sumberdaya alam yang kaya namun jika tidak diperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem lingkungan akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan dikemudian hari. Maka pola pengelolaan sumberdaya alam jangan sampai memberikan mudorat yang lebih banyak dikemudian hari bagi generasi mendatang.

Keterbatasan infrastruktur daerah, Daerah memerlukan prasarana dan sarana untuk memastikan kehidupan sosial, alam dan lingkungan terjaga dengan baik. Sanitasi lingkungan, energi, sumberdaya air, transportasi dan sarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olahraga menjadi penting dipecahkan dalam 5 tahun ke-depan.

Keberagaman budaya dan pembangunan multikultural, Berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi spirit eksistensi kebangsaan yang dianut oleh

kehidupan negara. Krisis kepribadian bangsa pelemahan sendi-sendi dasar kehidupan sosial dan ekonomi menjadi hal yang patut diperhitungkan. Kesenjangan antar wilayah, antar suku, kemiskinan, dan penyeragaman menjadi mengikis dasar budaya bangsa yang bersumber dari budaya daerah. Adaptasi, akulturasi budaya dan toleransi menjadi nilai bersama bahwa masing-masing budaya memiliki martabat yang tinggi dan perlu juga menghargai budaya asli yang menjadi nilai historis menjadi nilai dasar untuk dijadikan patokan untuk mengembangkan budaya daerah dimasa mendatang. Budaya lokal dengan sumber dari budaya asli masing-masing orang dan komunitas tentu harus tetap dijaga sebagai upaya untuk menjadi inspirasi kehidupan sosial dimasa datang. Sehingga terlahir keharmonisan, gotong royong, solidaritas dan kebersamaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bersama.

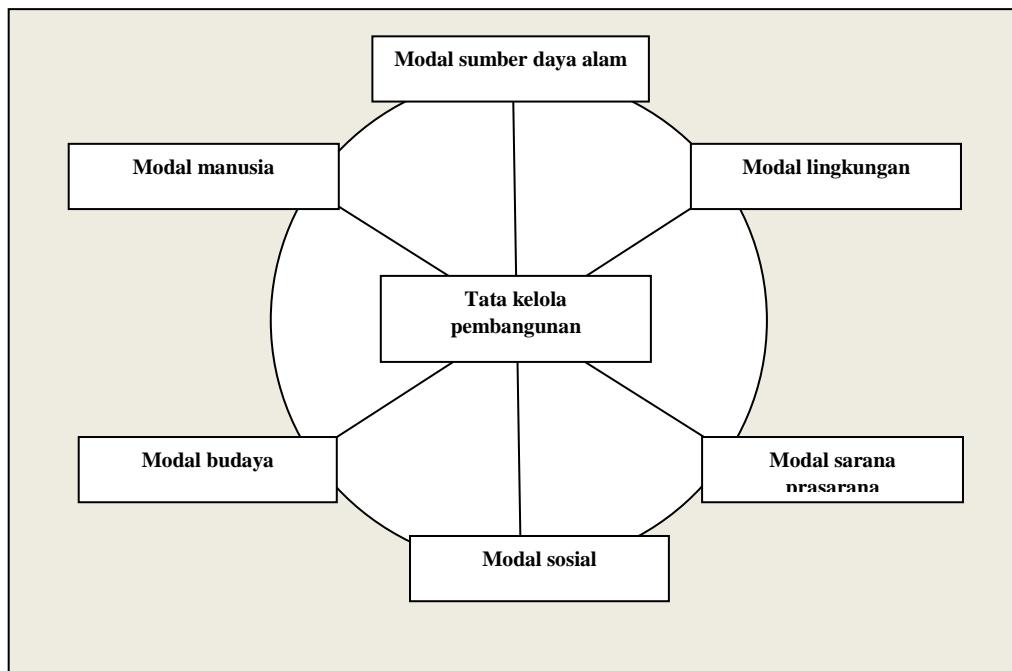
Dalam kondisi daerah kalau dilihat pada beberapa aspek pembangunan memerlukan percepatan pembangunan tetapi memiliki kekayaan sumberdaya alam maka permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam kerangka pengelolaan sumberdaya daerah untuk dapat secara sinergis memacu pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan dalam pendekatan ini merupakan upaya pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan berbagai modal daerah melalui perantaraan berbagai institusi yang bisa mengambil peran dalam pembangunan(*assets-based development*). Berbagai modal daerah tersebut yaitu: modal manusia, modal sosial, modal budaya, modal sumber daya alam, modal lingkungan, dan modal sarana prasarana wilayah.

- a. **Modal manusia** dalam pembangunan yaitu penduduk dan kualitas kehidupannya. Untuk mengembangkan modal manusia dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Tersedianya lapangan kerja yang layak dapat dilihat sebagai dasar pembentukan dan pengembangan modal manusia.
- b. **Modal alam** berupa kekayaan sumberdaya alam seperti mineral, keragaman hayati, tanah yang subur dan luas, dan ketersediaan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan daerah. Modal alam untuk dapat menjamin keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, modal alam untuk memberi manfaat yang besar bagi penduduk dan daerah harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.
- c. **Modal sosial** berupa berbagai organisasi yang berkembang di masyarakat seperti organisasi budaya (kelembagaan adat dan keagamaan) atau organisasi yang bersifat fungsional (seperti kelompok tani, koperasi), dan organisasi sosial lainnya (seperti karang taruna, berbagai perkumpulan olahraga dan sosial). Organisasi ini merupakan aset untuk menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kegiatan ekonomi berbasis sosial.

- d. **Modal budaya** yang bersifat intangible berupa nilai budaya yang menjadi norma kehidupan bersamaan bersifat tangibel berupa peninggalan sejarah fisik dan tradisi budaya. Keberlanjutan budaya, manifestasi fisiknya dan adaptasinya sesuai perkembangan zaman menjadi dasar nilai dan identitas untuk membangun daerah.
- e. **Modal lingkungan** yaitu berkaitan dengan kualitas lingkungan untuk mendukung kehidupan. Terjaganya kualitas air sungai, kelestarian hutan, dan kualitas lahan akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.
- f. **Modal sarana prasarana wilayah** yaitu berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik pendukung kegiatan ekonomi seperti irigasi, pasar, jalan dan berbagai prasarana dan sarana; prasarana permukiman seperti ketersediaan utilitas seperti air bersih, pembuangan limbah, sampah; dan sarana pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana interaksi sosial menjadi dasar untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang.
- g. Untuk memelihara, memupuk dan mengembangkan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkan **tata kelola pembangunan** yang andal menyangkut berbagai aspek seperti kelengkapan sediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dengan dukungan sistem informasi, keandalan proses dan prosedur perencanaan, dukungan peraturan yang lengkap didukung lembaga pelaksana yang efektif, dan koordinasi pembangunan yang baik. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Gambar 4.1: Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan, dan Pengembangan Modal Daerah (Assets-Based Development)



Permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai: (1) kesenjangan antara kondisi perkembangan yang telah terjadi selama ini dengan kondisi seharusnya, dan (2) kesenjangan antara kondisi yang terjadi selama ini dengan gambaran kondisi dimasa depan. Permasalahan pembangunan dengan demikian bersifat retrospektif dan prospektif. Dalam dimensi retrospektif, masalah pembangunan adalah masalah masa sekarang yang perlu diatasi. Dalam dimensi prospektif masalah pembangunan muncul dari penerawangan (*conjecture*) terhadap berbagai peluang atau kemungkinan kejadian di masa depan yang bisa diraih dan perlu diantisipasi.

Dengan demikian permasalahan pembangunan dapat dilihat sebagai permasalahan yang dihadapi dimasa sekarang serta potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan dimasa depan. Permasalahan masa sekarang adalah berbagai kekurangan yang perlu diatasi. Potensi adalah berbagai sumberdaya yang bisa didayagunakan dengan optimal. Kebutuhan adalah berbagai hal yang perlu dipenuhi sebagai konsekuensi mengatasi masalah atau mengembangkan potensi. Peluang adalah situasi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten yang belum lama berkembang sebagai hasil pemekaran wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dengan latar belakang identitas sejarah dan budaya beragam. Tetapi dalam pembangunannya masih perlu didukung oleh pengembangan sumberdaya alam yang optimal bernilai tambah tinggi, sumberdaya manusia yang berkualitas, sumber daya infrastruktur fisik yang memadai, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan perangkat manajemen dan teknologi informasi yang andal.

Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan indikator pembangunan daerah yang terdapat pada Bab 2 dan kondisi yang ada saat ini antara lain :

1. Relatif rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat □ kaitkan dengan IPM
2. Bidang pendidikan : angka melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi masih rendah. Hal ini dapat dilihat data APK dan APM untuk setiap jenjang pendidikan
3. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah
4. Masih tingginya jumlah kematian bayi
5. Masih terjadinya Kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular
6. Belum adanya rumah sakit yang representatif
7. Belum terkelolanya khasanah budaya Dharmasraya
8. Masih terdapatnya balita gizi buruk. Tahun 2015 jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 14 orang.
9. Tidak adanya pembinaan atlit usia dini
10. Distribusi tenaga pengajar tidak merata
11. Masih rendahnya proporsi jalan kondisi mantap
12. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah
13. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
14. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
15. Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan
16. Belum tuntasnya tapal batas
17. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran dan kematian
18. Masih terdapatnya kasus KDRT
19. Masih rendahnya penyelesaian kasus perempuan dan anak
20. Masih rendahnya kesadaran PUS menjadi akseptor KB
21. Belum tuntasnya penanganan PMKS oleh pemerintah
22. Masih terjadinya alih fungsi lahan
23. Belum tertatanya fungsi pasar secara optimal
24. Masih rendahnya proporsi PAD dalam pendapatan daerah
25. Belum berkembangnya sektor pariwisata

Permasalahan, potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam kerangka isu pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal daerah yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan penduduk dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga sejahtera sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal manusia.
- b. Pengembangan pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan dengan optimal serta bernilai tambah besar di Kabupaten Dharmasraya sebagai wujud pengembangan modal alam.

- c. Pemberdayaan nagari dan kelompok masyarakat sebagai usaha pemupukan dan pengembangan modal sosial dan modal ekonomi.
- d. Reorientasiperan adat dalam perkembangan sosial ekonomimerupakan isu dalam modal budaya sertapelestarianpeninggalan budayabekas Kerajaan Dharmasraya.
- e. Terjaganya kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian Sub DAS Batanghari hulu dan tengah dengan pengendalian kualitas air sungai, pelestarian hutan, atau pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik lahansebagaiwujud pemeliharaan modal lingkungan.
- f. Ketersediaan berbagai prasarana (sanitasi lingkungan, prasarana sumberdaya air, energi, telekomunikasi dan transportasi) serta sarana pelayanan (pendidikan, kesehatan, perdagangan, rekreasi dan olah raga) merupakan bentuk dari pengembanganmodal sarana prasarana wilayah.
- g. Untuk mendukung pengembangan berbagai modal daerah tersebut dibutuhkanpeningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung oleh sistem informasi pengelolaan pembangunan sebagai upaya dalam peningkatan tata kelola pembangunan yang andal.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan isu pembangunan yang telah dirumuskan pada sub bab 4.1 maka perumusan isu trategis dilakukan dengan mempertajam pernyataan kondisi permasalahan yang ada saat ini sehingga diperoleh fokus isu yang benar-benar ter dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini dan 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut meliputi :

1. Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil bagi seluruh penduduk menjadi dasar pembangunan yang penting bagi daerah. Produksi bahan pangan daerah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangankarbohidrat maupun protein. Intensifikasi dan ekstensifikasi padi sawah perlu terus dilakukan dengan dukungan pembangunan dan peningkatan irigasi. Selain itu program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan juga menjadi bagian diversifikasi ekonomi petani.

2. Peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi kerakyatan

Pasar-pasar tradisional sebagai tempat perdagangan yang terdapat di kawasan perkotaan maupun pedesaan yang masih banyak dalam kondisi kurang memenuhi standar fisik perlu ditingkatkan secara fisik dengan melakukan rehabilitasi pasar. Pasar khusus agribisnis hasil perkebunan, perternakan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek rantai distribusinya dan dicari upaya pembelian bersama dalam partai besar sehingga harga yang diterima pedagang bisa lebih murah.

3. Pemerataan Infrastruktur daerah

Kabupaten Dharmasraya masih memiliki daerah pinggiran yang relatif tertinggal dan sarana kesehatan dan pendidikan yang kurang terjangkau. Oleh karena itu program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor kalau pembangunan dilakukan tidak terkendali. Oleh karena peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5. Pengembangan identitas daerah

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang ada dan menjadikannya sebagai identitas daerah yang membanggakan bagi generasi sekarang dan akan datang.

6. Peningkatan kualitas SDM

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu program di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan perlu dipacu peningkatannya.

7. Pembangunan berbasis nagari

Nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan barbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berupa profil nagari berbasis teknologi informasi yang selalu *up to date* dan terpercaya. Institusi

pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.

8. Transparansi dan Informasi pembangunan

Pembangunan perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisienkan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan. Oleh karena program pelayanan satu pintu perlu dioptimalkan, demikian juga transparansi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi perlu dibangun dengan membuat unit pengumpulan dan pengoahan data tersendiri agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).

9. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan menjadi penting untuk Kabupaten Dharmasraya yang terdapat pada wilayah terluar Provinsi Sumatera Barat dengan jarak pencapaian menuju Kota Padang memakan waktu lebih kurang 5 jam. Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan (public safety center) sepanjang jalan lintas Sumatera. Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi juga preventif perlu dilakukan oleh berbagai instansi bukan hanya Dinas Kesehatan tetapi melibatkan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk menyediakan sanitasi lingkungan dan instansi lain yang terkait dengan pemberdayaan dan penyehatan masyarakat. Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya preventif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.

Tabel 4.1. Persandingan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi Sumatera Barat

Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya	Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi
Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan petani perlu menjadi fokus pembangunan. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil; program peningkatan jumlah ternak perlu dilakukan selain untuk mendukung ketahanan pangan	Pemanfaatan potensi untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan tercantum dalam prioritas nasional dan isu strategis provinsi perlu terus dioptimalkan.
Peningkatan kegiatan perdagangan dengan rehabilitasi pasar; peningkatan jaringan distribusi pemasaran perlu dipikirkan untuk diperpendek. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan membangun sektor pertanian perkebunan, hortikultura, perternakan dan perikanan dan industri	Isu strategis provinsi Sumbar yaitu bagaimana menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah dari agribisnis agroindustri serta Usaha mikro kecil sebagai penggerak perekonomian masih memerlukan perhatian antara lain promosi usaha, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, jaringan bisnis.
Pemerataan infrastruktur daerah program pemerataan penyediaan infrastruktur dan sarana perlu diprioritaskan pada daerah yang masih tertinggal dalam hal transportasi, sanitasi dan air bersih.	Perlu ditingkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dengan mempertimbangkan pengembangan wilayah dan integrasi moda. Pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu termasuk air minum dan sanitasi untuk mencapai target universal Access secara nasional (100 % Akses air minum, dan sanitasi). Demikian juga penanganan kawasan kumuh sesuai target nasional 0 % kawasan kumuh pada Tahun 2019.
Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian DAS Batang Hari rentan terhadap pencemaran sungai serta ancaman bencana alam banjir dan longsor. Peran pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan dengan lebih ketat dengan memperkuat fungsi peran instansi perijinan dan pengawasan pemanfaatan ruang	Salahsatu isu strategis pembangunan daerah Sumbar adalah kerawanan terhadap bencana. Dalam RPJM Provinsi terdapat rumusan isu pembangunan untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Pengembangan identitas daerah Kabupaten Dharmasraya yang memiliki latar belakang sejarah yang penting di Nusantara perlu untuk terus melakukan investarisasi, pelestarian, dan mengelola khasanah warisan budaya yang kaya tersebut.	Dalam RPJM Nasional ditekankan isu pembentukan karakter nasional. Pembangunan identitas adalah salahsatu cara untuk membangun karakter.
Peningkatan kualitas SDM. Kualitas sumberdaya manusia tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia. Dari posisi IPM Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat masih rendah maka sangat diperlukan kebijakan yang progresif untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk mengisi dan membuka lapangan kerja.	Dalam RPJM Nasional salah satu isu penting adalah bagaimana pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Isu pembangunan RPJM Provinsi adalah perlu

Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya	Keterkaitan dengan Isu Strategis Nasional dan Provinsi
	terus ditingkatkannya pemerataan dan kualitas pendidikan masih sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang belum mendapat pelayanan pendidikan dan tercapai wajib belajar 9 tahun dan rintisan belajar 12 tahun. Isu lainnya, kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan.
Pembangunan berbasis nagari karena nagari merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Nagari perlu dipersiapkan dengan basis perencanaan yang kuat serta membangun institusi sosial ekonomi untuk menggerakkan berbagai potensi dan peluang ekonomi. Basis perencanaan nagari tersebut berbasis teknologi informasi yang selalu up to date dan terpercaya. Membangun institusi pembangunan sosial ekonomi nagari salah satunya dengan membangun badan usaha milik nagari.	Selaras dengan isu pelaksanaan pembangunan nasional dan provinsi yang belum merata dan seimbang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis nagari akan mempercepat pembangunan dari bawah dan pinggiran seperti diamanatkan dalam RPJM Nasional
Transparansi dan Informasi pembangunan. Kabupaten Dharmasraya perlu terus meningkatkan tata kelola pembangunan dengan mengefisiensikan prosedur birokrasi dan membangun sistem informasi pembangunan yang mampu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai data pembangunan Sistem informasi daerah harus mampu membangun keterpaduan informasi antar perangkat daerah dan antar tingkatan daerah (nagari, kecamatan, kabupaten).	Membangun tatakelola dan reformasi birokrasi menjadi isu pembangunan nasional. Dalam RPJM provinsi Sumbar terdapat rumusan isu: Kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik
Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Dharmasraya perlu dibangun selain untuk melayani penduduk sekitar juga berperan melayani kecelakaan sepanjang jalan lintas Sumatera (<i>public safety center</i>); Pelayanan di tingkat kecamatan lingkungan dan keluarga yang bersifat tidak hanya kuratif tetapi juga prefentif Sarana puskesmas, posyandu, polindes berikut tenaga medis dan paramedisnya perlu ditingkatkan ketersediaannya. Upaya prefentif seperti sosialisasi kesehatan dan KB perlu juga diintensifkan.	Bagian dari isu nasional menjadikan manusia Indonesia unggul melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Dalam isu strategis provinsi terdapat isu perlunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016- 2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:

Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

5.2 MISI

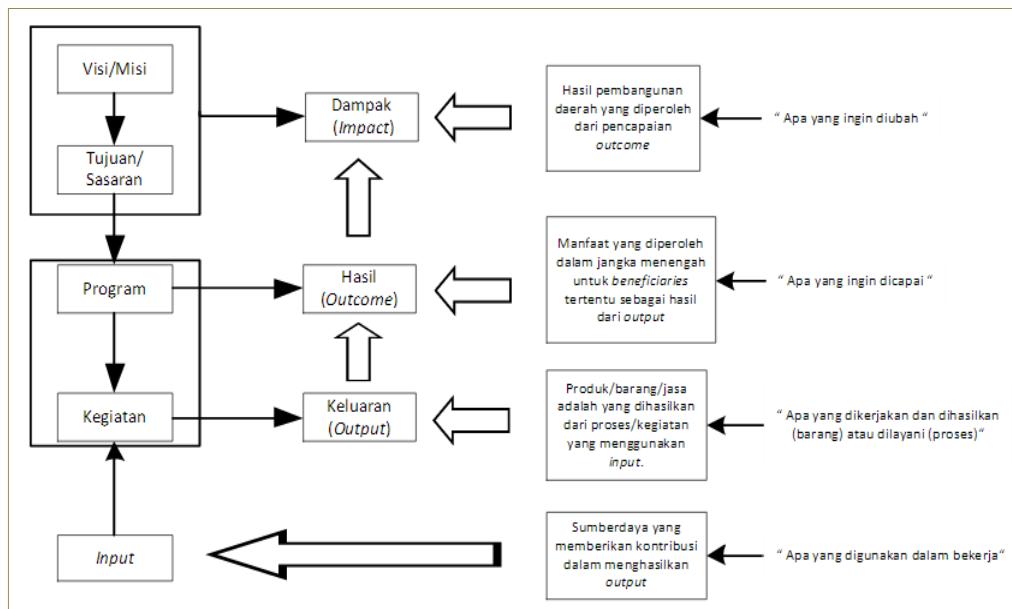
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis atau prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematis keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 5.1
Skematik Keterkaitan Antara Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan Dan Sasaran, Program



Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan 3. Penyiapan dan penyaluran tenaga	1. Meningkatnya akses kesehatan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat 1. Meratanya akses pendidikan 2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel 3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca 4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan 5. Meningkatnya tingkat pendidikan 1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	kerja terlatih	2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari 4. Peningkatan kesejahteraan sosial
		1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari 2. Membangun ruang publik untuk masyarakat 3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat 4. Peningkatan penyediaan Air Minum 5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung. 2. Revitalisasi los kios pasar nagari 1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk 2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten 1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran 2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan 1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan 2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan 3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan 2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak 3. Meningkatkan produksi perikanan 4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian 1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian 2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat
	3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri
	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten 2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
	5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur 2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan 2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi
	4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Membangun BUM Nagari 2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	Adanya BUMNagari Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama 2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	1. Meningkatnya kehidupan beragama 2. Meningkatkan peran adat 1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya 2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya

5.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari
3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (*mewujudkan sustainable development*)

5.5 TEMA PEMBANGUNAN PER TAHUN

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (hastha utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaikan kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran. Tema pembangunan setiap tahun periode 2016-2021 adalah :

- 2016 : Menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan SDM dan kemandirian daerah
- 2017 : Mengembangkan kemandirian dan identitas budaya melalui pembangunan berbasis nagari
- 2018 : Menyiapkan perangkat daerah yang tanggap terhadap kebutuhan daerah dalam rangka menciptakan kemandirian dan pengembangan budaya lokal
- 2019 : Mengembangkan kemandirian diberbagai bidang berlandaskan budaya daerah
- 2020 : Memperkuat sistem pemerintahan, sistem budaya masyarakat untuk memperkokoh kemandirian daerah
- 2021 : Terbentuknya Kemandirian dan kebudayaan yang bernilai positif sebagai modal dasar pembangunan Dharmasraya berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan	Melanjutkan pembangunan sarana kesehatan dan memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan;	1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk 2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja. 2. Memberikan pelayanan KB kepada rumah tangga yang "unmet need" (tidak terjangkau pelayanan) dan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah; Menambah kader KB; membentuk desa KB	meningkatkan jumlah peserta KB dan sosialisasi kesehatan reproduksi. meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan		3. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif. Sosialisasi, pembentukan siaga penyakit di lingkungan dan perbaikan sanitasi lingkungan	Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk
		4. Menambah ketersediaan obat dan vaksin; Menambah sumberdaya manusia dan pos pelayanan	Meningkatkan cakupan dan jenis obat dan imunisasi.
	3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan	Menambah dan meningkatkan sumberdaya manusia bidang kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan (kompetensi dokter, tenaga medis, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan)
	4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Memanfaatkan RTH dan sarana olahraga serta event olahraga	Menggiatkan kegiatan olah raga
2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan	Melengkapi sarana prasarana sekolah khususnya didaerah yang pinggiran	Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah sesuai standar nasional
	2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	1. Mengembangkan sekolah model untuk percontohan akreditasi A yang bisa diduplikasi ke sekolah lain. 2. Assesment pengelola sekolah khususnya kepala sekolah yang dilakukan secara transparan	Mengadakan sekolah percontohan akreditasi A sebagai acuan pengembangan sekolah lainnya di setiap kecamatan Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah
		3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah sesuai aturan dan tepat waktu	Meningkatkan Pelatihan dan MGMP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Pembangunan pustaka nagari secara bertahap yang dimulai pada beberapa nagari percontohan	Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat
	4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan	Mengadakan kegiatan harian keagamaan, mingguan dan pesantren ramadhan	Mengintensifkan waktu untuk kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan.
	5. Meningkatnya tingkat pendidikan	Pelayanan pendidikan untuk anak miskin; pendidikan keorangtuaan dan siswa berprestasi	Mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorangtuuan dan pemberian beasiswa
3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja	Revitalisasi sarana prasarana balai latihan kerja yang memadai untuk mencetak tenaga trampil siap kerja	Memfungskan dengan optimal balai latihan kerja;
	2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari	1. Membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang memerlukan tenaga kerja) 2. Menseleksi pemuda yang memenuhi syarat untuk dilatih di balai latihan kerja.	Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari Mengirimkan pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja
4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan kesetaraan gender 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala bidang. Menyediakan lingkungan ramah anak.
	2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat	Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	Menangani masalah penyandang masalah sosial dan masyarakat marjinal
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.	Menciptakan kawasan pasar yang menarik sebagai bagian identitas daerah dengan peningkatan sarana prasarana pendukung lingkungan pasar	Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2. Revitalisasi los kios pasar nagari	Memperbaiki sarana prasarana pasar-pasar nagari sehingga memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap
2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk	1. Membangun RTH taman yang mudah dijangkau masyarakat	Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan.
		2. Menyediakan RTH olahraga pada pusat pelayanan kecamatan	Tersedianya sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini
	2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten	Mengembangkan kawasan dan objek wisata berdasarkan prioritas	Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap
3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran	Membangun dan meningkatkan jalan berdasarkan prioritas kesulitan akses	Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan permukiman ke pusat kecamatan dan kabupaten;
			Pembangunan terminal Type B dan type C; Peningkatan transportasi sungai;
	2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar	1. Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas kesulitan akses;	Membangun dan meningkatkan jalan poros tani.
4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan	Melayani kebutuhan air minum perpipaan sebagai pendukung perkembangan ekonomi	Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai
5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan persampahan	Menyediakan pelayanan persampahan sesuai dengan standar area pelayanan	Optimalisasi TPA, pembangunan TPA bagian selatan dan penyediaan sarana TPS
	2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan	Peningkatan sanitasi rumah pada daerah prioritas rawan penyakit akibat sanitasi buruk dan permukiman minim jamban sehat	Sosialisasi dan bantuan sarana MCK; Peningkatan pengolahan limbah; pembangunan drainase; perbaikan perumahan kampung;
	3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin	Penanganan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Pembangunan rumah layak huni.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan	Intensifikasi dan ekstensiifikasi sawah dan produk pangan lainnya di kabupaten; peningkatan kapasitas SDM kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; 2. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; 3. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya;
	2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak	Memberi bantuan stimulus bibit kepada kelompok masyarakat; membuat lembaga pembibitan ternak; pengembangan sentra atau kampung ternak; memberi bantuan ternak,pakan sarana dan prasaranaanya; peningkatan kapasitas SDM kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat; 2. Pengembangan sentra peternakan rakyat/ kampung ternak; 3. Pengembangan integrasi sawit- sapi potong; 4. Bantuan ternak, pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan; 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan
	3. Meningkatkan produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberibantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut kawasan minapolitan. 2. Meningkatkan fungsi penyuluhan perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi perikanan; • Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan
	4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian	Mengolah dan pemasaran lebih lanjut hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan industri olahan berbasis bahan baku lokal;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani; 3. Membangun jaringan pemasaran hasil pertanian
2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian 2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian 3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat	1. Memberi bantuan stimulus bibit dan peningkatan fungsi balai pembibitan 2. Memfasilitasi peningkatan kinerja kelompok pengolahan hasil pertanian. 1. Mengaktifkan pengadaan bibit padi dan saprodi ditingkat petani; Pengadaan bibit sawit dan karet bermutu. 2. Meningkatkan peran penyuluh pertanian Mempermudah pendirian dan kerjasama pengolahan hasil tambang rakyat	1. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun. 2. Mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao, dll).
3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri	Bantuan modal usaha, fasilitasi kemitraan, pembinaan produksi, pelatihan manajemen industri, promosi, penyediaan wadah promosi UMKM (UMKM center)	Meningkatnya kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UMKM komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar.
4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi	1. Membuat aturan perlindungan pasar, menata pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern	1. Meningkatkan perlindungan pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Memperkuat perekonomianan rakyat dengan koperasi sebagai soko guru	2. Meningkatkan peran koperasi

Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	1. Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial	Mengaktifkan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan membuat pilot project perhutanan sosial	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial
2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten 2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	Melengkapi rencana tata ruang daerah dan meningkatkan fungsi BKPRD sebagai lembaga koordinasi penataan ruang. Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang	Menyusun dan merevisi rencana tata ruang; mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis	Penghijauan lahan kritis dengan melibatkan masyarakat	Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomis dalam rangka penghijauan lahan kritis.
4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan	Sosialisasi, fasilitasi kegiatan, menyusun peraturan dan percontohan penangkaran	Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan
5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari	Pengendalian perijinan; mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang	Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tata ruang
6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana	1. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; 2. Pemetaan daerah rawan bencana	Menyediakan sarana dan prasarana bencana Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bencana

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas	1. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah	1. Penguatan tugas dan fungsi PPID

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dari praktik korupsi	2. melimpahkan seluruh kewenangan perizinan ke PTSP 3. Mentransparangkan pengadaan barang dan jasa	2. Penguatan tugas dan fungsi PTSP 3. Penguatan Tugas dan fungsi dan transparansi pengadaan barang dan jasa
2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur	Peningkatan kompetensi aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
	2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan (perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi) 2. Menggali potensi keuangan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi. Pemetaan potensi keuangan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan 2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi	Adanya unit yang memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas perangkat daerah Membangun sistem informasi pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi
4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan	Membuat sistem pendataan informasi pembangunan yang relevan dan menyatu antara kecamatan dan nagari.	Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Membangun BUM Nagari	1. Adanya BUMNagari	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Terbentuknya BUM Nagari
2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	1. Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan	Dimulai dari pilot project pembangunan nagari pada 1 nagari per kecamatan Dari pilot project kemudian setelah evaluasi dapat diteruskan menjadi format seluruh nagari	Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan nagari on-line).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama 2. Meningkatkan peran adat	Meningkatkan kegiatan keagamaan pesantren ramadhan, didikan subuh, pengajian di masjid dan sekolah Fasilitasi kegiatan lembaga adat LKAM	Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid, sekolah dan selama ramadhan Memperkuat peran lembaga adat
2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya 2. Pengembangan warisan budaya 3. Pemanfaatan warisan budaya	1. Perlindungan warisan budaya 2. Fasilitasi penelitian warisan budaya. 3. Menyediakan sarana dan prasarana wisata sejarah	1. Membentuk tim ahli agar budaya; Melakukan inventarisasi warisan budaya; 2. Menyusun profil budaya nagari; 3. Menyusun peraturan daerah agar budaya; 4. Menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya.
	2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya	1. Revitalisasi budaya Kabupaten Dharmasraya 2. Apresiasi budaya 3. Promosi budaya	1. Memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya. 2. Merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu 3. Menyediakan dan menengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan 1. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya 2. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya 1. Menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmasraya 2. Melakukan kegiatan seminar budaya Dharmasraya

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab tujuh bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum diperoleh landasan untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Dharmasraya dibagi berdasarkan tematik misi pembangunan daerah.

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Aspek kesehatan

1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana kesehatan lainnya
2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin
3. meningkatkan pelayanan KB

4. Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja
5. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif.
6. Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk melalui peningkatan sosialisasi kesehatan bersifat preventif dan perbaikan sanitasi lingkungan
7. Meningkatkan cakupan dan jenis imunisasi.
8. Meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan pelayanan prima bagi seluruh penduduk. Untuk upaya ini perlu dibangun sistem informasi kesehatan.
9. Meningkatkan mutu pelayanan sumberdaya manusia bidang kesehatan melalui peningkatan kompetensi dan jumlah dokter, tenaga medis, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
10. Menggiatkan kegiatan olah raga masyarakat dengan memanfaatkan RTH dan sarana olahraga serta mengadakan event-event olahraga.

Aspek pendidikan

11. Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah sesuai standar nasional
12. Mengadakan sekolah model sebagai acuan pengembangan sekolah lainnya dengan mengembangkan sekolah percontohan akreditasi A disetiap kecamatan yang dapat diduplikasi kesekolah lain
13. Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah. Standarisasi prosedur pengangkatan pengelola sekolah yang transparan dan akuntabel
14. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan Pelatihan dan MGMP.
15. Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat. Dimulai dengan pembangunan pustaka nagari percontohan
16. Mengintensifkan kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan melalui: program peningkatan iman dan taqwa di sekolah; program remaja masjid; program pesantren ramadhan.
17. Pelayanan pendidikan untuk anak miskin melalui mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorngtuaan.

Aspek ketenagakerjaan

18. Memfungsikan dengan optimal balai latihan kerja didukung instruktur yang andal dengan jumlah mencukupi.

19. Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari dengan membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja).
20. Perekruitmen pemuda nagari dengan mengirim pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja.

Aspek pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dan sosial

21. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui penyediaan lingkungan ramah anak.
22. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat dengan memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan social dan masyarakat marjinal.

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah

23. Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan.
24. Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap.
25. Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan.
26. Menyediakan sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini.
27. Menyediakan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai
28. Meningkatkan wilayah pelayanan persampahan dan ketersediaan sarana persampahan melalui peningkatan sistem pengumpulan, pengangkutan, optimalisasi TPA, serta kegiatan 3R (Reduce, Reuse, recycle)
29. Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dengan peningkatan pengolahan limbah; peningkatan pelayanan drainase; dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan;
30. Meningkatkan perbaikan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin.
31. Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap.
32. Pembangunan dan peningkatan sistem transportasi wilayah dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan; pembangunan terminal; pembangunan sistem transportasi sungai.

3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata

Aspek pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan

33. Membangun dan meningkatkan jalan produksi pendukung kegiatan ekonomi.
34. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi serta peningkatan kapasitas SDM kelompok tani. Upaya yang dilakukan seperti meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari; meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya; revitalisasi sawah; memberikan bantuan peningkatan produksi (bibit, alat dan mesin pertanian)
35. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktifitas peternakan melalui berbagai upaya seperti: bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat; pengembangan sentra peternakan rakyat/kampung ternak; pengembangan integrasi sawit-sapi potong; bantuan pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan; peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan; peningkatan kapasitas SDM kelompok.
36. Meningkatkan produksi perikanan;
37. Pengembangan kawasan minapolitan; memberi bantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut sarana prasarana kawasan minapolitan;
38. meningkatkan fungsi penyuluhan perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok.
39. Hilirisasi produk hasil pertanian tanaman pangan melalui pembangunan industri olahan berbasis bahan baku lokal; pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan usaha rakyat;
40. membangun jaringan pemasaran hasil pertanian
41. Peningkatan keragaman komoditi tanaman kebun masyarakat melalui meragamkan jenis tanaman kebun di tingkat petani dengan stimulasi seperti bantuan bibit, alat dan mesin pertanian
42. Mengembangkan keragaman budidaya komoditi potensial perkebunan dan hortikultura seperti salak, jeruk, kakao dan kopi untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah.
43. Intensifikasi tanaman hortikultura, palawija dan peremajaan tanaman perkebunan melalui upaya seperti bantuan benih unggul tanaman perkebunan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian

Aspek industri

44. Pemberdayaan pengolahan hasil tambang rakyat Dharmasraya untuk memberi nilai tambah
45. Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan hasil pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao, dll).
46. Meningkatnya kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UKMK komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar. Upaya yang dilakukan seperti: Bantuan modal usaha UKMK; fasilitasi kemitraan; pembinaan produksi; pelatihan manajemen industri.

Aspek pemasaran

47. Penguatan fungsi pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi

Aspek Sarana Pendukung Pertanian

48. Mengfungsikan dengan optimal aset sarana pendukung kegiatan ekonomi daerah (seperti balai benih, balai pembibitan, labor tanah dan daun, pasar ternak, pasar komoditi).

Aspek Pengelolaan Kehutanan Oleh Masyarakat

49. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat perhutanan sosial.

4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya

Aspek Penataan ruang

50. Menyusun dan merevisi rencana tata ruang
51. Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan.
52. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah

Aspek ekologis

53. Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomis dalam rangka penghijauan lahan kritis.
54. Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan
55. Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan DAS Batanghari sesuai dengan rencana tata ruang

Aspek Penanganan Bencana

56. Meningkatkan kemampuan penanganan bencana melalui peningkatan sarana dan prasarana tanggap bencana serta
57. peningkatan kapasitas dan jumlah SDM mitigasi dan penaggulangan bencana

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju

58. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah dan pelimpahan seluruh kewenangan perijinan ke PTSP. Upaya yang dilakukan yaitu: penguatan tugas dan fungsi PPID; penguatan tugas dan fungsi PTSP; serta penguatan tugas dan fungsi dan transparansi pengadaan barang dan jasa
59. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
60. Penataan kebutuhan ASN Struktural dan fungsional
61. Penghargaan (reward) terhadap ASN berprestasi
62. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi
63. Pemetaan potensi keuangan daerah
64. Menyatukan informasi pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas perangkat daerah
65. Menyimpan data pembangunan secara terintegrasi dalam sistem teknologi informasi pembangunan daerah
66. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan.

6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat

67. Mendirikan BUM Nagari pada sektor prioritas pembangunan ekonomi.
68. Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan aspek pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan sistem informasi nagari berbasis Teknologi Informasi).

7. Menjadikan agama, adat dan identitas budaya sebagai landasan pembangunan Dharmasraya

Aspek Keagamaan

69. Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid selama ramadhan.

Aspek Adat

70. Memperkuat peran lembaga adat.

Aspek Budaya

71. Mempersiapkan kerangka pelestarian warisan budaya Dharmasraya melalui: fasilitasi kegiatan lembaga adat; membentuk tim ahli cagar budaya; melakukan inventarisasi warisan budaya; menyusun profil budaya nagari; menyusun peraturan daerah cagar budaya; dan menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya; fasilitasi penelitian warisan budaya.
72. Memanfaatkan warisan budaya melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata sejarah.
73. Revitalisasi budaya Dharmasraya melalui upaya memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya; merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu; menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan; mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya; menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmasraya; melakukan kegiatan seminar budaya Dharmasraya.

7.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program prioritas berhubungan dengan sasaran dan kebijakan umum yang menjadi penghubung antara indikator kinerja sasaran dengan bidang urusan. Dalam tabel berikut ini terlihat uraian program prioritas Kabupaten Dharmasraya yang disandingkan dengan kebijakan umum pembangunan.

Dalam rangka mencapai target kinerja pemerintahan daerah sebagai tolok ukur dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan visi, misi kepala daerah, maka ditetapkan program prioritas RPJMD berdasarkan kebijakan umum. Adapun Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan RPJMD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.1. Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Indikator Sasaran baru	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	URUSAN
					(2015)	(2021)		
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.								
1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan	Melanjutkan pembangunan sarana kesehatan dan memudahkan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan;	1. Melanjutkan pembangunan rumah sakit daerah dan sarana lain (puskesmas, pustu) yang memadai bagi seluruh penduduk 2. Menyediakan pengobatan gratis untuk masyarakat miskin	Angka usia harapan hidup	69,78	69,9	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Bidang kesehatan
				unit RSUD terakreditasi versi 2012	0	1		
				PSC yang representatif	0	1	program penerapan Public safety	
				Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	12,75	9,62	Program peningkatan pelayanan	
				Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk	12,750	9,620		
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja.	meningkatkan jumlah peserta KB dan sosialisasi kesehatan reproduksi.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	173	140	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		2. Memberikan pelayanan KB kepada rumah tangga yang "unmet need" (tidak terjangkau pelayanan) dan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah; Menambah kader KB; membentuk desa KB	meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,004	0,004	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
		3. Meningkatnya sosialisasi kesehatan bersifat preventif. Sosialisasi, pembentukan siaga penyakit di lingkungan dan perbaikan sanitasi lingkungan	Mengurangi penderita penyakit menular dan penyakit akibat sanitasi buruk	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	
		4. Menambah ketersediaan obat dan vaksin; Menambah sumberdaya manusia dan pos pelayanan	Meningkatkan cakupan dan jenis obat dan imunisasi.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		
		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan	Menambah dan meningkatkan sumberdaya manusia bidang kesehatan	Percentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan	100	100	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan	Melengkapi sarana prasarana sekolah khususnya daerah yang pinggiran	Menyediakan layanan pendidikan usia dini, dan pendidikan dasar sesuai standar nasional	Rasio dokter per satuan penduduk	0,27	0,34		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,63	2,63		
				Jumlah Lapangan olahraga			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
				Jumlah event olah raga yang terlaksana			Program Peningkatan Sarana dan	
				- APK SD/MI/Paket A	110,23	109,92		
	2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu	1. Mengembangkan sekolah model untuk percontohan	Mengadakan sekolah percontohan akreditasi A	- APK SMP/MTs/Paket B	77,5	84,2		Bidang pendidikan
				- APM SD/MI	90,05	99,74		
				- APM SMP/MTs	60,22	83,65		
				Percentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	72,406	85,02		
				Percentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	78,803	90,01		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	AKTIVITAS	INDIKATOR SUCESI KEGIATAN	Capaian Kinerja	Dokumen Penilaian Daerah	EDISI	
	melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel	2. Asesment pengelola sekolah khususnya kepala sekolah yang dilakukan secara transparan	Mengadakan assesment terhadap pengelola sekolah dalam rangka memilih personil yang mampu menjadi penggerak peningkatan mutu sekolah	Persentase kepala sekolah bersertifikat; tersedianya SOP pemilihan kepala sekolah; pemilihan kepala sekolah berdasarkan SOP	0	100	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
		3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah sesuai aturan dan tepat waktu	Meningkatkan Pelatihan dan MGMP	#REF! #REF!	#REF!	#REF!		
	3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Pembangunan pustaka nagari secara bertahap yang dimulai pada beberapa nagari percontohan	Membangun pustaka pada setiap nagari sebagai taman bacaan rekreatif masyarakat	Jumlah Perpustakaan Binaan	0	52	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bidang perpustakaan
	4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan	Mengadakan kegiatan harian keagamaan, mingguan dan pesantren ramadhan	Mengintensifkan waktu untuk kegiatan keagamaan di sekolah, masjid lingkungan dan selama ramadhan.	persentase kegiatan keagamaan harian, mingguan, tahunan di sekolah meningkatnya siswa melek baca alquran	n/a n/a	100% 100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Bidang pendidikan
	5. Meningkatnya tingkat pendidikan	Pelayanan pendidikan untuk anak miskin; pendidikan keorangtuaan dan siswa berprestasi	Mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan keorangtuaan dan pemberian beasiswa	Angka rata-rata lama sekolah	8,01	8,35		
3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja	Revitalisasi sarana prasarana balai latihan kerja yang memadai untuk mencetak tenaga trampil siap kerja	Memfungsikan dengan optimal balai latihan kerja;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65,88 45,0	68,29 70,0	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Bidang tenaga kerja
	2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari	1. Membuat networking dengan pasar tenaga kerja (perusahaan dan lembaga yang memerlukan tenaga kerja) 2. Menseleksi pemuda yang memenuhi syarat untuk dilatih di balai latihan kerja.	Menyalurkan angkatan kerja menganggur yang memiliki keterampilan dari setiap nagari Mengirimkan pemuda yang menganggur oleh nagari untuk mengikuti balai latihan kerja dan bursa tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65,88 44,98	68,29 70	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan kesetaraan gender 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala bidang. Menyediakan lingkungan ramah anak.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	67,66 12,5	69,37 85	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat	Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial dan masyarakat marjinal	Menangani masalah penyandang masalah sosial dan masyarakat marjinal	Jumlah panti asuhan yang dibina Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	3 9.539	3 9.539	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Bidang sosial.
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.								
1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.	Menciptakan kawasan pasar yang menarik sebagai bagian identitas daerah dengan peningkatan sarana prasarana pendukung lingkungan pasar	Revitalisasi kawasan pasar dengan prioritas pasar utama kabupaten dengan pedestrianisasi, membangun plaza (lapangan terbuka), penghijauan, dan penerangan	Jumlah kawasan pasar yang direvitalisasi	0	3	Program peningkatan sarana dan prasarana pasar	Bidang perdagangan

TUJUAN	CASADAN	STRATEGI	AKTIVITAS	Indikator Sasaran kinerja	Capaian Kinerja	Program Pembangunan Daerah	EDUCAN	
	2. Revitalisasi los kios pasar nagari	Memperbaiki sarana prasarana pasar-pasar nagari sehingga memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	Melakukan revitalisasi pasar nagari secara bertahap	Persentase pasar dalam kondisi baik	19,44 36,11			
2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk	1. Membangun RTH taman yang mudah dijangkau masyarakat 2. Menyediakan RTH olahraga pada pusat pelayanan kecamatan	Membangun RTH taman di bagian wilayah utara, tengah, selatan. Tersedianya sarana RTH olah raga di pusat kecamatan dengan fasilitas minimal lapangan sepakbola dan tribun mini	Kawasan RTH terbangun	0 3 kawasan	Program Pemanfaatan Ruang	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	
	2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten	Mengembangkan kawasan dan objek wisata berdasarkan prioritas	Mengembangkan kawasan dan objek wisata secara bertahap	Jumlah kawasan wisata yang dikembangkan	n/a 5 kawasan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bidang pariwisata	
3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran	Membangun dan meningkatkan jalan berdasarkan prioritas kesulitan akses	Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan permukiman ke pusat kecamatan dan kabupaten;	Panjang jalan dalam kodisi mantap Banyaknya Jembatan Permanen Panjangnya jalan yang diperbaiki Jumlah Jembatan Yang diperbaiki	66,70 118 1035,72 66	87,05 250 2.236 191	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar	Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan berdasarkan prioritas kesulitan akses	Membangun dan meningkatkan jalan poros tani.	Jumlah terminal tipe C terbangun	0 1			
4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan	Melayani kebutuhan air minum perpipaan sebagai pendukung perkembangan ekonomi	Penyediaan air minum perpipaan pada kawasan cepat tumbuh Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai	Jumlah intake air baku yang dibangun; tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/orang/hari.	n/a	200 106	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	Bidang pertanian
5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan	Menyediakan pelayanan persampahan sesuai dengan standar area pelayanan	Optimalisasi TPA, pembangunan TPA bagian selatan dan penyediaan sarana TPS	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,43	9,69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan	Peningkatan sanitasi rumah pada daerah prioritas rawan penyakit akibat sanitasi buruk dan permukiman minim jamban sehat	Sosialisasi dan bantuan sarana MCK; Peningkatan pengolahan limbah; pembangunan drainase; perbaikan perumahan kampung	Jumlah Desa/Nagari Yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)	8	18	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin	Penanganan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Pembangunan rumah layak huni	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu			Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.								
1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sawah dan produk pangan lainnya di kabupaten; peningkatan kapasitas SDM kelompok.	1. Meningkatkan produksi padi sawah dan produk pangan lainnya; 2. Menambah luas lahan sawah D.I. Batanghari;	Produksi Padi Produksi Jagung Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan	70.169 0 800	80.898 6 825	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (Bidang Peekraam Umum)	Bidang pertanian

TUJUAN	SASADAN	STRATEGI	AHLIKERIAKAN	Indikator Sasaran kinerja	Capaian Kinerja		Program Pengembangan Daerah	EDUCAN	
					Target	Kapasitas			
1. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak, perikanan, pertanian, dan ekonomi petani	2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak	Memberi bantuan stimulus bibit kepada kelompok masyarakat; membuat lembaga pembibitan ternak; pengembangan sentra atau kampung ternak; memberi bantuan ternak,pakan sarana dan prasaranaanya; peningkatan kapasitas SDM kelompok.	3. Meningkatkan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya;	populasi sapi	40.785	45.931	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Bidan kelautan dan perikanan	
			1. Bantuan ternak seperti sapi dan kambing untuk kelompok masyarakat;						
			2. Pengembangan sentra peternakan rakyat/ kampung ternak;						
	3. Meningkatkan produksi perikanan		3. Pengembangan integrasi sawit- sapi potong;						
			4. Bantuan ternak, pakan, sarana dan prasarana bagi kelompok peternakan;						
	4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian		5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan						
	Mengolah dan pemasaran lebih lanjut hasil pertanian	1. Memberi bantuan stimulus benih, pakan, obat-obatan dan mengembangkan lebih lanjut kawasan minapolitan.	Produksi Perikanan	19.909	20.809	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Bidan kelautan dan perikanan		
		2. Meningkatkan fungsi penyuluh perikanan; peningkatan kapasitas SDM kelompok.							
		• Mengembangkan dan membangun prasarana sarana pendukung kawasan minapolitan							
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian	Mengolah dan pemasaran lebih lanjut hasil pertanian	NTP	100,94 (kondisi tahun 2013)	109,65	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	Bidang pertanian	
			1. Peningkatan industri olahan berbasis bahan baku lokal;						
			2. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani;						
		2. Memfasilitasi peningkatan kinerja kelompok pengolahan hasil pertanian.	3. Membangun jaringan pemasaran hasil pertanian						
			Mengembangkan industri rakyat skala mikro dan kecil berbasis pengolahan sumber daya pertanian (sawit, karet, kopi dan kakao, dll).						
	3. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian	1. Mengaktifkan pengadaan bibit padi dan saprodi ditingkat petani; Pengadaan bibit sawit dan karet bermutu.	1. Di tingkat petani, meragamkan jenis tanaman kebun.	Produksi tanaman pangan (padi, jagung). Luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)	padi : 70.169 Ton, jagung = 0 Ton , luas areal hortikultura = 0	padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	Program Penyediaan sarana dan prasaraan serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan	Bidan pertanian	
			2. Peremajaan tanaman perkebunan.						
		2. Meningkatkan peran penyuluh pertanian	Pemberdayaan penyuluh pertanian						
	3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat	Mempermudah pendirian dan kerjasama pengolahan hasil tambang rakyat	Mengolah bahan hasil tambang di Kabupaten Dharmasraya untuk memberi nilai tambah						

Tujuan	Casarana	Stategi	Arah Kerjakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Dinas/Danhakunan Daerah	Keluhan	
3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri	Bantuan modal usaha, fasilitasi kemitraan, pembinaan produksi, pelatihan manajemen industri, promosi, penyediaan wadah promosi UMKM (UMKM center)	Meningkatnya kualitas dan pemasaran industri dengan prioritas pada UKMK komoditi spesifik daerah dan komoditi yang menyerap tenaga kerja besar.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,97	4,28	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Bidang perindustrian
4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan perlindungan pasar, menata pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern 2. Memperkuat perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai soko guru	1. Membuat aturan perlindungan pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi 2. Meningkatkan peran koperasi aktif	1. Meningkatkan perlindungan pasar dan mengefisienkan rantai distribusi perdagangan, komoditi serta meningkatkan perdagangan pasar komoditi 2. Meningkatkan peran koperasi aktif	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,14	12,92	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Bidang perdagangan
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.								
1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	1. Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial	Mengaktifkan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan membuat pilot project perhutanan sosial	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dan membuat pilot project perhutanan sosial	Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	4	9	Program Perencanaan Tata Ruang	Bidang kehutanan
2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten	Melengkapi rencana tata ruang daerah dan meningkatkan fungsi BKPRD sebagai lembaga koordinasi penataan ruang.	Menyusun dan merevisi rencana tata ruang; mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan.					
	2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah	Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tata ruang	Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah					
3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis	Penghijauan lahan kritis dengan melibatkan masyarakat	Menanam tanaman bernilai ekologis dan ekonomis dalam rangka penghijauan lahan kritis.					
4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan	Sosialisasi, fasilitasi kegiatan, menyusun peraturan dan percontohan penangkaran	Melindungi flora dan fauna yang terancam kepunahan					
5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari	Pengendalian perijinan; mencegah penyimpangan pemanfaatan ruang	Mengarahkan pemanfaatan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan tata ruang					
6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana	1. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; 2. Pemetaan daerah rawan bencana	1. Menyediakan sarana dan prasarana bencana 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bencana	Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi	0	7 kawasan	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Bidang ketenteraan, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.								
1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi	1. Mentransparankan seluruh perencanaan dan penganggaran daerah 2. melimpahkan seluruh kewenangan perizinan ke PTSP 3. Mentransparankan pengadaan barang dan jasa	1. Penguanan tugas dan fungsi PPID 2. Penguanan tugas dan fungsi PTSP 3. Penguanan Tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa	Perangkat Daerah kabupaten menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	n/a	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	- Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, dan perangkat daerah
	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur	Peningkatan kompetensi aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional	persentase ASN terlatih	n/a	95%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Memantapkan sistem pembangunan daerah								Bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

TUJUAN	CASADAN	STDATECI	ADALIKERIAKAN	Indikator Sasaran kinerja	Capaian Kinerja	Dokumen Dampaknnon Daerah	EDUCAN
	2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan (perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi)	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, konsistensi penganggaran, memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi.			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang perencanaan
		2. Menggali potensi keuangan daerah	Pemetaan potensi keuangan daerah			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bidang keuangan
3. Pembangunan sistem informasi pemerintahan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan	Adanya unit yang memiliki kewenangan dalam pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas SKPD	Menyatakan informasi pembangunan dalam satu unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan lintas SKPD	e-planning	belum	ada	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi	Membangun sistem informasi pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menyimpan data pembangunan dalam sistem teknologi informasi pembangunan daerah	e-budgetting	belum	ada	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
				perangkat daerah memiliki website	3	semua perangkat daerah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan	Membuat sistem pendataan informasi pembangunan yang relevan dan menyatu antara kecamatan dan nagari.	Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan yang relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan menyatu antara nagari dan kecamatan	nagari memiliki website	3	52	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.							
1. Membangun BUM Nagari	1. Adanya BUMNagari	Jumlah BUMNag yang diberdayakan	Terbentuknya BUM Nagari	Jumlah BUM Nagari	0	52	Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	1. Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan	Dimulai dari pilot project pembangunan nagari pada 1 nagari per kecamatan Dari pilot project kemudian setelah evaluasi dapat diteruskan menjadi format seluruh nagari	Menyiapkan pembangunan berbasis nagari (yang terkait dengan pembangunan basis data nagari, format rencana nagari, kelembagaan sosial ekonomi nagari dan pembuatan nagari on-line)	persentase nagari yang memiliki pemerintahan yang terstandar	0	100%	Program Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun							
1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama	Meningkatkan kegiatan keagamaan pesantren ramadhan, didikan subuh, pengajian di masjid dan sekolah	Meningkatkan kegiatan keagamaan di masjid, sekolah dan selama ramadhan	persentase sekolah melakukan kegiatan keagamaan	100%	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	2. Meningkatkan peran adat	Fasilitasi kegiatan lembaga adat LKAM	Memperkuat peran lembaga adat				Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	1. Perlindungan warisan budaya	1. Membentuk tim ahli cagar budaya; Melakukan inventarisasi warisan budaya;	Terbentuknya tim ahli cagar budaya;	0	1 tim	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			2. Menyusun profil budaya nagari;	Kegiatan penelitian warisan budaya.	0	5 kegiatan	Program Pengembangan Nilai Budaya
			3. Menyusun peraturan daerah cagar budaya;	Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah	0	5 paket	
			4. Menyusun rencana induk pelestarian warisan budaya.	Revitalisasi rumah gadang/krajan menjad museum insitu;	0	5 paket	
	2. Pengembangan warisan budaya	3. Pemanfaatan warisan budaya	Fasilitasi penelitian warisan budaya.	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya	0	5 paket	
			Menyediakan sarana dan prasarana wisata sejarah				

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	AHLIKEILAKAN	Indikator Sasaran kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	EDUCATION
					Target	Capaian		
	2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya	1. Revitalisasi budaya Kabupaten Dharmasraya 2. Apresiasi budaya 3. Promosi budaya	1. Memfasilitasi penyusunan dokumen kerja sama dengan BPCB, BPNB, BALAR dan perguruan tinggi untuk pengelolaan khazanah budaya. 2. Merevitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu 3. Menyediakan dan menengembangkan sarana dan prasarana perpustakaan 1. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya 2. Mengadakan agenda tahunan festival budaya Dharmasraya 1. Menyediakan sarana dan prasarana promosi budaya Kabupaten Dharmasraya 2. Melakukan kegiatan seminar budaya Dharmasraya	Inventarisasi warisan budaya; Penyelenggaraan festival seni dan budaya Gedung promosi budaya	0	6 unit		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab ini berbagai perumusan sebelumnya diterjemahkan ke dalam penyusunan program prioritas. Program prioritas dilengkapi dengan indikator kinerja serta pencapaian kinerja awal dan akhir dari RPJMD pada setiap bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawabnya. Uraian bab ini menghubungkan urusan pemerintah dengan perangkat daerah yang terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Indikasi program prioritas disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya memisahkan antara aspek strategis dan operasional dari suatu program prioritas, sehingga dalam memikirkan program pembangunan daerah perlu kita pisahkan antara program prioritas yang bersifat strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Sementara suatu urusan menjadi strategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan. Suatu urusan yang bersifat strategis berpengaruh sangat luas dan mendesak untuk mencapai kinerja pembangunan daerah. Ketika suatu urusan atau program menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi nilainya dibanding program yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Suatu program prioritas yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah. Namun untuk program prioritas yang dikategorikan bersifat strategis maka menjadi tanggung jawab Kepala perangkat daerah dan juga kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Setelah program prioritas dirumuskan maka kemudian dibuat alokasi pagu anggaran untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berisi program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun yang secara tidak langsung terkait dengan pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1. Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Dharmasraya**

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB				358.412.711.919		505.621.856.410		532.981.161.732		468.348.248.826		683.913.496.507		820.823.949.705		2.892.965.245.979			
1 A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				333.407.598.436		455.738.551.900		481.221.373.564		419.079.064.968		632.701.092.898		762.496.996.716		2.621.093.499.361			
1 1	BIDANG PENDIDIKAN				37.453.768.000		46.212.752.000		47.898.302.000		72.000.727.000		117.915.264.500		120.045.095.750		241.438.069.250			
1 1 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pelatihan dan Bimtek	0	orang	0	30.000.000	5	60.000.000	5	78.000.000	5	78.000.000	5	78.000.000	5	78.000.000	25	402.000.000	Dinas Pendidikan	
1 1 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	52,83	%	56,13	3.085.101.500	59,43	4.287.000.000	62,73	4.855.200.000	66,03	5.379.900.000	69,33	12.395.600.000	72,63	16.834.500.000	72,63	29.837.301.500	Dinas Pendidikan	
		Rasio Ruang Kelas/Siswa	1:28	kelas/siswa	1:25		1:22		1:20		1:18		1:16			1:15		1:15		- Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/Siswa	1:18	kelas/siswa	1:16		1:15		1:12		1:12		1:12			1:12		1:12		- Dinas Pendidikan
1 1 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- APM SD/MI	100	%	90,05	26.553.742.000	93,21	28.523.252.000	95,34	28.682.002.000	97,65	61.570.127.000	98,76	99.889.064.500	99,74	96.925.395.750	99,74	162.143.583.250	Dinas Pendidikan	
		- APM SMP/MTs	78,33	%	61,32		62,87		64,78		75,89		80,53		83,65		83,65		- Dinas Pendidikan	
		- APK SD/MI/Paket A	108,61	%	111,76		112,87		113,62		114,96		115,71		116,12		116,12		- Dinas Pendidikan	
		- APK SMP/MTs/Paket B	90,93	%	77,5		78,6		81,2		82,4		83		84,2		84,2		- Dinas Pendidikan	
		Jumlah yang terakreditasi A SD	8	Sekolah	8		25		40		70		90		120		120		- Dinas Pendidikan	
		Jumlah yang terakreditasi A SMP	9	Sekolah	9		12		17		23		26		30		30		- Dinas Pendidikan	
		Rasio Guru dan Siswa SD	14,65	%	14,65		15,95		16,25		17		18,25		20,21		116,96		- Dinas Pendidikan	
		Rasio Guru dan Siswa SMP	15,65	%	15,65		16,25		17,35		18,15		18,95		19,12		121,12		- Dinas Pendidikan	
		Rasio Ruang Kelas / Siswa SD	1,49	%	1,49		2,18		3,45		4,11		4,87		5,24		22,83		- Dinas Pendidikan	
		Rasio Ruang Kelas / Siswa SMP	2,12	%	2,12		2,89		3,34		4,23		4,92		4,98		24,6		- Dinas Pendidikan	
1 1 17	Program Pendidikan Menengah	APK SMA	72,98			410.750.000		9.800.000.000		9.800.000.000		9.950.000.000		9.970.000.000		10.000.000.000		49.930.750.000	Dinas Pendidikan	
		APM	57,21																- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Siswa Putus Sekolah																	- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Siswa Melanjutkan Sekolah ke Perguruan Tinggi																	- Dinas Pendidikan	
1 1 18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	97,53	persen	98	527.840.000	98	370.000.000	98,2	480.000.000	98,3	560.000.000	98,4	620.000.000	98,5	690.000.000	98,6	2.955.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah PKBM / LKP Terakreditasi	0	Lembaga	0	0	3	75.000.000	5	125.000.000	7	210.000.000	8	320.000.000	9	360.000.000	32	1.090.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Tutor yang Bersertifikasi	0	Orang	0	0	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	29	575.000.000	Dinas Pendidikan	
1 1 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah SLB	3	Sekolah	3	235.000.000	3	270.000.000	3	480.000.000	4	580.000.000	5	600.000.000	6	630.000.000	6		- Dinas Pendidikan	
1 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SD	31	Orang	59	1.589.834.000	51	1.968.500.000	71	2.117.100.000	91	2.231.700.000	125	2.366.600.000	145	2.496.200.000	145	12.769.934.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SMP	28	orang	28		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Guru Sertifikasi SD	853	Orang	853		600		420		390		250		150		2663		- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Guru Sertifikasi SMP	311	Orang	311		270		220		200		150		50		1201		- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Pengawas Sekolah yang berkualifikasi S2	1	Orang	1	0	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	11	400.000.000	Dinas Pendidikan		
		Jumlah Kepala Sekolah yang berkualifikasi S2	77	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Dinas Pendidikan	
		Jumlah guru yang berkualifikasi S1	2817	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Dinas Pendidikan	
		Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat	70	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Dinas Pendidikan	
1 1 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat Capaian SPM	60	Persen	60	5.432.250.500	65	10.734.000.000	75	11.206.000.000	80	1.601.000.000	95	1.966.000.000	100	2.391.000.000		33.330.250.500	Dinas Pendidikan	
1 2	BIDANG KESEHATAN					38.650.042.750		191.816.799.900		138.247.279.314		95.384.121.890		119.879.607.164		122.193.400.966		610.989.134.783		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS	25	%	25	1.119.931.150	25,5	1.397.782.240	26	1.567.310.464	26,5	1.779.041.510	27	1.958.695.661	27,5	2.154.565.228	27,5	8.561.561.253	Dinas Kesehatan	
		Rasio posyandu per satuan balita																		
		Persentase Nagari Siaga Aktif	63	%	64	619.931.150	65	1.397.782.240	66	1.567.310.464	67	1.779.041.510	68	1.958.695.661	69	2.154.565.228	69	9.477.326.253	Dinas Kesehatan	
		Persentase Posyandu Strata mandiri	57	%	58		59		60		61		62		63		63		-Dinas Kesehatan	
1 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa/Nagari Yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)	8	Nagari	0	317.130.150	10	1.227.531.185	12	845.743.727	14	894.382.745	16	733.484.104	18	998.995.600	18	4.917.267.511	Dinas Kesehatan	
1 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			753.365.000		1.190.100.000		1.325.500.000		2.090.400.000		1.574.300.000		2.015.400.000		8.949.065.000	Dinas Kesehatan		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD																		
		Prevalensi HIV (persen)																		
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)																		
		Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)																	Dinas Kesehatan	
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	70	%	91		91,5		92		92,5		93		93,5		93,5			
		penemuan penderita pneumonia balita																		
		penemuan penderita diare																		
1 2 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKI (/ 100.000 KH)	153		330	654.000.000	325	1.040.000.000	310	1.010.000.000	305	1.000.000.000	300	1.000.000.000	280	420.000.000	280	5.124.000.000	Dinas Kesehatan	
		Angka kematian bayi (AKB)																		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani																		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan																		
1 2 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	AKABA (/ 1000 KH)	24		30	175.000.000	28	245.000.000	25	245.000.000	24	70.000.000	23	70.000.000	22	-	-	22	805.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase balita gizi buruk																		
1 2 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Kelompok kesehatan lansia yang dilayani	70	%	70	74.087.250	71	44.000.000	72	50.000.000	73	55.000.000	74	6.000.000	75	62.000.000	75	291.087.250	Dinas Kesehatan	
1 2 xx	Program Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Persentase kesehatan Anak sekolah baru	95	%	95	173.000.000	96	189.800.000	97	208.480.000	98	230.128.000	0,99	252.840.800	1	277.724.880	1	1.331.973.680	Dinas Kesehatan	
		Jumlah kesehatan anak sekolah baru	5092	orang	5112	173.000.000	5258	189.800.000	5258	208.480.000	5258	230.128.000	5258	252.840.800	5258	277.724.880	5258	1.331.973.680	Dinas Kesehatan	
		Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan PKPR	4	Puskes mas	4		5		6		7		0,08		0,09		0,09		-Dinas Kesehatan	
		Jumlah nagari yang melaksanakan kesehatan remaja		Nagari			10		10		10		0,11		0,11		0,11		-Dinas Kesehatan	
1 2 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	100	%	100	21.969.250.000	100	20.800.000.000	100	19.500.000.000	100	13.750.000.000	100	29.450.000.000	100	27.550.000.000	100	84.019.250.000	Dinas Kesehatan	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir periode DDMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk																		
		Jumlah Puskesmas rawat inap																		
1 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Puskesmas yang statusnya ditingkatkan menjadi RS	0	unit	-	1	25.000.000.000	0	29.000.000.000	0	5.000.000.000	0	23.000.000.000	0	25.000.000.000	1	69.000.000.000	Dinas Kesehatan		
1 2 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Percentase ketersediaan obat, vaksin dan reagen di sarana pelayanan kesehatan	100	%	100	4.984.494.250	100	6.750.000.000	100	7.250.000.000	100	7.800.000.000	100	8.900.000.000	100	9.400.000.000	44.084.494.250	Dinas Kesehatan		
	Program Jaminan Persalinan	AKI (/ 100.000 KH)	153		330	1.800.000.000	325	1.800.000.000	310	1.800.000.000	305	1.800.000.000	300	1.800.000.000	280	1.800.000.000	280	10.800.000.000	Dinas Kesehatan	
		AKB (/ 1000 KH)	20		22		22		21		21		20		20		20	- Dinas Kesehatan		
	Program Kesehatan Prioritas Nasional	Cakupan Puskesmas yang mendapatkan BOK	100	%	100	3.198.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	25.698.000.000	Dinas Kesehatan		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	%	100	1.483.442.250	100	1.631.786.475	100	1.794.965.123	100	1.974.461.635	100	2.171.907.798	100	2.389.098.578	11.445.661.859	Dinas Kesehatan		
1 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	1	Unit	3	971.990.500	4	1.640.000.000	5	2.999.000.000	5	3.070.000.000	5	3.221.000.000	5	3.723.000.000	5	13.783.990.500	Dinas Kesehatan	
1 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kunjungan Visit Rate Puskesmas 3,5	2,8		2,8	623.352.200	2,85	303.000.000	2,9	322.000.000	2,9	418.000.000	3,2	132.000.000	3,5	683.000.000		- Dinas Kesehatan		
		Percentase KLB ditangani <24 Jam	100	kasus	100		100		100		100		1		1		1	- Dinas Kesehatan		
1 2 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				-		200.000.000		208.000.000		288.000.000		568.000.000		652.000.000		572.000.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		jiwa																
		Jumlah pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin		jiwa		220	200.000.000	230	208.000.000	288	288.000.000	338	568.000.000	350	652.000.000		1.916.000.000			
1 2 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	cakupan sarana yang dibina yang tidak menggunakan bahan berbahaya		%	60		65		65		70		70		75			- Dinas Kesehatan		
		Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dibina			90		90		115		120		120		120			- Dinas Kesehatan		
1 2 xx	Program Peningkatan keterampilan SDM dengan mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam penanganan kasus trauma	Jumlah tenaga medis dan para medis yang mengikuti pelatihan (Dokter, Perawat, Petugas Radiologi, Petugas Terkait)	262	orang	25	180.000.000	25	198.000.000	25	217.800.000	20	239.580.000	20	263.538.000	13	289.891.800	262	1.388.809.800	RSUD	
1 2 xx	program penerapan Public safety centre (PSC)	PSC yang representatif	0	unit	0		-	1	470.000.000		195.000.000		195.000.000		25.000.000		-	1	885.000.000	RSUD
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	unit RSUD terakreditasi versi 2012	0	Unit	0	-	1	123.000.000.000	0	65.000.000.000		50.000.000.000		40.000.000.000	1	40.000.000.000	1	318.000.000.000	RSUD
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			u													- Setda ekbang		
1 3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					244.698.800.000		204.234.000.000		279.115.542.000		235.668.466.078		376.721.221.234		503.295.000.000		1.675.451.808.078		
1 3 A	- PEKERJAAN UMUM					242.688.800.000		200.884.000.000		275.515.542.000		233.068.466.078		372.811.221.234		502.335.000.000		1.672.771.808.078		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif		Unit		19.800.000.000		37.300.000.000		72.000.000.000		17.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000		170.100.000.000	Dinas PU	
1 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kodisi mantap	787,92	KM	40	171.300.000.000	40	91.850.000.000	45	99.150.000.000	45	122.195.466.078	45	254.650.000.000	50	293.900.000.000	265	1.033.045.466.078	Dinas PU	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		panjang jalan baru yang dibangun		km															
		jumlah jembatan yang dibangun		unit															
		Banyaknya Jembatan Permanen	118	Unit	5		10		10		10		15		16		66	Dinas PU	
1 3 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun	15 ribu	M	14.286	20.400.000.000	69	25.300.000.000	75	31.300.000.000	75.000	31.300.000.000	75.000	31.000.000.000	75.000	30.400.000.000	14655	154.700.000.000	Dinas PU
1 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjangnya jalan yang diperbaiki	1035,72	Km	200	10.904.000.000	200	11.304.000.000	200	13.104.000.000	200	24.105.000.000	200	29.436.221.234	200	113.505.000.000	72.827.000.000	Dinas PU	
		Jumlah Jembatan Yang diperbaiki	66	Unit	20		25		25		25		20		10			Dinas PU	
1 3 27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Pleayanan Air Minum		%		3.750.000.000		4.100.000.000		4.250.000.000		4.450.000.000		4.650.000.000		14.650.000.000		25.850.000.000	Dinas PU
		Cakupan {Pleayanan Air Limbah		%														Dinas PU	
1 3 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Cakupan atau Persentase Infrastruktur Perdesaan yang layak				8.000.000.000		11.850.000.000		12.600.000.000		13.850.000.000		13.850.000.000		13.850.000.000		74.000.000.000	Dinas PU
1 3 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan	800	Ha	750	8.534.800.000	850	12.980.000.000	700	36.511.042.000	825	16.268.000.000	650	21.525.000.000	700	18.930.000.000	4475	114.748.842.000	Dinas PU
1 3 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas cadangan air yang terkonversi		Ha		-		550.000.000		600.000.000		400.000.000		250.000.000		700.000.000		2.500.000.000	Dinas PU
1 3 28	Program pengendalian banjir	Pengamanan terhadap bantaran sungai dan pengamanan dari banjir pada musim hujan				-		3.000.000.000		5.000.000.000		2.300.000.000		4.000.000.000		3.000.000.000		17.300.000.000	Dinas PU
1 3 B	- PENATAAN RUANG					2.010.000.000		3.350.000.000		3.600.000.000		2.600.000.000		3.910.000.000		960.000.000		2.680.000.000	
1 1 15	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase ketersediaan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)		%		1.500.000.000		2.350.000.000		2.500.000.000		1.400.000.000		1.360.000.000		360.000.000		2.480.000.000	Dinas PU
	Program Pemanfaatan Ruang	persentase izin pemanfaatan ruang				410.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.450.000.000		500.000.000		100.000.000	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase kasus penataan ruang terselesaikan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		1.100.000.000		100.000.000		100.000.000	
1 4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.980.000.000		1.980.000.000		1.980.000.000		1.980.000.000		1.980.000.000		1.980.000.000		11.880.000.000	
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.		Unit	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	120	1.800.000.000	Dinas PU
1 4 17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Prasarana dan sarana dasar pemukiman.			4	1.680.000.000	4	1.680.000.000	4	1.680.000.000	4	1.680.000.000	4	1.680.000.000	4	1.680.000.000	24	10.080.000.000	Dinas PU
1 5	BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					8.529.987.686		9.040.000.000		11.583.250.250		11.648.750.000		13.808.000.000		12.586.500.000		67.196.487.250	
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kemitraan dengan lembaga lain (sekolah, ormas, parpol, LSM, TNI Polri, Pol PP)	7	lembaga	7	133.786.000	7	370.000.000	7	385.000.000	7	385.000.000	7	405.000.000	7	405.000.000	7	2.083.786.000	Kantor Kesbangpol
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus pekat tertangani (PSK, miras, Narkoba, judi, penرتiban ASN, Pedagang kaki lima				212.736.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		1.337.736.000	Kantor Kesbangpol
		jumlah peserta penyuluhan dan pencegahan pekat (kesbangpol) - miras, narkoba	11	kegiatan	16	212.736.000	16	225.000.000	16	225.000.000	16	225.000.000	16	225.000.000	16	225.000.000	96	1.337.736.000	Kantor Kesbangpol
		jumlah penindakan kasus pekat (pol PP)																Kantor Kesbangpol	
	Program pendidikan politik masyarakat	Jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina	50	organisasi	50	79.465.000	50	225.000.000	50	225.000.000	55	235.000.000	55	235.000.000	60	235.000.000	320	1.234.465.000	Kantor Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kemampuan Personil			2 org	50.000.000	4 org	50.000.000	4 org	50.000.000	4 org	50.000.000	4 org	50.000.000	18 org	250.000.000		500.000.000	Kantor Satpol PP

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDIM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan Wilayah yang meningkat keamanan dan kenyamanan lingkungan		nagari	52	614.000.000	52	625.000.000	52	630.000.000	52	632.500.000	52	735.000.000	52	2.136.500.000		5.373.000.000	Kantor Satpol PP	
	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TIDAK KRIMINAL	cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal		kabupaten	1	35.000.000	1	40.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	1	48.000.000	1	50.000.000		260.000.000	Kantor Satpol PP	
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk																		
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Jumlah Kasus pekat yang tertangani		kasus	36	1.800.000.000	32	2.000.000.000	30	2.200.000.000	28	2.200.000.000	26	2.300.000.000	24	2.300.000.000		12.800.000.000	Kantor Satpol PP	
	Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Pelayanan Pencegahan Bahaya Kebakaran	30	Percentase	10	3.550.000.000	1	2.200.000.000	20	4.505.000.000	25	3.700.000.000	20	6.020.000.000	15	4.345.000.000	100	24.320.000.000	BPBD	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)																		
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tingkat pelayanan penanggulangan bencana alam	25	Percentase	10	990.000.000	10	1.140.000.000	20	1.601.250.000	25	1.701.250.000	20	1.460.000.000	15	1.460.000.000	100	8.352.500.000	BPBD	
	Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam	Tingkat Penanganan dan Rekonstruksi pasca bencana alam	0	Percentase	0,05	350.000.000	0,1	350.000.000	0,15	405.000.000	0,2	460.000.000	0,25	465.000.000	0,25	465.000.000	1	2.495.000.000	BPBD	
	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah kafilah,jemaah haji yang terbina		Orang		686		225.000.700		1.020		1.120		1.250		-			225.004.776	Setda Kesra, 11 kecamatan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat terbina iman dan taqwa	400	orang		715.000.000	520	1.815.000.000	520	1.315.000.250	1 Paket	2.015.000.000	1 Paket	1.865.000.000		715.000.000		8.440.000.250	Setda Kesra	
1 6	BIDANG SOSIAL.					2.095.000.000		2.455.000.000		2.397.000.000		2.397.000.000		2.397.000.000		2.397.000.000		14.138.000.000		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	9539	Jiwa	9539	975.000.000	9539	1.080.000.000	9539	1.180.000.000	9539	1.180.000.000	9539	1.180.000.000	9539	1.180.000.000	9539	6.775.000.000	Dinas Sosnakertrans	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang terlayani rehabilitasi sosial	47	Orang	70	975.000.000	70	1.220.000.000	70	1.062.000.000	70	1.062.000.000	70	1.062.000.000	70	1.062.000.000	420	6.443.000.000	Dinas Sosnakertrans	
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	3	Orsos	3	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	350.000.000	Dinas Sosnakertrans	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Social	Jumlah orsos yang diberdayakan	7	orsos	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	570.000.000	Dinas Sosnakertrans	
1 B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.					25.005.113.483		49.883.304.510		51.759.788.168		49.269.183.859		51.212.403.609		58.326.952.989		271.871.746.619		
1 7	BIDANG TENAGA KERJA					1.293.000.000		2.300.000.000		2.761.000.000		3.295.000.000		3.415.000.000		3.745.000.000		16.809.000.000		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.88	%	66,5	850.000.000	66,64	1.740.000.000	67,03	2.300.000.000	67,44	2.800.000.000	67,86	2.880.000.000	68,29	3.160.000.000	68,29	13.730.000.000	Dinas Sosnakertrans	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angkatan kerja yang tersalurkan	168	Orang	200	188.000.000	250	275.000.000	300	205.000.000	300	230.000.000	350	250.000.000	400	280.000.000	1800	1.428.000.000	Dinas Sosnakertrans	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang tertangani	7	Kasus	7	255.000.000	7	285.000.000	10	256.000.000	10	265.000.000	10	285.000.000	10	305.000.000	54	1.651.000.000	Dinas Sosnakertrans	
1 8	BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELENDUNGAN ANAK					-		485.000.000		500.000.000		550.000.000		590.000.000		630.000.000		2.755.000.000		
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah jenis program untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan	0	Jenis Program	0		3	60.000.000	3	50.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000	3	310.000.000	BPML2NPPKB	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan	0	SKPD	0		6	150.000.000	6	150.000.000	6	155.000.000	6	165.000.000	6	170.000.000	6	790.000.000	BPML2NPPKB	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	25	kasus	0		22	150.000.000	17	150.000.000	13	155.000.000	10	160.000.000	5	165.000.000	3	780.000.000	BPML2NPPKB	
		Rasio KDRT																		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDIM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	persentase perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan	0	persen (%)	0	-	10	125.000.000	20	150.000.000	30	175.000.000	30	200.000.000	30	225.000.000	30	875.000.000	BPML2NPPKB	
1 9	BIDANG PANGAN				1.100.000.000		1.347.000.000		1.404.000.000		1.528.000.000		1.648.500.000		1.809.000.000		8.836.500.000			
	Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.			630.000.000		747.000.000		724.000.000		793.000.000		858.500.000		944.000.000		4.696.500.000	BKP3		
		- Energi	5	6	6		6		6		6		6		6		6			
		- Protein	133	136	140		143		150		151		154		154		154			
		Penguatan Cadangan Pangan.	-	-	30		50		60		70		80		80		80			
		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	70	75	80		83		83		85		85		85		85			
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	70	75	80		83		83		85		85		85		85			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	76	77	79		81		81		83		83		83		83			
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	40	50		60		70		80		85		85		85			
		Penanganan Daerah Rawan Pangan.																-		
		- Rawan Ketersediaan Pangan	28	28	28		28		28		28		28		28		28			
		- Rawan Rumah Tangga Miskin	28	28	28		28		28		28		28		28		28			
		- Rawan gizi kurang	13	22	22		25		25		25		25		25		25			
		Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	-	1	1		1		1		1		1		1		1	6		
	Program peningkatan diversifikasi pangan	Pola kosumsi pangan beragam (konsumsi beras per tahun)		kg/tahun	470.000.000		600.000.000		680.000.000		735.000.000		790.000.000		865.000.000		222	4.140.000.000	BKP3	
1 10	BIDANG PERTANAHAN				518.820.000		631.949.200		584.766.152		701.372.121		591.874.448		627.386.915		3.656.168.837			
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan			518.820.000		551.949.200		584.766.152		621.372.121		591.874.448		627.386.915		3.496.168.837	Setda-Tapem		
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya keteraturan dalam pengadministrasi pertanahan dan pengoptimalan penggunaan tanah			-		80.000.000		-		80.000.000		-		-		-	160.000.000	Setda-Tapem	
1 11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				7.308.680.000		10.095.817.560		9.537.248.216		7.954.559.238		8.834.935.161		9.718.428.675		53.449.668.849			
1 08	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peduli sampah	11	Kelompok	14	1.810.000.000	16	3.238.000.000	30	3.278.600.000	33	1.183.646.200	42	1.302.010.820	46	1.432.211.902	#NAME?	12.244.468.922		
1 08	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan yang dibina dan diawasi	10	Usaha/Kegiatan	13	3.095.000.000	18	2.262.850.410	18	1.264.384.351	18	1.277.222.786	18	1.496.520.065	18	1.646.172.070	#NAME?	11.042.149.682	BLH	
1 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Alam	Jumlah kawasan SDA yang dikonservasi dan dilindungi	0	Kawasan	2	650.000.000	4	1.252.960.700	6	1.408.256.770	7	1.549.082.447	7	1.703.990.691	7	1.874.389.760	#NAME?	8.438.680.368	BLH	
1 08	Program Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan Sumber daya alam	Luas lahan konservasi yang telah direhabilitasi	0	Ha	100	1.155.000.000	100	1.332.000.000	100	1.375.000.000	100	1.512.500.000	100	1.663.750.000	100	1.830.125.000	#NAME?	8.868.375.000	BLH	
1 08	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup	Jumlah dokumen terkait dengan SDA dan LH	14	Dokumen	4	368.680.000	4	284.006.450	4	312.407.095	4	343.647.805	4	371.357.585	4	408.493.343	#NAME?	2.088.592.277	BLH	
1 08	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kelompok sasaran pengendalian polusi	0	Klip	2	200.000.000	2	1.696.000.000	2	1.865.600.000	2	2.052.160.000	2	2.257.376.000	2	2.483.113.600	#NAME?	10.554.249.600	BLH	
1 08	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kelompok pengelola RTH	0	klp	1	30.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	#NAME?	213.153.000	BLH	
		Luas RTH yang terbangun	25	%	5%		12%		12%		20%		28%		20%		97%		Dinas PU	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDIM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1 12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				104.051.000		145.000.000		190.000.000		210.000.000		230.000.000		250.000.000		1.129.051.000			
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	100	Percentase	100	104.051.000	100	145.000.000	100	190.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	250.000.000	100	1.129.051.000	Disdukcapil	
		Rasio bayi berakte kelahiran	13	persibu	100	80.820.000	100	82.000.000	100	45.000.000	100	52.000.000	100	59.000.000	100	65.000.000	100	383.820.000	Disdukcapil	
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	90,93	Percentase	91	122.775.000	93	235.000.000	95	246.000.000	96	250.000.000	97	262.000.000	98	270.000.000	98	1.385.775.000	Disdukcapil	
		Rasio penerbitan akta kematian	12	Percentase	26	56.323.000	48	65.000.000	56	72.000.000	62	79.000.000	70	85.000.000	78	90.000.000	78	447.323.000	Disdukcapil	
1 13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.085.835.450		5.469.837.500		6.447.737.500		7.290.337.500		7.598.837.500		7.332.400.000		21.939.985.450			
	Program Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari	Optimalisasi pelaksanaan managemen pemerintahan nagari		%	50	150.000.000	55	131.000.000	60	112.000.000	65	113.000.000	70	89.000.000	75	85.000.000	80	680.000.000	Setda-Tapem	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang Dibina	0	Orang	0	135.594.950	1238	1.399.500.000	1238	1.522.400.000	1238	1.641.500.000	1238	1.752.500.000	1238	1.752.500.000	1238	8.203.994.950	BPML2NPPKB	
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan	0	Lembaga	22	172.449.500	36	610.837.500	36	704.837.500	36	742.337.500	36	773.837.500	36	781.400.000	36	3.785.699.500	BPML2NPPKB	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	52	Kelompok	0	203.500.000	52	203.500.000	52	203.500.000	52	203.500.000	52	203.500.000	52	203.500.000	52	1.221.000.000	BPML2NPPKB, Setda Tapem, 11 Kecamatan	
	Program Peningkatan Keberadaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	Jumlah nagari dengan pelayanan prima	1	Nagari	1	274.291.000	5	2.745.000.000	52	3.545.000.000	52	4.205.000.000	52	4.395.000.000	52	4.080.000.000	52	5.959.291.000	BPML2NPPKB	
	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah nagari yang dilatih	0	Orang	0	150.000.000	156	380.000.000	210	360.000.000	210	385.000.000	210	385.000.000	210	430.000.000	210	2.090.000.000	BPML2NPPKB	
1 14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.062.815.200		5.014.000.250		5.518.636.300		6.039.500.000		6.635.900.000		6.327.500.000		31.598.351.750			
	Program Keluarga Berencana	Rasio akseptor KB	65,3	persen	66	1.844.764.200	67	4.267.335.850	70	4.558.639.000	72	4.812.000.000	75	5.105.400.000	80	4.380.500.000	80	24.968.639.050		
		Jumlah pengelola dan kader KB yang ditingkatkan SDM nya	52503	Orang	359		422		422		422		422		422		422		-	BPML2NPPKB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kelompok kegiatan PIK R/M	25	Kelompok	25	48.531.500	25	53.164.400	35	63.797.300	45	68.000.000	60	72.000.000	70	80.000.000	70	385.493.200	BPML2NPPKB	
	Program Pengembangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang terintegrasi	0	Kelompok	0	-	11	396.000.000	33	543.200.000	66	698.500.000	99	879.500.000	150	1.165.000.000	359	3.682.200.000	BPML2NPPKB	
		Jumlah Lembar Kartu Tumbuh Kembang Anak (KKA) bagi keluarga Bina Keluarga Balita (BKB)	40	Lembar	0	0	5500		6000		6500		7000		7600		7600		-	BPML2NPPKB
		Pembentukan dan Pengembangan BKB terintegrasi	7	Kelompok	0	0	10		20		35		45		65		175		-	BPML2NPPKB
		Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang dibina	165	Kelompok	0	0	165		170		240		276		340		1191		-	BPML2NPPKB
		Jumlah kelompok peserta KB yang ditingkatkan Pendapatan Keluarganya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS)	28	Kelompok	0	0	28		30		35		40		56		189		-	BPML2NPPKB
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase permintaan Masyarakat terhadap kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi yang telah dipenuhi	0,65	akseptor	6292	169.519.500	6695	236.000.000	6797	260.000.000	6881	285.000.000	7048	320.000.000	7221	355.000.000	7271	1.625.519.500	BPML2NPPKB	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode PMDN		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat	Jumlah kelompok yang telah mendapatkan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat tentang program KB / KS	0	kelompok	0	-	180	61.500.000	260	93.000.000	280	176.000.000	300	259.000.000	335	347.000.000	350	936.500.000	BPML2NPPKB
1 15	BIDANG PERHUBUNGAN				5.377.275.233		8.086.000.000		4.291.000.000		4.741.000.000		2.356.000.000		7.279.870.249		32.131.145.483		
2 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	jumlah pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	6		2	795.000.000	4	2.766.000.000		666.000.000		366.000.000		166.000.000		166.000.000	11	4.925.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	jumlah kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	2		2	-	2	200.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	800.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	jumlah angkutan darat	6.049	unit	7000	495.000.000	8000	620.000.000	9000	525.000.000	10.000	575.000.000	11.000	590.000.000	12.000	570.000.000	#####	3.375.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah jenis pembangunan sarana da prasarana perhubungan		jenis	1	1.437.275.233	4	3.300.000.000	4	1.800.000.000	4	2.900.000.000	4	800.000.000	4	5.143.870.249	21	15.381.145.483	Dinas Hubkominfoparbud
2 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	jumlah kasus kecelakaan di kabupaten dharmasraya	53	kasus	50	1.050.000.000	45	1.050.000.000	40	1.050.000.000	35	550.000.000	30	550.000.000	25	1.050.000.000	225	5.300.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kepemilikan KIR	3738	unit	4000	1.600.000.000	4200	150.000.000	4400	150.000.000	4600	150.000.000	4800	150.000.000	5000	150.000.000	5000	2.350.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
1 16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				171.132.000		1.795.000.000		4.065.000.000		3.235.000.000		3.445.000.000		3.475.000.000		16.186.132.000		
2 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	meningkatnya kualitas jaringan dan aplikasi pengembangan e-government			0	-	3	240.000.000	55	2.890.000.000	35	1.890.000.000	15	1.890.000.000	15	1.890.000.000	123	8.800.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM			2	36.228.000	1006	235.000.000	1006	235.000.000	3007	255.000.000	5007	300.000.000	5007	310.000.000	5	1.371.228.000	Dinas Hubkominfoparbud
2 18	Program kerjasama informasi dan media massa	terwujudnya Master Plan Penataan Menara telekomunikasi (BTS) dan Monitoring Sarana dan Prasarana telekomunikasi	0		4	42.772.000	5	605.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000	4	95.000.000	25	977.772.000	Dinas Hubkominfoparbud
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayan informasi			54	92.132.000	139	610.000.000	197	750.000.000	197	880.000.000	196	1.030.000.000	979	1.030.000.000		4.392.132.000	Dinas Hubkominfoparbud
	Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi	Terwujudnya pengendalian dan pembinaan bidang pos dan telekomunikasi	0		0	-	6	105.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6	140.000.000	6	150.000.000	30	645.000.000	Dinas Hubkominfoparbud
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	meningkatkan sinergitas program kegiatan																- Dinas Hubkominfoparbud	
1 17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.075.000.000		1.365.000.000		1.568.000.000		1.765.000.000		1.962.000.000		2.114.000.000		9.849.000.000		
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	113	koperasi	114	245.000.000	115	375.000.000	116	458.000.000	117	535.000.000	120	602.000.000	123	664.000.000	54,27	2.879.000.000	Dinas Koperindag
	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jumlah kopeasi berkualitas	8	koperasi	10	415.000.000	12	495.000.000	14	555.000.000	16	615.000.000	18	680.000.000	20	725.000.000	20	3.485.000.000	Dinas Koperindag
		Jumlah koperasi sehat	5	koperasi	6	-	7	-	8	-	9	-	10	-	11	-	11	-	Dinas Koperindag
		Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha	335	UMKM	377	-	402	-	427	-	452	-	477	-	502	-	502	-	
		UMKM mikro naik kelas	0		5	-	10	-	15	-	20	-	25	-	30	-	30	-	
1 18	BIDANG PENANAMAN MODAL				665.000.000		1.666.500.000		1.336.400.000		1.440.415.000		2.057.356.500		1.533.367.150		8.699.038.650		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	137	miliar rupiah	150	165.000.000	150	746.500.000	150	351.650.000	150	384.615.000	150	918.576.500	xxx	305.734.150		2.872.075.650	BP2MPBJ
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	50	buah	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	90	-	
	Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Promosi dan kerjasama yang dilaksanakan	5	kali	0	500.000.000	2	920.000.000	2	984.750.000	2	1.055.800.000	2	1.138.780.000	2	1.227.633.000	10	5.826.963.000	BP2MPBJ
1 19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				3.780.035.600		8.344.200.000		9.455.000.000		7.275.000.000		7.430.000.000		10.035.000.000		46.319.235.600		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDPM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabang olah raga yang dibina	23	Cabor	24	2.089.671.800	0	5.229.200.000	24	4.990.000.000	0	5.110.000.000	24	5.265.000.000	0	7.570.000.000	24	30.253.871.800	Dinas Pendidikan, 11 kecamatan	
		Peringkat tingkat Propinsi / Nasional	8		8		7		6		5		4		3		3		- Dinas Pendidikan	
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Paskibraka Tingkat Provinsi / Nasional	2	Orang	2	675.550.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	12	4.175.550.000	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan olahraga	23	Unit	23	779.813.800	23	2.150.000.000	24	3.500.000.000	24	1.200.000.000	25	1.200.000.000	25	1.500.000.000	144	10.329.813.800	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Sarana Olahraga	1	Unit	1		1		1		1		1		1		6		- Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dilatih	65	Orang	65	145.000.000	65	145.000.000	65	145.000.000	65	145.000.000	65	145.000.000	65	145.000.000	390	870.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah Pemuda produktif berprestasi	0	Orang	50	90.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	300	690.000.000	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pengurus Organisasi pemuda yang terbina																- Setda Kesra		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemasarakan olahraga																- Setda Kesra		
1 20	BIDANG STATISTIK					75.000.000		78.000.000		81.000.000		84.000.000		87.000.000		90.000.000		495.000.000		
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data statistik sektoral	43	persen	57	75.000.000	63	78.000.000	72	81.000.000	81	84.000.000	88	87.000.000	91	90.000.000	95	495.000.000		
1 21	BIDANG PERSANDIAN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000				
	Program persandian daerah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	0	kegiatan	0	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	300.000.000	Kominfo	
		Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	0	persen	0		10		15		20		25		30		30			
1 22	BIDANG KEBUDAYAAN					150.000.000		2.230.000.000		2.840.000.000		1.960.000.000		3.070.000.000		2.080.000.000		12.330.000.000		
2 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	jumlah event pengembangan budaya nilai lokal	2	event			9	300.000.000	10	410.000.000	13	330.000.000	11	340.000.000	14	350.000.000	57	1.730.000.000	Dinas Hubkominfoparbud	
2 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3	jenis			2	500.000.000	3	900.000.000	3	100.000.000	3	1.100.000.000	3	100.000.000	14	2.700.000.000	Dinas Hubkominfoparbud	
2 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah sanggar seni yang dibina	35	sanggar	40	50.000.000	45	900.000.000	50	1.100.000.000	55	1.100.000.000	60	1.200.000.000	65	1.100.000.000	315	5.450.000.000	Dinas Hubkominfoparbud	
2 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	kerjasama dengan kelembagaan budaya		buah			4	280.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	4	180.000.000	4	280.000.000	20	1.100.000.000	Dinas Hubkominfoparbud	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Jumlah Lembaga adat yang dikembangkan	0	Lembaga (LKAAM, KAN,AB S-SBK, Hukum Adat)	1 Lembaga (LKAAM)	100.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	1.350.000.000	BPML2NPPKB	
1 23	BIDANG PERPUSTAKAAN					148.469.000		730.000.000		1.040.000.000		1.060.000.000		1.120.000.000		1.155.000.000		5.253.469.000		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Binaan	27.788	orang	14.000	148.469.000	14.000	730.000.000	50.000	1.040.000.000	60.000	1.060.000.000	70.000	1.120.000.000	80.000	1.155.000.000		5.253.469.000	KPAD	
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah																		
1 24	BIDANG KEARSIPAN.					40.000.000		50.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		75.000.000		435.000.000		
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah JRA substantif yang tersusun	-	urusan	-	40.000.000	3	50.000.000	15	90.000.000	15	90.000.000	15	90.000.000	10	75.000.000		435.000.000	KPAD	
2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					73.991.865.871		78.502.439.063		126.020.839.600		233.233.499.112		183.840.104.574		236.557.270.384		773.028.671.253		
2 1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.215.069.750		3.230.795.000		3.720.000.000		4.174.000.000		4.531.000.000		4.979.000.000		23.849.864.750		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDIM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan	19.909	Ton	20.109	2.455.795.000	20.209	2.525.795.000	20.409	2.930.000.000	20.609	3.384.000.000	20.809	3.711.000.000	20.809	4.209.000.000	#####	19.215.590.000	Dinas Nakkan	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Jml kelompok binaan yg berbadan hukum	3	klpk	0	616.000.000	10	430.000.000	40	480.000.000	60	480.000.000	60	480.000.000	60	480.000.000	231	2.966.000.000	Dinas Nakkan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya perairan	Produksi Perikanan Tangkap	235,4	Ton	231	56.274.750	226	65.000.000	220	70.000.000	210	70.000.000	199	70.000.000	197	70.000.000	197	401.274.750	Dinas Nakkan	
	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan perikanan	2.112	Kg	2.500	87.000.000	3.000	210.000.000	3.000	240.000.000	3.000	240.000.000	3.500	270.000.000	3.500	220.000.000	3.500	1.267.000.000	Dinas Nakkan	
2 2	BIDANG PARIWISATA				645.000.000	2.450.000.000		3.500.000.000		4.080.000.000		2.780.000.000		2.580.000.000		16.035.000.000				
15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi wisata	23	lokasi	23	495.000.000	25	1.800.000.000	26	2.000.000.000	26	2.100.000.000	26	2.150.000.000	26	2.150.000.000	152	10.695.000.000	Hubkominfoparbud	
16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah kawasan wisata yang dikembangkan	0	kawasan	2	150.000.000	2	150.000.000	3	900.000.000	3	1.430.000.000	3	130.000.000	3	130.000.000	16	2.890.000.000	Hubkominfoparbud	
17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	0	MOU	-	402	500.000.000	404	600.000.000	403	550.000.000	402	500.000.000	300	300.000.000	1911	2.450.000.000	Dinas Hubkominfoparbud		
2 3	BIDANG PERTANIAN				39.627.448.650	38.293.843.670		41.226.039.200		44.034.498.705		47.659.104.160		59.733.970.150		236.412.904.535				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya SDM dan Kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (penyuluh Pertanian)	124	Org	258	320.000.000	462	631.000.000	317	398.000.000	317	408.000.000	322	425.000.000	322	425.000.000	1.998	2.607.000.000	BKP3	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya ketrampilan petugas dan petani dalam penerapan teknologi	0	org	40	42.000.000	0	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	200	262.000.000	BKP3	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan di lapangan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat lapangan	287		176	2.496.000.000	241	6.895.000.000	203	6.455.000.000	146	5.162.000.000	217	6.020.000.000	158	6.178.000.000	1.141	33.206.000.000	BKP3	
	Program peningkatan kelembagaan petani	Jumlah kelompok tani tarlatih	12	kelompok	4	55.000.000	24	165.000.000	26	180.000.000	36	210.000.000	36	230.000.000		300.000.000	122	1.140.000.000	Dinas Pertanian	
	Sub Sektor tanaman pangan dan hortikultura																		-	
	Program Penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian Tanaman Pangan	Cakupan sarpras dan infrastruktur pertanian pada kawasan pertanian tanaman pangan	11	Kecamatan	11	15.210.000.000	11	10.470.000.000	11	11.290.000.000	11	13.575.000.000	11	14.325.000.000		22.057.000.000	11	64.870.000.000	Dinas Pertanian	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi beras terregister dan terpacking yang dipasarkan	0	ton	3	60.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	850.000.000	10	870.000.000		1.475.000.000	50	3.180.000.000	Dinas Pertanian	
	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Produksi tanaman pangan (padi : 70.169 Ton, jagung = 0 Ton , luas areal hortikultura (duku, salak, jeruk, bawang dataran rendah, cabe dan durian)	padi : 70.169 Ton, jagung = 0 Ton , luas areal hortikultura = 0	Ton dan hektar	padi : 66.555 ton, jagung : 6 ton, luas areal hortikultura : 41 Ha	5.882.000.000	padi : 69.883 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	7.680.000.000	padi : 73.377 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	6.865.000.000	padi : 77.046 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	7.595.000.000	padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	8.280.000.000	padi : 80.898 ton, jagung : 6 ton, luas hortikultura : 42 Ha	10.320.000.000	padi : 367.760 ton, Jagung : 30 ton, luas hortikultura : 209 Ha	36.302.000.000	Dinas Pertanian	
	Program peningkatan mutu nilai tambah daya saing produk hasil pertanian	Jumlah komoditi pertanian berkualitas yang dipamerkan	5	komoditi	5	80.000.000	6	280.000.000	6	140.000.000	6	350.000.000	6	160.000.000		310.000.000	6	1.010.000.000	Dinas Pertanian	
	Sub Sektor Peternakan																		-	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode DDIM			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	populasi ternak sapi	40.785	Ekor	41.601	595.654.000	42.433	1.395.654.000	43.281	4.050.000.000	44.147	3.950.000.000	45.030	4.200.000.000	45.931	4.500.000.000	#####	18.691.308.000	Dinas Nakkan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kasus penyakit ternak yang tertangani	950/4.000	kasus/ekor	900/3.892	580.850.150	855/3.697	626.050.150	837/3.623	1.075.899.700	728/3.514	1.257.259.205	706/3.409	1.001.454.660	685/3.307	1.156.569.650	685/3.307	5.698.083.515	Dinas Nakkan	
	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	cakupan Pangan Asal Hewan (PAH) higienis yang diawasi	5	jenis	3	166.139.500	6	206.139.500	6	231.139.500	6	251.139.500	6	275.139.500	6	327.139.500	6	1.456.837.000	Dinas Nakkan	
	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	Produksi olahan Peternakan	112.360	Ton	120.000	150.000.000	150.000	565.000.000	175.000	410.000.000	175.000	205.000.000	180.000	205.000.000	180.000	205.000.000	6	1.740.000.000	Dinas Nakkan	
	Program Penitkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana Pemasaran dan distribusi hasil peternakan dan Perikanan	8	Unit	1	340.000.000	1	250.000.000	1	240.000.000	0	120.000.000	1	420.000.000	0	120.000.000	12	1.490.000.000	Dinas Nakkan	
	Program Peningkatan kemampuan Kelompok Peternakan dan Pokdakan	Jml kelompok binaan yg berbadan hukum	3	klpk	0	-	10	220.000.020	20	110.000.000	30	117.000.000	30	260.000.000	30	280.000.000	128	987.000.020	Dinas Nakkan	
	Sub sektor perkebunan																		Dinas Hutbun	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan	Luas lahan yang dikendalikan hama penyakitnya (Ha)	30	ha	50	100.000.000	50	400.000.000	50	440.000.000	50	484.000.000	50	532.400.000	50	585.640.000	#NAME?	2.542.040.000	Dinas Hutbun	
	Program peningkatan produksi Perkebunan	Jumlah bantuan bibit unggul	37500	batang	32.150	2.022.821.000	30.000	2.810.000.000	30.000	3.091.000.000	30000	3.400.100.000	30000	3.740.110.000	30000	4.114.121.000	#NAME?	19.178.152.000	Dinas Hutbun	
	Program peningkatan sarana dan prasana Perkebunan	Panjang pembangunan jalan produksi perkebunan (km)	75	km	100	11.526.984.000	50	5.000.000.000	50	5.500.000.000	50	6.050.000.000	50	6.655.000.000	50	7.320.500.000	#NAME?	42.052.484.000	Dinas Hutbun	
2 4	BIDANG KEHUTANAN																			
2 5	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							7.610.347.350												
	Program Pemantauan dan Monitoring Bidang Pertambangan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi pemantauan dan monitoring		IUP	15 IUP	57.584.100	17	62.000.000	18	65.000.000	20	68.000.000	22	70.000.000	23	75.000.000	100	397.584.100	Dinas ESDM	
	Program Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan jaringan listrik pada daerah -daerah terpencil.				1.305.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.305.000.000	Dinas ESDM	
	Program Fasilitasi Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan PJU stang dan		unit		6.134.022.350	2	700.000.000	4	1.400.000.000	6	1.800.000.000	8	2.400.000.000	10	3.000.000.000	30	15.434.022.350	Dinas ESDM	
	Program Pemantauan dan Monitoring Pendistribusian BBM dan Gas	Tersedianya data pendistribusian Migas di Dharmasraya				60.079.900	75	63.000.000	75	65.000.000	75	67.000.000	75	70.000.000	75	75.000.000	75	400.079.900	Dinas ESDM	
	Program Pemantauan dan Monitoring pengelolaan air tanah dan bencana alam geologi	Meningkatnya mutu pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha air tanah komersial serta bertambahnya				53.661.000	15	107.000.000	15	113.000.000	15	122.000.000	15	130.000.000	15	140.000.000	293	665.661.000	Dinas ESDM	
2 6	BIDANG PERDAGANGAN					21.144.000.121		30.312.800.393		74.714.800.400		170.165.000.407		125.670.000.414		161.319.300.234		467.175.901.968		
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTPP yang diterapkan ulang	2000	UTPP	2500	450.000.000	2510	450.000.000	2515	500.000.000	2520	500.000.000	2525	500.000.000	2530	550.000.000	2530	2.950.000.000	Dinas Koperindag	
		Jumlah kasus barang tidak layak edar/ tidak layak konsumsi		kasus	5		5		5		5		5		5		5			
		Persentase distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	100	persen	100		100		100		100		100		100		100			
	Program peningkatan sarana dan prasaraan pasar	Persentase pasar dalam kondisi baik	19,44	persen	22,22	20.694.000.121	25	29.862.800.393	27,78	74.214.800.400	30,56	169.665.000.407	33,33	125.170.000.414	36,11	160.769.300.234	36,11	464.225.901.968	Dinas Koperindag	
2 7	BIDANG PERINDUSTRIAN					1.475.000.000		3.840.000.000		2.385.000.000		10.205.000.000		2.525.000.000		7.170.000.000		26.405.000.000		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	jumlah IKM yang dikembangkan	85	IKM	125	1.395.000.000	165	3.610.000.000	205	1.885.000.000	245	2.125.000.000	285	2.445.000.000	325	6.850.000.000	325	17.115.000.000	Dinas Koperindag	
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Jumlah industri produksi olahan hasil pertanian/ perkebunan	10	industri	20	80.000.000	20	155.000.000	20	250.000.000	20	4.080.000.000	20	80.000.000	20	320.000.000	120	4.965.000.000	Dinas Koperindag	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah IKM dengan keragaman produk olahan industri hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan	10	IKM	20		20		20		20		20		20		120		Dinas Koperindag	
2 8	BIDANG TRANSMIGRASI				275.000.000		375.000.000		475.000.000		575.000.000		675.000.000		775.000.000		3.150.000.000			
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan	1	UPT	1	275.000.000	2	375.000.000	2	475.000.000	2	575.000.000	2	675.000.000	2	775.000.000	2	2.575.000.000	Dinas Sosnakertrans	
3	URUSAN PENUNJANG				32.908.186.300		41.317.840.225		24.756.749.425		29.688.829.057		30.785.418.606		54.426.040.493		161.585.317.287			
3 1	BIDANG PERENCANAAN				6.673.841.000		1.855.213.150		2.103.273.808		5.254.437.498		5.850.759.373		7.806.613.341		22.444.138.170			
	Program Pengembangan data/informasi	Cakupan data pembangunan tersedia	43	persen	60	392.058.000	65	211.000.000	75	215.000.000	80	220.000.000	83	230.000.000	85	235.000.000		1.203.058.000	Bappeda, Setda Ekbang	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90	dokumen	95	2.608.621.000	97	954.213.150	100	1.196.273.808	100	2.839.437.498	100	3.220.759.373	100	4.986.297.341		9.005.602.170	Bappeda, Setda-organisasi/tapem	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	cakupan kebijakan bidang ekonomi	60	persen	65	1.173.162.000	70	150.000.000	80	150.000.000	85	600.000.000	85	650.000.000	85	650.766.000		3.373.928.000	Bappeda	
	Program perencanaan sosial budaya	cakupan kebijakan bidang Sosial Budaya	65	persen	70	1.250.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	85	700.000.000	90	750.000.000	90	864.000.000		4.064.000.000	Bappeda	
	Program Perencanaan Fisik dan prasana	cakupan kebijakan bidang Fisik dan Prasarana	80	persen	85	1.250.000.000	85	250.000.000	90	250.000.000	90	850.000.000	90	950.000.000	95	1.070.550.000		4.620.550.000	Bappeda, Setda-Ekbang	
	Program Kerjasama Pembangunan				-		40.000.000		42.000.000		45.000.000		50.000.000		-		-	177.000.000	Setda ekbang	
3 2	BIDANG KEUANGAN				4.601.171.000		5.532.888.000		4.245.017.000		4.687.207.000		4.864.229.000		6.048.066.000		29.978.578.000			
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan setiap tahun	496	Dok		2.890.283.000	496	3.346.888.000	496	3.471.167.000	496	3.851.449.000	496	3.961.613.000	496	5.073.241.000		22.594.641.000	DPPKD/ Setda _ase	
		persentase pelaks, pengelolaan keuangan daerah	95																	
	program peningkatan dan pengembangan PAD	persentase capaian PAD	80			1.710.888.000		2.186.000.000		773.850.000		835.758.000		902.616.000		974.825.000		7.383.937.000		
3 3	BIDANG KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.395.346.300		4.175.000.000		4.138.000.000		3.570.000.000		3.560.000.000		3.188.000.000		20.026.346.300			
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan	369	orang	31	328.943.000	110	2.075.000.000	110	2.075.000.000	67	1.475.000.000	67	1.475.000.000	60	1.075.000.000	639	8.503.943.000	BKD	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas ASN	1070	orang	80	54.964.000	250	870.000.000	245	840.000.000	245	840.000.000	245	840.000.000	260	855.000.000	2395	4.299.964.000	BKD	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang dibina dan dikembangkan serta terdata	11794	orang	1539	1.011.439.300	1832	1.230.000.000	1675	1.223.000.000	1920	1.255.000.000	1750	1.245.000.000	1731	1.258.000.000	19584	7.222.439.300	BKD	
3 4	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		300.000.000			
	Program peningkatan penelitian dan pengembangan	peningkatan penelitian dan pengembangan IPTEK	0	persen	0	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	#####	50.000.000	#####	50.000.000	5E+07	300.000.000	Bappeda	
3 5	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				20.187.828.000		29.704.739.075		14.220.458.618		16.127.184.559		16.460.430.233		37.333.361.152		88.836.254.818			
	- BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, DAN PERANGKAT DAERAH				20.187.828.000		29.704.739.075		14.220.458.618		16.127.184.559		16.460.430.233		37.333.361.152		88.836.254.818			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				90	persen	90	7.281.087.000	90	7.776.930.700	90	6.884.205.350	95	8.874.572.427	95	8.818.173.909	95	9.193.526.616	4438954182	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan		persen		274.923.000		610.000.000		1.380.000.000		825.000.000		890.000.000		1.080.000.000		5.059.923.000	Setda Hukum&ORG	
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	(koordinasi dengan inspektorat)				33.205.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		600.000.000		- Setda Hukum&ORG		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				180.000.000		210		225		240		365		215		180.001.255	Setda Hukum&ORG		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				150.000.000		165		175		185		230		-		150.000.755	Setda Hukum&ORG		
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	tertata ny administrasi wilayah di Kab. Dharmasraya			1.416.829.000		681.829.000		551.829.000		576.829.000		775.000.000		740.000.000		4.742.316.000	Setda-Tapem		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome Indikator Kinerja Program)	Kondisi Awal (2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode DDMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan di Kecamatan				40.000.000			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	240.000.000	Setda-Tapem
	Program Pengembangan manajemen Pelayanan Publik					90.061.000			90.061.000		90.061.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	570.183.000	Setda-Tapem
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Meningkatnya koordinasi Pemda dengan berbagai unsur			145.000.000			370.000.000		376.000.000		382.000.000		390.000.000		400.000.000	2.063.000.000	Setda-Tapem	
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah			921.583.000			1.222.922.000		1.181.894.000		1.363.117.000		1.226.646.000		1.469.045.000	7.385.207.000	Setda-Aset	
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan kapasitas kompetensi Anggota DPRD	Perda	15	6.946.830.000	11	15.406.119.500	9	-	9	-	10	-	54	22.352.949.500	-	44.705.899.000		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten	92,86	%	94	137.635.000	95	158.520.000	96	166.446.000	97	174.768.300	98	183.506.715	98	-	98	820.876.015	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan kasus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten	85	%	85	1.066.189.000	85	1.175.924.000	90	1.234.720.200	90	1.296.456.210	90	1.361.279.021	90	-	90	6.134.568.431	Inspektorat
	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah	0	%	50	268.313.000	50	715.288.650	50	751.053.083	60	788.605.737	60	828.036.023	70	-		3.351.296.493	Inspektorat
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase peningkatan kemampuan SDM	82,85	persen	83	475.495.000	83	475.495.000	85	499.269.750	85	524.233.238	85	550.444.899	85	-	85	2.524.937.887	Inspektorat
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah	100	persen	100	31.678.000	100	33.178.000	100	35.661.900	100	38.352.495	100	41.268.370	100	24.157.650	100	204.296.415	Inspektorat
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	100	persen	100	729.000.000	100	908.470.850	100	989.317.935	100	1.098.249.729	100	1.206.074.701	100	1.333.682.171	100	6.264.795.386	BP2MPBJ
TOTAL					465.312.764.090	625.442.135.698		683.758.750.757		731.270.576.995		898.539.019.687		1.111.807.260.582			3.827.579.234.520		

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan pencapaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dari pelaksanaan kegiatan (*output/keluaran*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) mencakup akumulasi keluaran dan berbagai efek pembangunan.

Pengukuran kinerja pembangunan mengukur kinerja daerah secara berkelanjutan sebagai umpan balik untuk mencapai target kinerja di masa mendatang. Dengan adanya informasi terukur pencapaian kinerja maka pemerintah daerah dapat mengukur kinerjanya secara obyektif dalam periode waktu tertentu sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan.

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator hasil program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

9.1. PENENTUAN INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target dihasilkan dari pencapaian kegiatan atau program tertentu dengan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan terdapat juga yang merupakan pencapaian akumulasi lintas perangkat daerah. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan dari indikator kinerja perangkat daerah. Akan tetapi meskipun menjadi acuan oleh perangkat daerah, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan dari perangkat daerah.

Indikator kinerja dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator tahun sebelumnya. Pencapaian pembangunan yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, DPRD dan masyarakat umumnya yang tentunya tidak akan terlaksana secara baik tanpa adanya dukungan kemampuan perangkat daerah, partisipasi masyarakat serta potensi pembiayaan pembangunan yang dimiliki oleh daerah.

9.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan

dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2016 sampai 2021. Sebagai referensi atau analisis dapat digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai perbandingan.

Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART). Spesifik dapat diterjemahkan sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah. Relevan (*relevant*) karena telah menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*time bond*) kedalam batasan periode tahun 2016 - 2021 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continously improve*) karena merupakan akumulasi pencapaian target bertahap setiap tahunnya selama lima tahun RPJMD.

Berikut ini ditampilkan matriks penetapan indikator kinerja daerah terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
IPM		70,23	70,42	70,66	70,71	70,88	71,20
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Nilai LAKIP	CC	B	B	B	BB	BB	
A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Indikator Ekonomi Makro (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian)						
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,00	6,15	6,27	6,40	6,50	6,60
1.2.	Laju inflasi provinsi	6,87	5,46	5,46	5,46	5,46	4,92
1.3.	PDRB per kapita	38.773.765	41.909.780	45.225.388	48.757.581	52.499.873	56.494.730
1.4.	Indeks Gini *	-	-	-	-	-	-
1.7.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan)	5,66	5,03	4,43	3,86	3,32	2,81
	Laju pertumbuhan penduduk	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pendidikan						
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,06	8,10	8,13	8,18	8,26	8,35
1.3.	Angka partisipasi kasar	-	-	-	-	-	-
	- APK SD/MI/Paket A	110,19	110,12	110,07	110,03	109,98	109,92
	- APK SMP/MTs/Paket B	77,50	78,60	81,20	82,40	83,00	84,20
1.5.	<i>Angka Partisipasi Murni</i>	-	-	-	-	-	-
	- APM SD/MI	90,05	93,21	95,34	97,65	98,76	99,74
	- APM SMP/MTs	61,32	62,87	64,78	75,89	80,53	83,65
2.	Kesehatan						
2.1.	Angka kematian bayi (AKB)	18,75	17,24	15,78	14,29	12,94	11,63
	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	330	325	310	305	300	280
	Akaba	30	28	25	24	23	22
2.2.	Angka usia harapan hidup	69,80	69,82	69,84	69,86	69,88	69,90
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,44	0,41	0,35	0,27	0,21	0,15
4.	Ketenagakerjaan						
4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	72	74	75	77	79
1.	Kebudayaan						
1.1.							
1.2.							
B. ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan pemerintahan wajib						
1.A	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar						
1	Bidang pendidikan						
	- Rasio guru/murid SD/MI*	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
	- Rasio guru/murid SMP/MTs*	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
	- Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)*	707	684				
	- Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)*	1.508	1.542				
1.3.	<i>Fasilitas Pendidikan:</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>cakupan akses/jangkauan SMP sesuai standar</i>						
1.3.1.	Persentase ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	74,21	76,01	77,81	79,61	81,42	85,02
1.3.2.	Persentase ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,40	82,01	83,61	85,21	86,81	90,01
1.4.	<i>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</i>						
1.4.1.	APK PAUD	56	59	63	66	69	73
1.5.	<i>Angka Putus Sekolah:</i>	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	Jumlah siswa Putus Sekolah (APS) SD/MI*						
1.5.2.	Jumlah siswa Sekolah (APS) SMP/MTs*						
1.6.	<i>Angka Kelulusan:</i>						
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV*						
2	Bidang kesehatan						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	9,88	9,76	9,70	9,70	9,65	9,62
2.2.	Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,348	0,245	0,246	0,243	0,240	0,236
	<i>cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	80	82	84	86	88	90
	<i>unit RSUD terakreditasi versi 2012</i>					1	1
	<i>PSC yang representatif</i>					1	1
	Jumlah Puskesmas rawat inap	6	7	8	9	10	11
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32	0,33
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,63	2,55	2,61	2,65	2,70	2,66
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	72	73	74	74	75	77
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	69	69	70	70	71	71
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85	87	88	90	92	94
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
	<i>Prevalensi HIV (persen)*</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)*</i>	-	-	-	-	-	-
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	116,31	105	120	119	128	140
3	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang						
	- Pekerjaan umum						
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	70,09	73,48	76,87	80,27	83,66	87,05
	Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan	750	850	700	825	650	700
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,97	2,71	3,73	5,13	7,05	9,69
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	-	-	-	-	-	-
	rasio penduduk perkotaan terlayani layanan persampahan*						
	rasio rumah tangga bersanitasi baik*						
	- Penataan ruang						
	Jumlah dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, dan zoning regulation)	4	5	6	7	8	9
4	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman						
	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu*						
5	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat						
	Jumlah ormas, LSM, Parpol dan masyarakat yang dibina	50	50	55	55	55	55

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate)	16	16	16	16	15	15
6	Bidang sosial.						
	Jumlah panti asuhan yang dibina	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terbantu	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539	9.539
1.B	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.						
7	Bidang tenaga kerja						
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67	67	67	68	68,29	68,29
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	46	50	54	62	68	70
8	Bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak						
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	67,94	68,23	68,51	68,80	69,09	69,37
	Rasio KDRT	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	terselesaikan	terselesaikan	terselesaikan	terselesaikan	terselesaikan	terselesaikan
9	Bidang pangan						
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.						
	Energi	5,51	5,66	5,81	5,96	6,11	6,25
	Protein	136,15	139,80	143,45	149,70	150,75	154,40
	Penguatan Cadangan Pangan.	-	30	50	60	70	80
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	75	80	83	83	85	85
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	75	80	83	83	85	85
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	77,00	79,00	81,00	81,00	83,00	83,00
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	40	50	60	70	80	85
	Penanganan Daerah Rawan Pangan.						
	Rawan Ketersediaan Pangan	28	28	28	28	28	28
	Rawan Rumah Tangga Miskin	28	28	28	28	28	28
	Rawan gizi kurang	22	22	25	25	25	25
	Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
	Konsumsi beras per tahun*						
10	Bidang pertanian						
11	Bidang lingkungan hidup						
	Pencemaran status mutu air	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100	100
	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100
12	Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil						
	Persentase kepala keluarga keluarga memiliki Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100
	Rasio penduduk berakte kelahiran	33	35	36	38	39	40
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100	100	100	100	100	100
	Rasio penerbitan akta kematian	26	48	56	62	70	78
15	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa						
	LPM Berprestasi	2	2	2	2	2	2
	PKK aktif	100	100	100	100	100	100
	Posyandu aktif	82	85	88	90	95	100
	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Badan Usaha Nagari (BUMNag)		4	11	20	20	20
	Jumlah Nagari memiliki database berbasis IT		11	52	52	52	52
	Jumlah aparatur nagari pengelola IT		11	52	52	52	52
16	Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
	Rasio akseptor KB	66,00	68,00	72,00	75,00	80,00	80,00
16	Bidang perhubungan						
	Jumlah Terminal Bis	-	1	1	1	1	1
	Kepemilikan KIR	100	100	-	-	-	-
	Pemasangan Rambu-rambu	100	81	78	75	73	71
	Jumlah kasus kecelakaan	50	45	40	35	30	25
17	Bidang komunikasi dan informatika						
	Jumlah SKPD yang memiliki website/ e-government yang terintegrasi	4	seluruh SKPD				
18	Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah						
	Jumlah koperasi aktif	114	115	116	117	120	123
	UMKM terlatih*						
19	Bidang penanaman modal						
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	12	12	12	12	12
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)*	-	-	-	-	-	-
	Jumlah izin yang dikeluarkan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Investasi dan penyertaan modal masyarakat/pemda dan swasta		ada	ada	ada	ada	ada
20	Bidang kepemudaan dan olah raga						
	Jumlah cabang olah raga yang dibina	-	24	-	24	-	24
	Jumlah Pemuda yang dilatih		104	104	104	104	104
21	Bidang statistik						
	Ketersediaan data statistik sektoral*	73	76	80	83	86	89
22	Bidang persandian						
23	Bidang kebudayaan						
	Terbentuknya tim ahli cagar budaya;	1 tim					
	Inventarisasi warisan budaya;	1 unit					
	Kegiatan penelitian warisan budaya.		1 keg				
	Ketersediaan sarana dan prasarana wisata sejarah		1 paket				
	Revitalisasi rumah gadang/kerajaan menjadi museum insitu;		1 paket				
	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan khasanah dan warisan budaya		1 paket				
24	Bidang perpustakaan						
	Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Perpustakaan Binaan		52	52	52	52	52
	Jumlah pengunjung perpustakaan	-	-	-	-	-	-
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10.175	10.275	10.375	10.475	10.575	10.675
25	Bidang kearsipan.						
2	Urusan pemerintahan pilihan						
1	Bidang kelautan dan perikanan						
	Produksi perikanan	20.109	20.209	20.409	20.609	20.809	20.809
	Konsumsi ikan*						
2	Bidang pariwisata						
	Jumlah Destinasi wisata	23	25	26	26	26	26
	Jumlah kawasan wisata yang dikembangkan	2	2	3	3	3	3
	Jumlah event wisata yang dilaksanakan		1	2	2	2	2
3	Bidang pertanian						
	Kelembagaan/ ekonomi pertanian						
	NTP						
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,98	28,58	28,22	27,81	27,42	27,04

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kelompok tani teregister*						
	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)						
- Pertanian	29	29	30	30	31	32	
- Kehutanan	68	69	69	70	71	71	
- Perikanan	9	10	11	13	14	16	
Tanaman Pangan dan hortikultura							
produksi padi	66.555	69.883	73.377	77.046	80.898	84.000	
produkтивitas padi	4,75	4,82	4,87	4,93	4,97	5,10	
produksi jagung	6	6	6	6	6	6	
luas sawah*							
produksi duku*							
produksi salak*							
luas areal hortikultura	41	42	42	42	42	42	
Perkebunan							
produksi karet*							
produkтивitas karet*	5,04	5,29	5,55	5,83	6,12	6,43	
produksi sawit*							
produkтивitas sawit*	14,92	15,67	16,45	17,27	18,33	19,23	
produksi coklat*							
produkтивitas coklat*	0,84	0,842	0,92	1	1,1	1,1	
Peternakan							
populasi sapi	41.601	42.433	43.281	44.147	45.030	45.931	
populasi ayam potong*							
4 Bidang kehutanan							
5 Bidang energi dan sumber daya mineral							
6 Bidang perdagangan							
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,83	12,86	12,88	12,92	12,93	12,92	
Persentase pasar dalam kondisi baik	22,50	25,00	27,78	30,56	33,33	36,11	
7 Bidang perindustrian							
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5,54	5,26	5,02	4,77	4,53	4,28	
Jumlah produk olahan hasil perkebunan *							
Jumlah produk olahan yang menembus pasar propinsi*			2	4	4	5	
8 Bidang transmigrasi							
Jumlah lokasi transmigrasi yang ditata dan dikembangkan	1	2	2	2	2	2	
3 Urusan penunjang							
1 Bidang perencanaan							
persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	95	97	100	100	100	100	
Persentase konsistensi program/kegiatan RKPD dan APBD	90	95	95	95	95	95	
Cakupan data pembangunan tersedia	60	65	75	80	85	85	

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkatdaerah, lintas perangkatdaerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

10.1. PEDOMAN TRANSISI DAN PERUBAHAN

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat (2) huruf j, menyatakan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan peraturan tersebut maka RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan RKPD, akan dipergunakan untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya pada tahun 2021. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh bupati dan Wakil bupati periode selanjutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dharmasraya Tahun 2005-2025, Tahap 4 (tiga) yakni Meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah dan menjadikan Dharmasraya pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan kesehatan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan perubahan RPJMD, hanya dilakukan bila terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Yang dimaksud perubahan mendasar untuk merubah RPJMD berdasarkan kesepakatan Bupati dengan Pimpinan DPRD. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi perangkatdaerahdalam menyusun Rencana Strategis/Renstra PD Tahun 2016-2021.

Setelah dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 ini disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkatdaerah, dalam bentuk Rencana StrategisPerangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya Renstra PD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja PD).

2. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2016 sampaidengantahun2021.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan (RKPD). Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Dengan demikian RKPD dan Renja PD harus konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

3. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJMD

Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 tidak hanya menggunakan pendekatan *top down*, politis, dan teknokratis tapi juga melalui pendekatan partisipatif dan *bottom up*. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan *stakeholders*, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah lainnya, serta Dunia Usaha untuk mendukung pelaksanaan RPJMD.

Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara pendapatan asli daerah sangat terbatas. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Dunia Usaha juga menjadi hal strategis dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

5. RPJMD merupakan dasar pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Dengan adanya dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang memuat indikator yang jelas dan terukur, akan membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, baik target indikator kinerja lima tahunan maupun tahunan.

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA